KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP 2026 | EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS | panganbiru | 08 POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP



MANTEEP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin serta rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan III Tahun 2026" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Triwulan III Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik *makro* maupun *mikro* serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Cilacap, 16 Oktober 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahrus S.St.Pi., M.Si.
NIP. 198102182003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Halaman

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
RINGKASAN EKSEKUTIF vi
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Tujuan 2
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 3
Keragaan Pegawai 8
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2026 15
PERENCANAAN KINERJA 17
Rencana Strategis KKP 17
Visi 18
Misi 18
Tujuan 19
Sasaran 19
Rencana Kerja Tahun 2026 20
Perjanjian Kinerja Tahun 2026 20
Pengukuran Kinerja 22
AKUNTABILITAS KINERJA 25
Capaian Kinerja Organisasi 25
Evaluasi dan Analisis Kinerja 26
Capaian IKU PPS Cilacap 26
Nilai PNBP Non SDA 29
Volume Produksi Perikanan Tangkap 34
Tingkat Kinerja Pelabuhan 37
Nilai Pengendalian Lingkungan 40
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan 43
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan 46
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ 48
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 51
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026 55
PENUTUP 56
Kesimpulan 56
Saran 57
Penutup 59
LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG 61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026 20
Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026 22
Tabel 3 Bobot validasi IKU 22
Tabel 4 Klasifikasi target indikator kinerja 23
Tabel 5 Status Capaian Nilai Kinerja 24
Tabel 6 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026 29
Tabel 7 Capaian IKU 1 Triwulan III Tahun 2026 30
Tabel 8 Perbandingan Penerimaan PNBP Non SDA dengan Tw III Tahun 2025 32
Tabel 9 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1 34
Tabel 10 Capaian IKU 2 Triwulan III Tahun 2026 35
Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2 36
Tabel 12 Capaian IKU 4 Triwulan III Tahun 2026 37
Tabel 13 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4 40
Tabel 14 Capaian IKU 7 Triwulan III Tahun 2026 41
Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7 43
Tabel 16 Capaian IKU 8 Triwulan III Tahun 2026 44
Tabel 17 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 8 45
Tabel 18 Capaian IKU 11 Triwulan III Tahun 2026 46
Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11 48
Tabel 20 Capaian IKU 14 Triwulan III Tahun 2026 49
Tabel 21 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 14 51
Tabel 22 Capaian IKU 18 Triwulan III Tahun 2026 52
Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18 54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026 4
Gambar 2 Diagram Pie Status Pegawai PPS Cilacap 8
Gambar 3 Diagram Pie Struktur Pegawai PPS Cilacap 9
Gambar 4 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap 10
Gambar 5 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Umum di PPS Cilacap 11
Gambar 6 Diagram Pie Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap 12
Gambar 7 Diagram Pie Komposisi Pegawai berdasarkan tim kerja 13
Gambar 8 Diagram pie perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap 14
Gambar 9 Nilai Kinerja PPS Cilacap Periode Triwulan III Tahun 2026 25
Gambar 10 *Screen shot* Aplikasi SIDAK 47
Gambar 11 Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan 53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) merupakan unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dari Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, yang diikuti dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Tahunan secara konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan, PPS Cilacap berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Kegiatan. Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PPS Cilacap telah menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam Tahun 2026. Kelima sasaran kegiatan tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan rincian 8 (delapan) indikator kinerja dengan periode pengukuran triwulanan, 3 (tiga) indikator kinerja semesteran, dan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan. Periode Triwulan III Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa dari lima sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 seluruhnya tercapai dengan baik dalam percapaian progres kegiatan. Capaian kinerja tersebut tercermin dalam hasil pengukuran melalui aplikasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), di mana PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,20% pada Triwulan III. Nilai tersebut berada dalam kategori "Istimewa" (rentang nilai 110-120) dan ditandai dengan indikator berwarna biru, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja pada Tahun 2026, pada periode Triwulan III dapat tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 3.996,89 Juta atau 152,59% dari target Triwulan III yaitu Rp. 2.619,303 Juta;
2. IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 34.192,75 Ton atau 162,82% dari target Triwulan III yaitu 21.000 Ton;
3. IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 92 atau sebesar 162,82% dari target Triwulan III yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 90,93 atau sebesar 275,55% dari target Triwulan III yaitu Nilai 33;
5. IKU 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.361 Kapal atau 102,87% dari target Triwulan III yaitu 1.323 Kapal;
6. IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100 Persen atau 116,28% dari target Triwulan III yaitu 86 Persen;
7. IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 129,87% dari target Triwulan III yaitu 77 Persen;
8. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 95,06 atau 107,05% dari target Triwulan III yaitu Nilai 88,8.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan tingkat pencapaian yang melampaui target. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPS Cilacap dalam mendukung peningkatan penerimaan negara bukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pajak, optimalisasi produksi perikanan tangkap, peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan kesyahbandaran, serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance)* adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen PPS Cilacap dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) atau Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan PPS Cilacap.

PPS Cilacap sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP. Sebagai salah satu instansi dan penyelenggaran negara di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menetapkan rencana kerja tahun 2026, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj PPS Cilacap untuk periode Triwulan III Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban oleh PPS Cilacap. Acuan dalam penyusunan LKj PPS Cilacap Tahun 2026 antara lain, yaitu:

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan tangkap. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang. Melalui pelaporan yang terukur, terarah, dan berlandaskan regulasi yang berlaku, PPS Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan

PPS Cilacap sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Negara telah menetapkan target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut kemudian disusun dalam Laporan Kinerja PPS Cilacap sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026 ini, yaitu:

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan PPS Cilacap kepada DJPT;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya; dan
3. sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

PPS Cilacap mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap tanggal 30 Desember 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
d. pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
o. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Adapun susunan organisasi PPS Cilacap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 1 Struktur Organisasi PPS Cilacap Tahun 2026

1. Subbagian Umum.

   Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

   a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan Zona Integritas WBK PPS Cilacap;
   b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPS Cilacap;
   c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPS Cilacap;
   d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPS Cilacap;
   e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Cilacap;
   f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Cilacap;
   g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPS Cilacap;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPS Cilacap;
i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPS Cilacap;
j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPS Cilacap;
k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPS Cilacap;
l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPS Cilacap;
m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPS Cilacap;
n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPS Cilacap;
o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPS Cilacap;
p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPS Cilacap;
q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPS Cilacap.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Cilacap Nomor B.2408/PPSC/KP.440/IX/2026 tanggal 1 September 2026.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.2408/PPSC/KP.440/IX/2026 tanggal 1 September 2026 tentang Tim Kerja lingkup PPS Cilacap sebagai berikut:

a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan data dan statistik PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional PPS Cilacap;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Tim Kerja Kesyahbandaran;

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pemeriksaan *Log Book* di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di PPS Cilacap;
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di PPS Cilacap;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di PPS Cilacap.

c. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana;

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tata Kelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPS Cilacap;
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di PPS Cilacap.

d. Tim Kerja Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemanfaatan di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

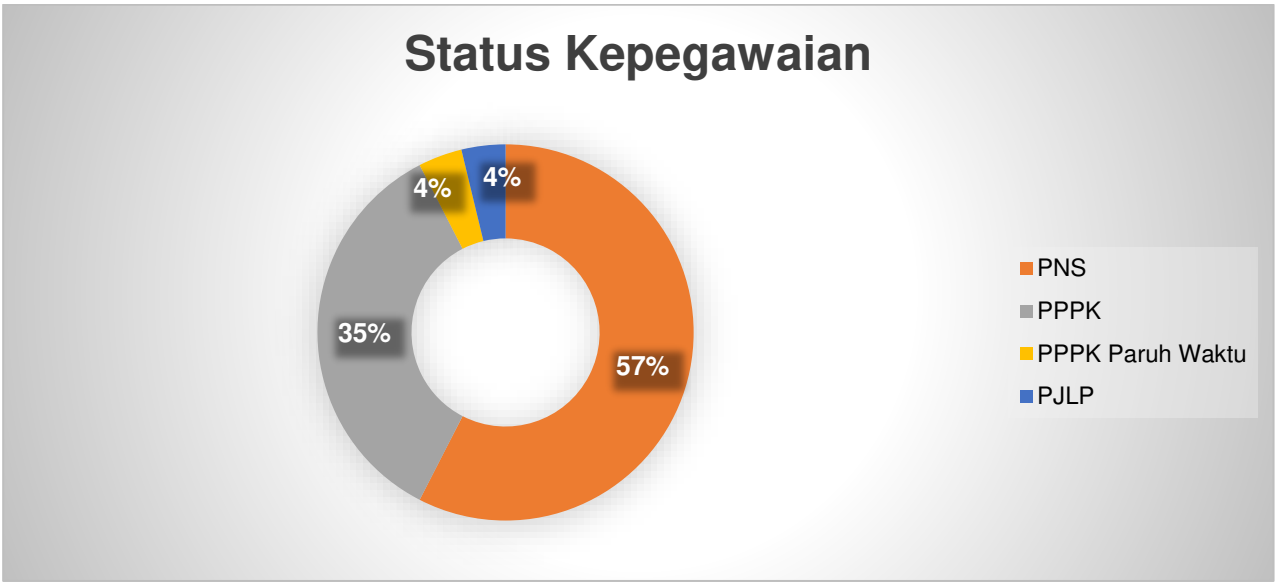
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di PPS Cilacap;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di PPS Cilacap;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di PPS Cilacap;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di PPS Cilacap;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di PPS Cilacap.

Keragaan Pegawai

Berdasarkan Gambar 2, jumlah pegawai di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap per 30 September 2026 tercatat sebanyak 106 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 61 orang (±57%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 37 orang (±36%), PPPK Paruh Waktu sebanyak 4 orang (±4%), serta Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang (±4%).



Gambar 2 Diagram Pie Status Pegawai PPS Cilacap

Struktur kepegawaian tersebut masih didominasi oleh PNS. Kondisi ini menunjukkan peran utama PNS dalam menjaga kesinambungan kelembagaan serta pelaksanaan tugas strategis pelabuhan. Dominasi tersebut juga sejalan dengan pengisian jabatan struktural oleh PNS dalam menjalankan fungsi manajerial dan pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, proporsi PPPK yang mencapai lebih dari sepertiga dari total pegawai mencerminkan penguatan sumber daya manusia pada jabatan fungsional dan teknis. Penguatan ini bersifat adaptif terhadap kebutuhan operasional pelabuhan serta menjadi indikator transformasi manajemen kepegawaian menuju peningkatan efektivitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Sebagian besar PPPK tersebut dapat dikategorikan dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang memerlukan keahlian khusus, serta sebagian lainnya dalam Jabatan Fungsional Umum.

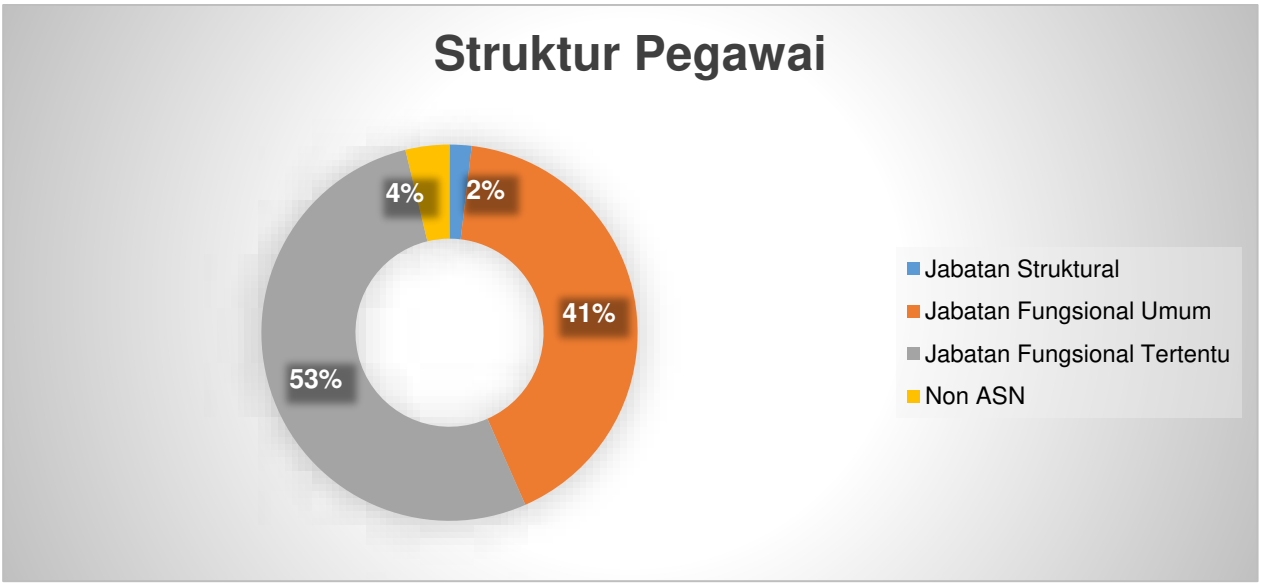
Sementara itu, keberadaan PJLP yang mencapai sekitar 4% berperan sebagai pendukung kegiatan operasional harian, khususnya pada aspek teknis dan administratif yang memerlukan tingkat fleksibilitas tinggi. Kelompok ini termasuk dalam kategori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

non-ASN dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan operasional tanpa ikatan kepegawaian tetap.

Dengan komposisi tersebut, PPS Cilacap memiliki struktur sumber daya manusia yang relatif seimbang antara pegawai tetap, tenaga profesional kontraktual, dan tenaga pendukung. Keseimbangan ini memungkinkan pelabuhan untuk beradaptasi terhadap dinamika operasional serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

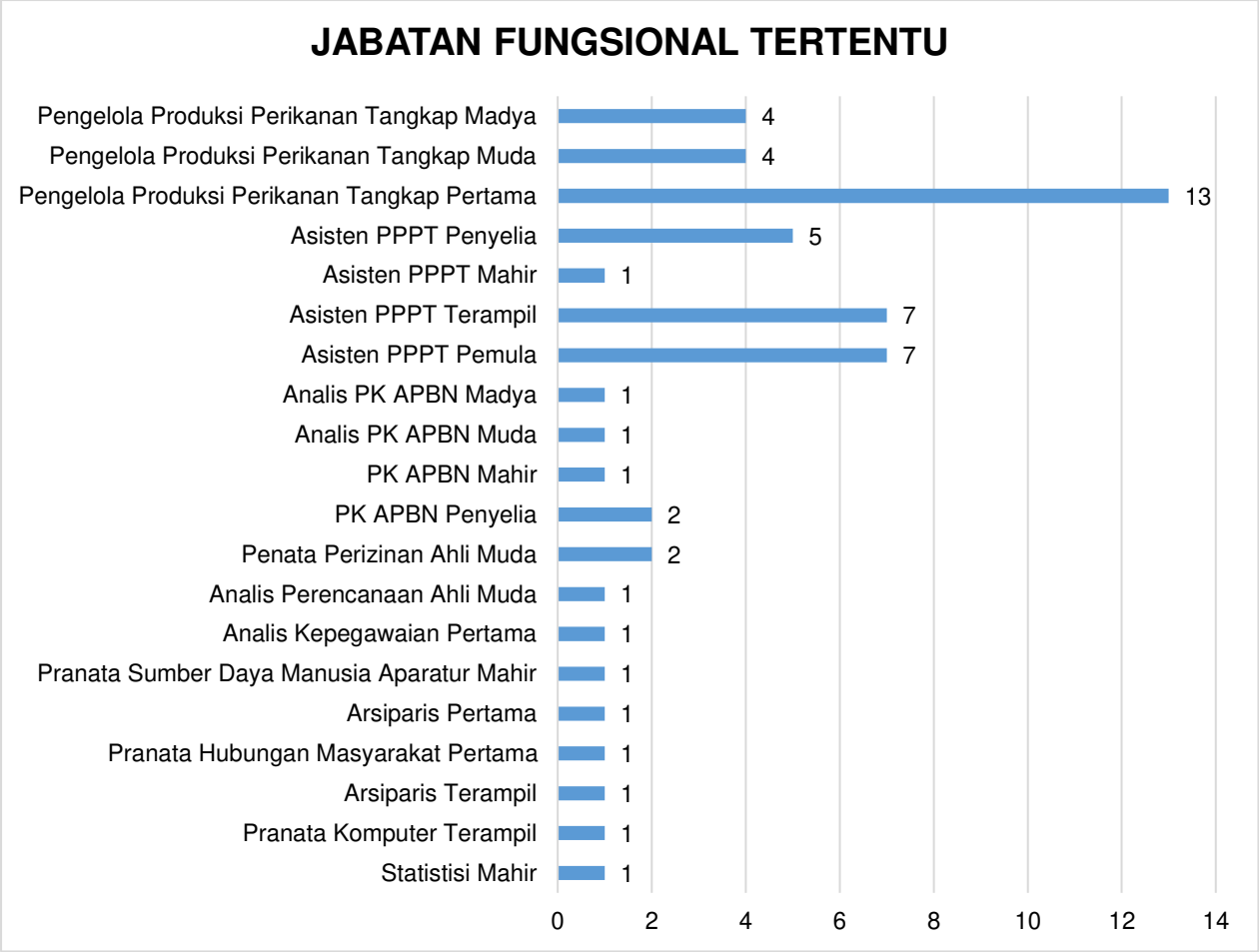
Berdasarkan Gambar 3, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di PPS Cilacap didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 56 orang (±53%), diikuti Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 44 orang (±41%). Sementara itu, Non ASN berjumlah 4 orang (±4%) dan Jabatan Struktural sebanyak 2 orang (±2%). Struktur tersebut mencerminkan orientasi kinerja PPS Cilacap yang kuat pada fungsi teknis dan profesional, di mana sebagian besar pegawai berperan langsung dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan serta pelayanan publik di sektor perikanan tangkap.



Gambar 3 Diagram Pie Struktur Pegawai PPS Cilacap

Dominasi JFT menunjukkan penekanan pada kompetensi keahlian dan kinerja berbasis profesi. Penekanan ini sejalan dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Jabatan fungsional tertentu juga berperan penting dalam menjamin penerapan standar teknis dan operasional di lapangan, khususnya pada bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap. Sebanyak 20 jenis jabatan fungsional tertentu aktif di PPS Cilacap. Jumlah terbanyak berada pada jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama, yaitu 13 orang. Kelompok ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan teknis pelabuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 4 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di PPS Cilacap

Apabila ditinjau lebih lanjut pada rincian JFT seperti yang terlihat pada gambar 4, dapat diketahui bahwa struktur jabatan didominasi oleh kelompok jabatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama merupakan yang terbanyak dengan 13 orang, diikuti oleh Asisten Produksi Perikanan Tangkap Pemula dan Terampil masing-masing sebanyak 7 orang, serta Asisten Produksi Perikanan Tangkap Penyelia sebanyak 5 orang. Selain itu, terdapat Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda dan Madya masing-masing sebanyak 4 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa kekuatan utama SDM fungsional PPS Cilacap berada pada aspek produksi, pembinaan, dan pendampingan kegiatan perikanan tangkap.

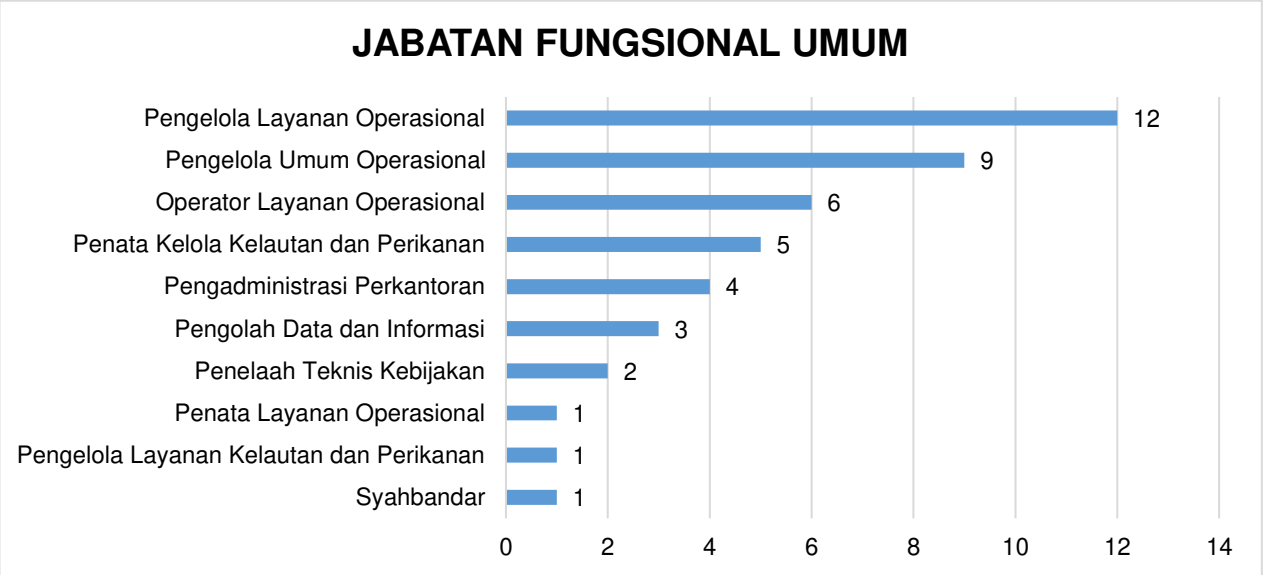
Di sisi lain, jabatan yang berkaitan dengan fungsi pendukung organisasi seperti perencanaan, kepegawaian, dan penganggaran, antara lain Analis Perencanaan, Analis Kepegawaian, serta Analis PK APBN memiliki jumlah yang relatif terbatas, yaitu berkisar antara 1–2 orang pada setiap jenjang jabatan. Demikian pula jabatan pendukung lainnya seperti Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pranata Hubungan Masyarakat, yang masing-masing hanya diisi oleh satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

administratif dan manajerial tetap berjalan, namun dengan proporsi yang lebih efisien dibandingkan fungsi teknis operasional.

Secara keseluruhan, komposisi dan struktur sumber daya manusia PPS Cilacap mencerminkan keseimbangan antara pegawai tetap, tenaga profesional berbasis keahlian, dan tenaga pendukung operasional. Struktur ini menunjukkan orientasi kelembagaan yang berfokus pada penguatan fungsi teknis dan pelayanan publik, sekaligus tetap menjaga efektivitas tata kelola organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 5, komposisi JFU di PPS Cilacap menunjukkan sebaran yang cukup beragam, dengan dominasi pada jabatan yang mendukung operasional layanan pelabuhan. Jabatan dengan jumlah terbesar adalah Pengelola Layanan Operasional sebanyak 12 orang, diikuti oleh Pengelola Umum Operasional sebanyak 9 orang, serta Operator Layanan Operasional sebanyak 6 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan operasional menjadi salah satu penopang utama dalam kegiatan pelabuhan. Selain itu, terdapat beberapa jabatan dengan jumlah menengah, yaitu Pengadministrasi Perkantoran, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, serta Pengolah Data dan Informasi. Kelompok ini berperan dalam mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan data, serta tata kelola kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 5 Diagram Jumlah Pejabat Fungsional Umum di PPS Cilacap

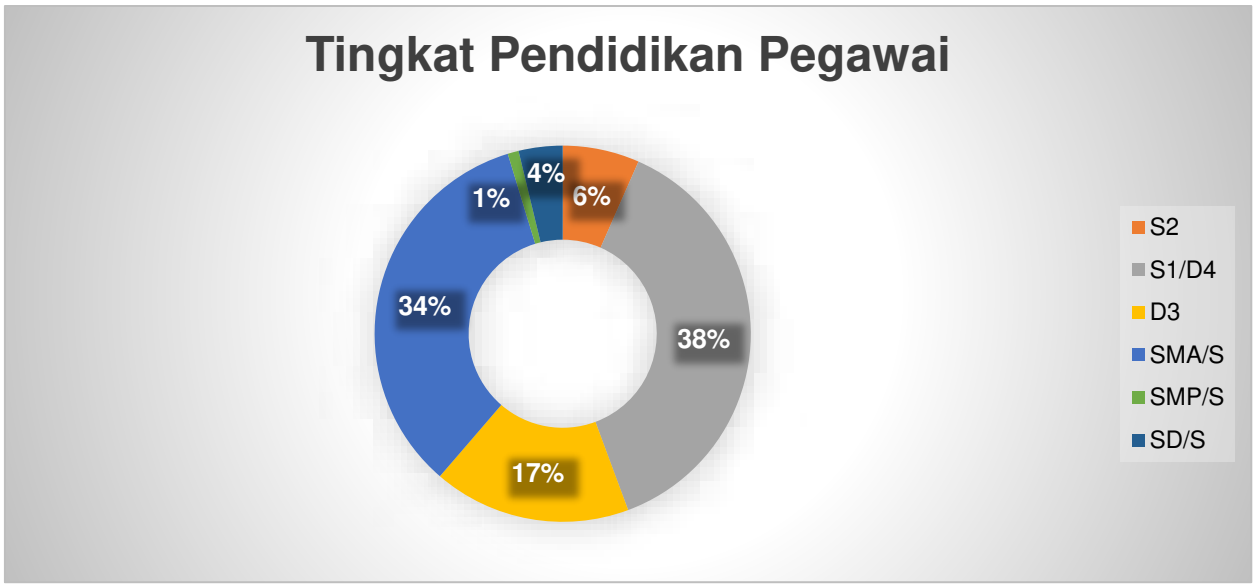
Di sisi lain, terdapat beberapa jabatan dengan jumlah yang relatif terbatas, seperti Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, Penelaah Teknis Kebijakan, serta Syahbandar, yang hanya diisi oleh 1-2 orang. Keberadaan jabatan-jabatan ini meskipun terbatas tetap memiliki peran strategis,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

khususnya dalam mendukung aspek teknis tertentu, pengambilan kebijakan, serta fungsi pengawasan dan keselamatan operasional pelabuhan.

Secara keseluruhan, struktur JFU di PPS Cilacap mencerminkan dukungan yang kuat terhadap fungsi operasional dan pelayanan, dengan distribusi pegawai yang menyesuaikan kebutuhan aktivitas pelabuhan. Kombinasi antara jabatan operasional, administratif, dan teknis ini memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan gambar yang disajikan pada gambar 6, komposisi tingkat pendidikan pegawai dapat dianalisis secara bertingkat. Data menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang pendidikan tinggi, dengan jumlah terbesar di tingkat S1/D4 sebanyak 40 orang (±38%), diikuti secara signifikan oleh lulusan D3 sebanyak 18 orang (±17%), dan SMA/SMK sebanyak 36 orang (±34%). Adanya sejumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 7 orang (±6%) juga menandakan bahwa PPS Cilacap telah memiliki basis tenaga ahli yang mampu mendorong analisis kebijakan dan inovasi di tingkat yang lebih strategis. Sementara itu, representasi pendidikan pada tingkat SMP/S dan SD/S menunjukkan keberagaman latar belakang sumber daya manusia yang ada.



Gambar 6 Diagram Pie Tingkat Pendidikan Pegawai di PPS Cilacap

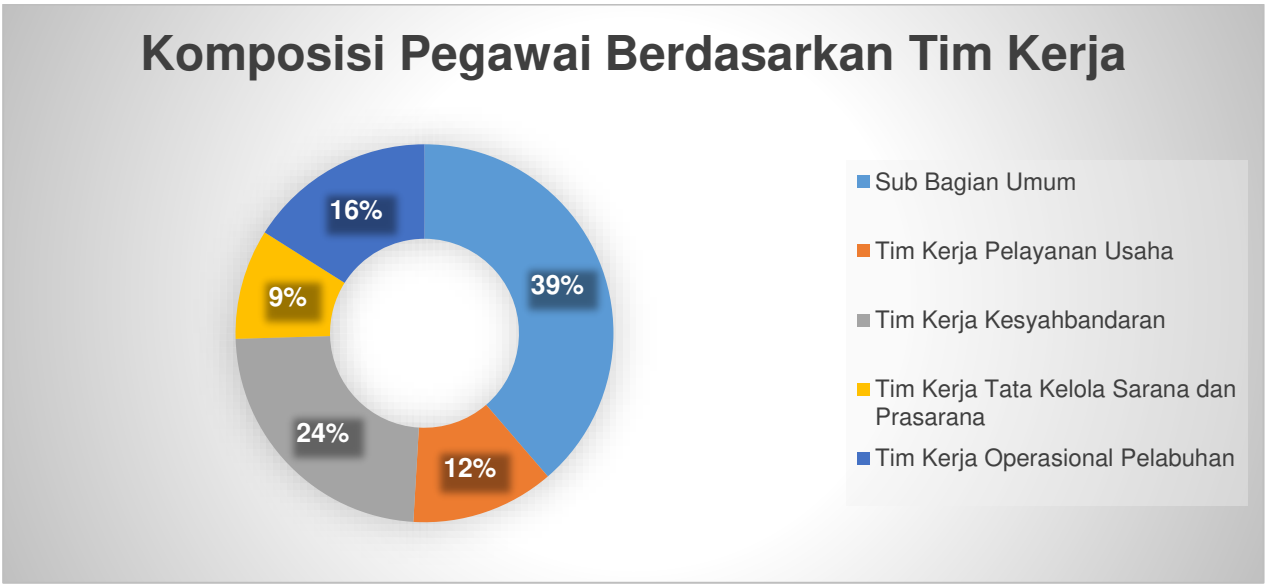
Distribusi pendidikan ini mencerminkan bahwa PPS Cilacap memiliki modal intelektual yang kuat untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis, operasional, dan administratif secara profesional. Dominasi lulusan diploma dan sarjana mengindikasikan kesiapan SDM dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian spesifik serta kemampuan adaptasi terhadap sistem dan teknologi modern. Keberadaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pegawai dengan pendidikan lebih tinggi (S2) juga menjadi aset berharga untuk pengembangan organisasi, perencanaan strategis, dan peningkatan kualitas layanan.

Dengan komposisi seperti ini, instansi dapat lebih mudah menerapkan sistem pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, serta mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya program pembinaan karir dan alih pengetahuan yang menjembatani perbedaan tingkat pendidikan, sehingga seluruh pegawai dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidang dan jenjang masing-masing.

Berdasarkan gambar 7, komposisi pegawai berdasarkan tim kerja menunjukkan bahwa dari total 106 pegawai, jumlah terbesar berada pada Sub Bagian Umum, yaitu sebanyak 41 orang (±39%). Selanjutnya, Tim Kerja Kesyahbandaran memiliki 25 orang (±24%), diikuti oleh Tim Kerja Operasional Pelabuhan sebanyak 17 orang (±16%). Sementara itu, Tim Kerja Pelayanan Usaha terdiri atas 13 orang (±12%), dan Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 10 orang (±9%).



Gambar 7 Diagram Pie Komposisi Pegawai berdasarkan tim kerja

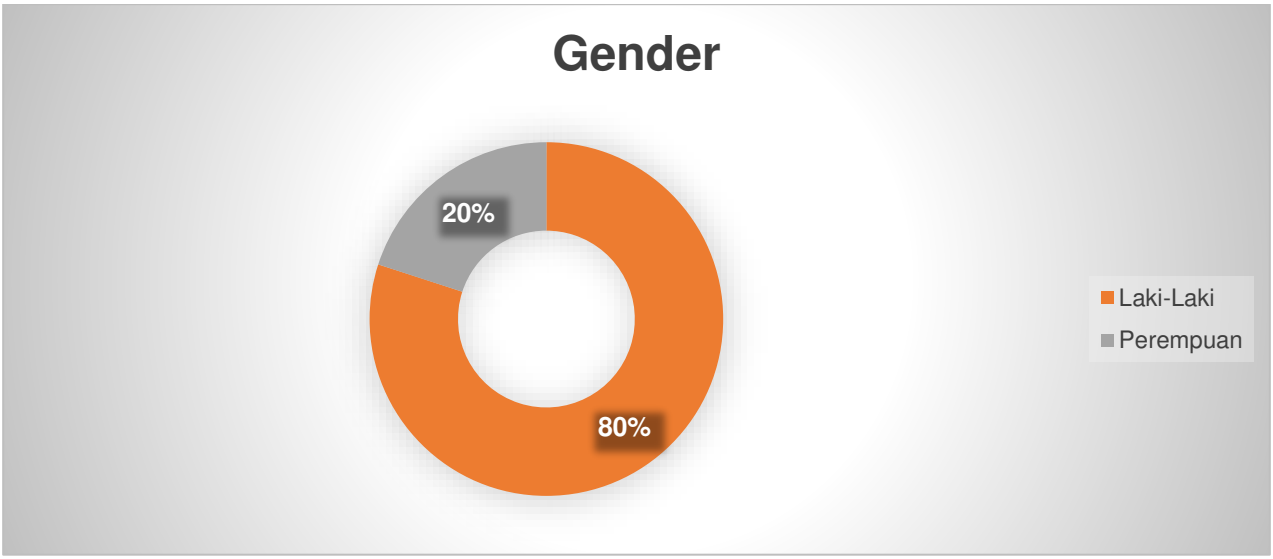
Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur sumber daya manusia di PPS Cilacap relatif tersebar pada berbagai fungsi organisasi, dengan proporsi terbesar berada pada fungsi administratif dan pendukung melalui Sub Bagian Umum, serta fungsi teknis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional pelabuhan, khususnya Tim Kerja Kesyahbandaran dan Tim Kerja Operasional Pelabuhan. Besarnya jumlah pegawai pada kelompok tersebut mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap dukungan SDM yang memadai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi administrasi, pengawasan, pelayanan, serta operasional kepelabuhanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Di sisi lain, keberadaan pegawai pada Tim Kerja Pelayanan Usaha dan Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana menunjukkan adanya dukungan SDM pada fungsi pelayanan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan tim kerja lainnya, kedua fungsi tersebut tetap memiliki peran penting dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan PPS Cilacap. Oleh karena itu, distribusi pegawai tidak hanya perlu dilihat dari aspek jumlah, tetapi juga dari kesesuaian antara kebutuhan beban kerja, kompetensi pegawai, dan karakteristik tugas pada masing-masing tim kerja.

Dengan komposisi ini, PPS Cilacap memiliki basis SDM yang cukup beragam untuk mendukung pelaksanaan fungsi administrasi, teknis, pelayanan, dan operasional. Namun, untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDM, diperlukan penataan dan distribusi pegawai yang proporsional berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan kompetensi masing-masing tim kerja. Selain itu, pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, serta koordinasi lintas tim perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap tim kerja mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kualitas pelayanan PPS Cilacap.

Dari aspek gender (gambar 8), proporsi pegawai laki-laki masih mendominasi sebesar 85 orang atau 80%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 21 orang atau 20%. Meskipun terjadi ketimpangan gender, namun peran perempuan tetap signifikan dalam mendukung kegiatan organisasi, baik pada aspek administratif maupun teknis.



Gambar 8 Diagram pie perbandingan gender pegawai di PPS Cilacap

Secara keseluruhan, keragaan pegawai di PPS Cilacap mencerminkan struktur SDM yang cukup solid dan berpotensi besar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan komposisi kepegawaian yang didominasi oleh tenaga fungsional serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi, PPS Cilacap memiliki modal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sumber daya manusia yang strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan ke depan. Optimalisasi kapasitas, pemerataan tugas sesuai kompetensi, serta peningkatan profesionalisme pegawai menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan organisasi secara berkelanjutan.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2026

Sistem Penyajian Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban yang dapat menggambarkan kinerja instansi pemerintah secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mengenai keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 ini berisi pertanggungjawaban kinerja PPS Cilacap dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2026 sendiri dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2026 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja (komitmen kinerja) yang telah dilakukan akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan membandingkan hasil. Demikian pula akan disajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun berjalan, selain juga melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dalam mengaitkan dengan anggaran maka, realisasinya akan digunakan untuk membahas perwujudan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun sistemetika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III Tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang PPS Cilacap seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di PPS Cilacap.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja PPS Cilacap Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran,** berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis KKP

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka peran sektor kelautan dan perikanan adalah *engine growth* bagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru sehingga dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan *multiplier effect* yang besar. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 0%, maka pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara inklusif dan merata dengan menyasar nelayan, pembudi daya, petambak garam, pengolah, pemasar, dan masyarakat di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana akibat ancaman perubahan iklim. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dicapai melalui pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan vokasi serta penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Upaya tersebut diperkuat dengan penerapan standardisasi dan sertifikasi guna memastikan tenaga kerja yang ada memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan industri, berdaya saing tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah ke depan, paradigma lama yang hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Sebagai landasan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, diterapkan paradigma ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Pendekatan ini menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan. pengendalian tekanan terhadap ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan prinsip tersebut, ekonomi biru menjadi pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) dilakukan secara komprehensif untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran nasional. Renstra menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renstra KKP tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan guna mengidentifikasi peluang pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan sektor ini juga dikaji secara komprehensif. Analisis tersebut dilengkapi dengan telaah lingkungan strategis, baik nasional maupun global, yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Visi

Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah ”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang KKP maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Tujuan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sasaran

PPS Cilacap memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2026 dengan mengacu pada sasaran program DJPT yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu:

SK-1 Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

SK-2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat.

SK-3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab.

SK-4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

SK-5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026 disajikan pada Tabel 1.

No	Kegiatan	Pagu
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	102.625.306.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.751.657.000
	TOTAL	**119.376.963.000**

Tabel 1 Rencana Kerja PPS Cilacap TA 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, PPS Cilacap telah menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Cilacap. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang diukur melalui 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Target pada masing-masing IKU telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja PPS Cilacap selama Tahun 2026.

Sehubungan dengan adanya perubahan pimpinan pada beberapa Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta sebagai tindak lanjut atas arahan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026, PPS Cilacap telah melakukan reviu dan penyusunan kembali dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan pejabat pimpinan yang baru. Revisi tersebut diajukan berdasarkan Nota Dinas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Nomor 1054/PPSC/RC.610/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 dan disusun dengan tetap berpedoman pada sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, revisi Perjanjian Kinerja ini tidak mengubah substansi sasaran maupun target kinerja yang telah ditetapkan, melainkan hanya menyesuaikan pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja serta memperkuat komitmen dalam pencapaian kinerja organisasi. Adapun target 18 (delapan belas) IKU PPS Cilacap Tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian administrasi dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8

Tabel 2 Perjanjian Kinerja PPS Cilacap TA 2026

Pengukuran Kinerja

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU. Status capaian yang ditunjukan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antara capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU, terdiri dari *Outcome*, *Output* Kendali Rendah, *Output* Kendali Tinggi, dengan bobot seperti Tabel 3.

No	Validitas IKU	Bobot
1	*Outcome*	5
2	*Output* Kendali Rendah	3
3	*Output* Kendali Tinggi	2

Tabel 3 Bobot validasi IKU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas *Outcome* yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas *Output* Kendali Rendah yaitu yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaianya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas *Output* Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja. Pola Perhitungan terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan mensepakati standar status kinerja untuk nilai kinerja dengan klasifikasi polarisasi. Polarisasi terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize*. *Maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk. *Minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk. *Stabilize* yaitu semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Berikut klasifikasi polarisasi yang ditentukan sesuai Tabel 4.

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<50%	X>50%	X>50% atau X<50%	Sangat Kurang
X=50%-<70%	X=50%->70%	-	Kurang
X=70%-<90%	X=70%->90%	-	Cukup
X=90%-<120%	X=90%->120%	X=100%	Baik
X≥110%	X≤120%	-	Sangat Baik

Tabel 4 Klasifikasi target indikator kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximixe* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Status capaian nilai kinerja ditentukan oleh nilai indeks pada Tabel 5.

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110-120
Baik	Nilai 90-<110
Cukup	Nilai 70-<90
Kurang	Nilai 50-<70
Sangat Kurang	Untuk Nilai <50
Belum Ada Penilaian	

Tabel 5 Status Capaian Nilai Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2026, PPS Cilacap menerima mandat untuk melaksanakan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan mencapai target dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SK dan IKU ini menjadi pedoman utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja di lingkungan PPS Cilacap. Memasuki akhir Triwulan III, pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran dan indikator tidak hanya berhasil dicapai, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Capaian tersebut tercermin secara kuantitatif melalui sistem monitoring resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan data sistem, PPS Cilacap mencatatkan nilai capaian sebesar 114,20% pada Triwulan III. Dengan nilai tersebut, PPS Cilacap berhasil masuk dalam kategori "Istimewa" (rentang nilai 110–120), yang ditandai dengan indikator warna biru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 9 berikut ini:



Gambar 9 Nilai Kinerja PPS Cilacap Periode Triwulan III Tahun 2026

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi seluruh pegawai PPS Cilacap yang terus berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kolaborasi tim yang solid, tata kelola yang baik, serta penguatan pengawasan dan evaluasi internal menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja yang unggul.

Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan semata, tetapi juga menjadi motivasi untuk menjaga konsistensi kinerja hingga akhir tahun anggaran. Dengan semangat kerja kolektif dan orientasi pada hasil, PPS Cilacap siap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menjawab tantangan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian IKU PPS Cilacap

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPS Cilacap. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja PPS Cilacap Tahun 2026 dapat tercapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan IKU Triwulan III Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	2.619,303	3.996,89	120	
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	21.000	34.192,75	120	
3	Pengelolaan Pelabuhan	3	Persentase permohonan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
	Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab		pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	92	109,52	
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)				
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33	90,93	120	
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.323	1.361	102,87	
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)				
5	Terwujudnya Layanan Dukungan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
	Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)				
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86	100	116,28	
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)				
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77	100	120	
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)				
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE %	
			Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)				
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8	95,06	107,05	

Tabel 6 Capaian IKU PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjaku KKP

SASARAN KEGIATAN 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

Nilai PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur optimalisasi pemanfaatan layanan dan aset negara di PPS Cilacap. PNBP merupakan penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang diperoleh dari pemanfaatan layanan, sumber daya, serta hak negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, capaian PNBP tidak hanya mencerminkan besarnya penerimaan negara, tetapi juga menggambarkan tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa.

Pelaksanaan pemungutan PNBP di PPS Cilacap mencakup berbagai jenis layanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan, antara lain jasa tambat dan labuh, penggunaan tanah dan/atau bangunan, penggunaan sarana dan prasarana, penggunaan transportasi, pas masuk, jasa kebersihan, penyediaan air dan listrik, serta layanan pendukung lainnya. Keragaman sumber penerimaan tersebut menunjukkan bahwa capaian PNBP dipengaruhi oleh pemanfaatan fasilitas pelabuhan, aktivitas pengguna jasa, dan pengelolaan layanan yang menjadi kewenangan PPS Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
3.492,404	3.996,89	114,45	2.619,303	3.996,89	152,59	3.996,61	0,01

Tabel 7 Capaian IKU 1 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 7, target tahunan PNBP Non-SDA PPS Cilacap Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.492,404 juta. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, realisasi penerimaan mencapai Rp3.996,89 juta atau sebesar 114,45% dari target tahunan. Dengan demikian, realisasi penerimaan telah melampaui target tahunan sebesar Rp504,486 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PPS Cilacap telah memenuhi target penerimaan tahunan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Kondisi ini menjadi hasil positif dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP Non-SDA dan perlu dipertahankan melalui pengelolaan penerimaan yang tertib serta optimalisasi pemanfaatan layanan dan aset pelabuhan.

Apabila dibandingkan dengan target Triwulan III Tahun 2026 sebesar Rp2.619,303 juta, realisasi PNBP Non-SDA sebesar Rp3.996,89 juta mencapai 152,59% dari target triwulanan. Dengan demikian, realisasi penerimaan telah melampaui target triwulanan sebesar Rp1.377,587 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan yang dihimpun hingga akhir September 2026 berada di atas rencana penerimaan untuk periode tersebut. Berdasarkan rincian penerimaan dalam nota dinas, sumber penerimaan terbesar berasal dari pelayanan jasa tambat dan labuh sebesar Rp2.608.703.554 Sementara itu, penerimaan dari penggunaan tanah dan/atau bangunan mencapai Rp586.159.853 Kedua sumber penerimaan tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan kepelabuhanan dan pemanfaatan aset dalam mendukung pencapaian PNBP PPS Cilacap.

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 7, realisasi PNBP Non-SDA Triwulan III Tahun 2026 sebesar Rp3.996,89 juta meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp3.996,61 juta. Berdasarkan angka terperinci dalam tabel 8, penerimaan meningkat dari Rp3.996.617.701 menjadi Rp3.996.892.120 atau bertambah sebesar Rp274.419 Persentase kenaikan tersebut dibulatkan menjadi 0,01%. Dengan demikian, meskipun total penerimaan relatif stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PPS Cilacap tetap mampu mempertahankan sekaligus sedikit meningkatkan realisasi PNBP Non-SDA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Akun	Uraian	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2026	Kenaikan / Penurunan
425131	**Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan**	**123.207.934**	**0**	**(123.207.934)**
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	123.207.934	0	(123.207.934)
425151	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**517.093.608**	**644.885.353**	**127.791.745**
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	323.805.826	390.979.990	67.174.164
	Pemeliharaan Prasarana	80.270.262	97.744.988	17.474.726
	Bangunan	71.458.538	77.330.875	5.872.337
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	0	20.104.000	20.104.000
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring/ikan	0	0	0
	Pelayanan Jasa *Cold Room* dan *Freezer*	24.714.982	0	(24.714.982)
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	14.000.000	34.288.000	20.288.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	2.844.000	2.937.500	93.500
	Ruang Pertemuan	0	21.500.000	21.500.000
425621	**Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan**	**3.356.316.159**	**3.351.778.767**	**(4.537.392)**
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	2.557.523.924	2.608.703.554	51.179.630
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	216.140.000	193.004.000	(23.136.000)
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	128.115.000	147.135.000	19.020.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	76.746.065	64.142.340	(12.603.725)
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	180.449.750	190.379.400	9.929.650
	Pelayanan Jasa Air	4.101.110	5.041.888	940.778
	Pelayanan Jasa Dock	48.440.000	0	(4.800.000)
	Pelayanan Jasa Listrik	144.800.310	143.372.585	(1.427.725)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	228.000	228.000
	JUMLAH PNBP	3.996.617.701	3.996.892.120	274.419

Tabel 8 Perbandingan Penerimaan PNBP Non SDA dengan Tw III Tahun 2025

Peningkatan penerimaan tersebut didukung oleh kenaikan pada beberapa jenis layanan. Penerimaan dari penggunaan sarana dan prasarana meningkat sebesar Rp127.791.745 sedangkan penerimaan jasa tambat dan labuh meningkat sebesar Rp51.179.630. Selain itu, penerimaan dari penggunaan transportasi meningkat sebesar Rp20.288.000 pas masuk berlangganan meningkat sebesar Rp19.020.000 dan jasa kebersihan kolam meningkat sebesar Rp9.929.650. Namun, peningkatan pada beberapa jenis layanan tersebut diimbangi oleh penurunan penerimaan dari layanan lainnya, antara lain pas masuk harian, jasa kebersihan kawasan, dan jasa listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan total penerimaan merupakan hasil dari perkembangan yang berbeda pada masing-masing sumber PNBP.

Secara keseluruhan, capaian IKU 1 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif karena realisasi penerimaan telah melampaui target triwulanan maupun target tahunan. Meskipun demikian, kenaikan dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 masih relatif kecil. Oleh karena itu, PPS Cilacap perlu mempertahankan kinerja layanan yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan sekaligus mengevaluasi sumber PNBP yang mengalami penurunan. Optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemantauan penerimaan berdasarkan jenis layanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi penerimaan negara dapat dikelola secara lebih efektif dan akuntabel.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026, indikator Nilai PNBP Non-SDA di PPS Cilacap berhasil melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan mencapai Rp3.996,89 juta atau sebesar 152,59% dari target triwulanan dan 114,45% dari target tahunan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan penerimaan dari beberapa jenis layanan, meskipun secara keseluruhan kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya relatif kecil, yaitu sebesar 0,01%.

Faktor Keberhasilan

1. Peningkatan penerimaan jasa tambat dan labuh, yang tetap menjadi sumber penerimaan terbesar dengan realisasi Rp2.608,70 juta, meningkat sebesar Rp51,18 juta dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peningkatan penerimaan dari penggunaan sarana dan prasarana, yang naik sebesar Rp127,79 juta, terutama dari pemanfaatan tanah, bangunan, dan fasilitas pelabuhan lainnya.
3. Peningkatan penerimaan dari beberapa layanan pendukung, meliputi penggunaan transportasi, pas masuk berlangganan, dan jasa kebersihan kolam, serta adanya penerimaan dari penggunaan ruang pertemuan sebesar Rp21,50 juta.
4. Realisasi penerimaan yang melampaui target, baik target Triwulan III maupun target tahunan, sehingga menunjukkan hasil positif dalam pengelolaan PNBP Non-SDA PPS Cilacap.

Faktor yang Berpotensi Menghambat (Risiko Kegagalan)

1. Penurunan penerimaan pada beberapa jenis layanan, terutama pas masuk harian, jasa kebersihan kawasan, dan jasa listrik, serta tidak tercatatnya penerimaan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan serta jasa *cold room* dan *freezer* pada Triwulan III Tahun 2026.
2. Ketergantungan pada jasa tambat dan labuh sebagai sumber penerimaan terbesar, sehingga perubahan aktivitas kunjungan kapal dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan berpotensi memengaruhi total penerimaan.
3. Fluktuasi aktivitas operasional pelabuhan, termasuk kondisi cuaca, musim penangkapan ikan, dan perubahan kebutuhan pengguna jasa, yang dapat memengaruhi pemanfaatan layanan kepelabuhanan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan seluruh fasilitas dan sumber penerimaan, sehingga diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi PNBP yang masih dapat dikembangkan.

Sebagai tindak lanjut, PPS Cilacap perlu mempertahankan kinerja layanan yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan fasilitas pelabuhan, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi realisasi PNBP berdasarkan jenis layanan. Koordinasi antara unit pelayanan dan pengelola penerimaan juga perlu diperkuat agar setiap potensi penerimaan dapat dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga capaian PNBP yang telah melampaui target sekaligus meningkatkan keberlanjutan penerimaan negara pada periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.053)				
OP	B. Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan/Penerapan PNBP Pasca Produksi	27.760.000	6.720.500	24,21
	TOTAL	**27.760.000**	**6.720.500**	**24,21**

Tabel 9 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 1

SASARAN KEGIATAN 2

Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat

Sasaran kegiatan Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Volume produksi perikanan tangkap merupakan salah satu indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur jumlah hasil produksi perikanan tangkap, baik yang berasal dari laut maupun perairan umum, yang didaratkan dan tercatat di PPS Cilacap. Capaian indikator ini menggambarkan perkembangan aktivitas penangkapan ikan serta volume hasil tangkapan yang didaratkan melalui pelabuhan.

Berdasarkan data pada Tabel 10, target tahunan volume produksi perikanan tangkap PPS Cilacap Tahun 2026 ditetapkan sebesar 30.000 ton. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, volume produksi yang tercatat mencapai 34.192,75 ton atau sebesar 113,98% dari target tahunan. Sementara itu, terhadap target Triwulan III sebesar 21.000 ton, realisasi tersebut mencapai 162,82%, sehingga melampaui target triwulanan sebesar 13.192,75 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Cilacap telah melampaui target tahunan maupun target triwulanan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
30.000	34.192,75	113,98	21.000	34.192,75	162,82	26.063,95	31,19

Tabel 10 Capaian IKU 2 Triwulan III Tahun 2026

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume produksi perikanan tangkap meningkat dari 26.063,95 ton pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi 34.192,75 ton pada Triwulan III Tahun 2026. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 8.128,80 ton atau 31,19%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan, meningkatnya jumlah perjalanan penangkapan ikan (*trip*), serta kondisi musim penangkapan ikan. Selain itu, musim penangkapan ubur-ubur yang berlangsung pada Agustus hingga September 2026 turut meningkatkan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan.

Produksi perikanan tangkap pada Triwulan III Tahun 2026 didominasi oleh beberapa jenis ikan, antara lain cumi karet, ubur-ubur, cakalang, madidihang, tuna mata besar, albakora, layang benggol, lemadang, dan ikan pedang. Keragaman jenis hasil tangkapan tersebut menunjukkan aktivitas pendaratan berbagai komoditas perikanan di PPS Cilacap.

Secara keseluruhan, capaian IKU 2 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Realisasi produksi telah melampaui target tahunan dan target triwulanan, serta meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mempertahankan capaian tersebut, diperlukan kesinambungan pendataan produksi, pemantauan aktivitas pendaratan ikan, serta koordinasi dengan pihak terkait agar data produksi tercatat secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelabuhan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan realisasi Triwulan III Tahun 2026, IKU 2 berhasil melampaui target dengan capaian 162,82% dari target triwulanan dan 113,98% dari target tahunan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas penangkapan ikan dan kondisi musim penangkapan yang mendorong kenaikan volume produksi.

Faktor Keberhasilan

1. Peningkatan aktivitas penangkapan ikan, ditandai dengan bertambahnya jumlah kapal yang beroperasi dan jumlah perjalanan penangkapan ikan (*trip*).
2. Musim penangkapan ubur-ubur pada Agustus–September 2026, yang meningkatkan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Peningkatan volume produksi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 31,19% atau bertambah 8.128,80 ton dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025.

Faktor yang Berpotensi Menghambat (Risiko Kegagalan)

1. Perubahan musim dan kondisi penangkapan ikan, yang dapat memengaruhi jumlah hasil tangkapan dan volume produksi yang didaratkan.
2. Fluktuasi jumlah kapal dan perjalanan penangkapan ikan, yang berpotensi menyebabkan perubahan volume produksi antarkurun waktu.
3. Perlunya menjaga ketepatan pendataan produksi, agar seluruh hasil tangkapan yang didaratkan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, PPS Cilacap perlu melanjutkan pemantauan volume produksi, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pendataan hasil tangkapan, serta mengevaluasi perkembangan aktivitas penangkapan ikan secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi data dan mendukung pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap pada periode berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.053)				
OP	A. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik Bagi Awak Kapal	7.120.000	1.850.000	25,98
Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.051)				
KS	E. Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	29.058.000	7.850.000	27,01
Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)				
DK	J. Penyiapan Tenaga Pendataan dalam Menunjang Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi	14.690.000	14.690.000	100
	TOTAL	**50.868.000**	**24.390.000**	**47,94**

Tabel 11 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN 3

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang Optimal dan Bertanggung jawab

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

1. administrasi dan sistem informasi;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;
3. pelayanan umum; dan
4. investasi dan industri.

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
84	92	109,52	84	94	109,52	96,5	-4,66

Tabel 12 Capaian IKU 4 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan (EVKIN) yang tercantum dalam tabel 12, target IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2026 ditetapkan nilai 84, sedangkan realisasi mencapai nilai 92 atau sebesar 109,52% dari target. Capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa penyelenggaraan operasional PPS Cilacap telah memenuhi bahkan melampaui standar kinerja yang ditetapkan untuk periode pelaporan.

Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa aspek, antara lain peningkatan pendapatan pelabuhan dari PNBP Non-SDA, frekuensi kunjungan kapal, volume produksi perikanan tangkap, pelayanan tambat dan labuh, frekuensi pengiriman data melalui aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), serta tata kelola lingkungan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja operasional pelabuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan, pengelolaan informasi, dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

Namun, apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025, nilai kinerja operasional pelabuhan mengalami penurunan dari nilai 96,50 menjadi nilai 92, atau turun sebesar 4,66%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan dan pengembangan aplikasi PIPP serta perubahan jumlah komponen penilaian, dari 18 komponen pada tahun 2025 menjadi 27 komponen pada tahun 2026. Selain itu, penurunan tingkat pelayanan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal perikanan dan berkurangnya jumlah unggahan pada media sosial PPS Cilacap melalui aplikasi PIPP turut memengaruhi hasil penilaian.

Dengan demikian, capaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang baik karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran BBM, konsistensi penyampaian informasi melalui PIPP, serta pemenuhan seluruh komponen penilaian kinerja operasional pelabuhan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2026, IKU 4 mencapai nilai 92 atau sebesar 109,52% dari target nilai 84. Meskipun berhasil melampaui target, capaian tersebut menurun sebesar 4,66% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan komponen penilaian serta penurunan pada beberapa aspek pelayanan dan penyampaian informasi pelabuhan.

Faktor Keberhasilan

1. Peningkatan pendapatan pelabuhan dan aktivitas operasional, termasuk kunjungan kapal, volume produksi perikanan tangkap, serta pelayanan tambat dan labuh.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja berdasarkan 27 komponen penilaian, yang mencakup aspek administrasi dan sistem informasi, fasilitas pelabuhan, pelayanan umum, serta investasi dan industri.
3. Dukungan pengelolaan informasi dan lingkungan pelabuhan, melalui pengiriman data pada aplikasi PIPP dan pelaksanaan tata kelola lingkungan.

Faktor yang Berpotensi Menghambat (Risiko Kegagalan)

1. Perubahan aplikasi PIPP dan komponen penilaian, dari 18 komponen pada tahun 2025 menjadi 27 komponen pada tahun 2026, yang memengaruhi perbandingan hasil evaluasi antartahun.
2. Penurunan pelayanan penyaluran BBM untuk kapal perikanan, yang memengaruhi penilaian terhadap aspek pelayanan pelabuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berkurangnya jumlah unggahan pada media sosial melalui aplikasi PIPP, sehingga diperlukan peningkatan konsistensi penyampaian informasi dan publikasi kegiatan pelabuhan.

Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, PPS Cilacap perlu memperkuat pemantauan terhadap seluruh komponen penilaian EVKIN, meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran BBM, serta mengoptimalkan pengiriman data dan publikasi informasi melalui PIPP. Evaluasi berkala dan koordinasi antarunit kerja juga perlu ditingkatkan agar setiap aspek penilaian dapat dipenuhi secara konsisten. Dengan langkah tersebut, diharapkan nilai kinerja operasional pelabuhan dapat meningkat dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa semakin optimal.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
DK	C. Operasional Pelabuhan Perikanan	266.239.000	69.085.485	25,95
CKD	G. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan Cikidang	29.911.000	1.900.000	6,35
OP	E. Monitoring Kelembagaan dan Pelaksanaan Tenaga Bongkar Muat Hasil Tangkapan di PPS Cilacap	6.835.000	3.330.000	48,72
Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)				
PU	A. Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	14.891.000	9.700.000	65,14
CKD	B. Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan di PP Cikidang Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	39.363.000	8.090.000	20,40
Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)				
DK	A. Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	30.629.000	18.100.000	59,09

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	B. Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	180.354.000	59.800.079	33,16
Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2342.EBA.994.002)				
DK	A. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.323.633.000	1.570.426.089	67,58
	B. Langganan Daya Dan Jasa	1.163.400.000	793.016.992	68,16
TKSP	C. Pemeliharaan Kantor	983.181.000	815.722.677	82,97
DK	D. Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	165.950.000	110.250.000	66,36
	TOTAL	**5.204.386.000**	**3.459.421.322**	**66,47**

Tabel 13 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Pengendalian lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang bertujuan mewujudkan kawasan pelabuhan yang bersih, sehat, aman, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggara pelabuhan perikanan berkewajiban menyelenggarakan operasional pelabuhan dengan memperhatikan ketentuan di bidang perikanan maupun perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengukur kinerja pengendalian lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggunakan aplikasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai program pengendalian lingkungan yang terdiri atas 18 indikator mandatory dan minimal 5 indikator voluntary dengan bobot penilaian sebesar 60%, serta 8 indikator hasil (*outcome*) dengan bobot sebesar 40%. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penetapan nilai Pengendalian Lingkungan pada masing-masing pelabuhan perikanan.

Berdasarkan Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan Nomor B.3781/DJPT.4/PI.310/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 tentang Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan III Tahun Anggaran 2026, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memperoleh nilai Pengendalian Lingkungan sebesar 90,93, melampaui target yang ditetapkan sebesar 33, sehingga tingkat capaian berada dalam kategori Sangat Baik serta menempatkan PPS Cilacap pada peringkat ke-8 dari 22 Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan lingkup DJPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
33	90,93	275,55	33	90,93	275,55	94,66	-3,94

Tabel 14 Capaian IKU 7 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 14, target tahunan IKU 7 Tahun 2026 ditetapkan sebesar 33, sedangkan capaian hingga Triwulan III mencapai nilai 90,93 atau sebesar 275,55% dari target. Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi juga tercatat sebesar 90,93 dari target triwulanan yaitu nilai sebesar 33. Dengan demikian, PPS Cilacap telah melampaui target yang ditetapkan sebesar nilai 275,55%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja dengan hasil yang sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025, nilai pengendalian lingkungan mengalami penurunan dari nilai 94,66 menjadi nilai 90,93, atau turun sebesar 3,94%. Meskipun demikian, capaian Triwulan III Tahun 2026 masih jauh melampaui target yang ditetapkan. Penurunan tersebut perlu dipahami dalam konteks dinamika evaluasi, termasuk perubahan dan semakin ketatnya persyaratan penilaian serta kebutuhan untuk menyediakan bukti dukung yang lengkap dan valid bagi setiap indikator. Dengan demikian, pemenuhan kegiatan pengendalian lingkungan perlu disertai dengan pengelolaan dokumentasi dan bukti pelaksanaan yang memadai agar hasil kegiatan dapat tercermin secara optimal dalam penilaian.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengujian kualitas air. Pada tahun 2026, pengujian yang sebelumnya dilaksanakan dengan frekuensi triwulanan menjadi dilakukan secara semesteran, sehingga ketersediaan hasil pengujian sebagai bukti dukung penilaian menjadi terbatas. Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, PPS Cilacap merencanakan peningkatan frekuensi pengujian kualitas air menjadi setiap bulan selama dua bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemantauan kualitas lingkungan sekaligus menyediakan bukti dukung yang lebih memadai untuk penilaian berikutnya.

Selain itu, PPS Cilacap telah menindaklanjuti aspek pengelolaan sampah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Nomor 600.1.17/745/23 dan Nomor B.2454/PPSC/KS.320/IX/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka Mendukung Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan dan mendukung tersedianya dokumentasi pengelolaan sampah yang lebih tertib.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara keseluruhan, capaian IKU 7 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan di PPS Cilacap telah mencapai target secara signifikan, meskipun nilainya menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu difokuskan pada pemenuhan bukti dukung penilaian, peningkatan frekuensi pengujian kualitas air, penguatan kerja sama pengelolaan sampah, serta pemantauan seluruh indikator SELARASKAN secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan sekaligus memperkuat capaian kinerja pada periode berikutnya.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2026, IKU 7 mencapai nilai 90,93 atau sebesar 275,55% dari target nilai 33. Meskipun capaian tersebut telah melampaui target, nilainya menurun sebesar 3,94% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan pengendalian lingkungan sekaligus peningkatan kelengkapan bukti dukung sesuai dengan dinamika penilaian yang berlaku.

Faktor Keberhasilan

1. Capaian indikator melampaui target, dengan nilai 90,93 atau 275,55% dari target yang ditetapkan.
2. Penguatan kerja sama pengelolaan sampah, melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PPS Cilacap dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
3. Komitmen perbaikan berkelanjutan, melalui rencana peningkatan frekuensi pengujian kualitas air menjadi setiap bulan selama dua bulan ke depan.

Faktor yang Berpotensi Menghambat (Risiko Kegagalan)

1. Dinamika dan semakin ketatnya persyaratan penilaian, yang menuntut bukti dukung setiap indikator tersedia secara lengkap, valid, dan sesuai ketentuan.
2. Terbatasnya frekuensi pengujian kualitas air, karena pengujian pada tahun 2026 dilaksanakan secara semesteran sehingga memengaruhi ketersediaan bukti dukung penilaian.
3. Perlunya penguatan dokumentasi pengelolaan sampah, agar pelaksanaan dan hasil pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan dapat dibuktikan secara lebih lengkap.

Sebagai tindak lanjut, PPS Cilacap akan meningkatkan frekuensi pengujian kualitas air menjadi setiap bulan selama dua bulan ke depan, mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan sampah, serta memperkuat pemantauan dan kelengkapan bukti dukung seluruh indikator pada aplikasi SELARASKAN. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, memperkuat pemenuhan indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penilaian, dan mendorong peningkatan nilai pengendalian lingkungan pada periode berikutnya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
DK	A. Gerakan Bersih Pantai	11.816.000	-	-
	B. Sosialisasi Penerapan Objek Vital Nasional di PPS Cilacap	5.980.000	3.390.000	56,69
TKSP	D. Pelaksanaan Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	85.754.000	13.480.380	15,72
	J. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	17.591.000	5.200.000	29,56
TSKP & KS	I. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO14001:2015	52.000.000	-	-
	TOTAL	**173.141.000**	**22.070.380**	**12,75**

Tabel 15 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 7

SASARAN KEGIATAN 4

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Oleh karena itu, setiap kapal perikanan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

akan beroperasi wajib memenuhi persyaratan kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator kinerja "Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan" di PPS Cilacap diukur berdasarkan jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, dengan formula perhitungan berupa nilai posisi akhir dari total dokumen yang telah diterbitkan dalam periode pelaporan.

Capaian kinerja pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), khususnya pada kapal izin daerah, pada Triwulan III Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kewenangan perizinan, di mana sebagian besar kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut telah melakukan migrasi menjadi kapal dengan izin kewenangan pusat. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi serta kepatuhan pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kelaikan kapal perikanan.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2025, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh PPS Cilacap mengalami peningkatan sebesar 6,08%. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya volume pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh metode perhitungan capaian pada Tahun 2026 yang mencakup akumulasi dokumen yang telah diterbitkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Adapun rincian perbandingan capaian kinerja penerbitan SKKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
1.333	1.361	102,10	1.323	1.361	102,87	1.283	6,08

Tabel 16 Capaian IKU 8 Triwulan III Tahun 2026

Lebih lanjut, optimalisasi capaian kinerja tersebut juga didukung oleh penerapan mekanisme pelayanan berbasis daring melalui aplikasi SICEFI. Sistem ini mempermudah proses pengajuan serta pemantauan permohonan oleh pemilik kapal. Selain itu, Pejabat Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dapat melaksanakan pemeriksaan secara bergantian dan fleksibel, menyesuaikan dengan beban kerja serta jumlah permohonan yang masuk. Dengan demikian, proses penerbitan SKKP dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
KS	H. Monitoring Pelaksanaan Pelayanan SPDN/SPBUN di PPS Cilacap	17.539.000	1.850.000	10,55
	TOTAL	**17.539.000**	**1.850.000**	**10,55**

Tabel 17 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 8

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang optimal. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik dari aspek regulasi, sistem pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya.

Dari aspek regulasi, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kewenangan penerbitan sertifikat kelaikan kapal oleh pemerintah pusat memberikan kejelasan pembagian kewenangan. Migrasi kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil laut menjadi kewenangan pusat turut meningkatkan ketertiban administrasi serta kepatuhan pemilik kapal dalam memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah dokumen yang diproses dan diterbitkan.

Dari aspek sistem pelayanan, penerapan mekanisme berbasis daring melalui aplikasi SICEFI berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Digitalisasi proses pengajuan dan pemantauan permohonan mampu mempercepat waktu pelayanan, meminimalkan potensi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, dari aspek sumber daya manusia, optimalnya kinerja Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dalam melaksanakan pemeriksaan secara bergantian dan fleksibel sesuai dengan beban kerja turut mendukung kelancaran proses penerbitan SKKP. Pengaturan kerja yang adaptif ini memungkinkan seluruh permohonan dapat ditangani secara tepat waktu.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian sebagai potensi kelemahan dalam pengukuran kinerja. Peningkatan capaian sebesar 6,08% dibandingkan periode sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja riil pada tahun berjalan, karena metode perhitungan Tahun 2026 masih mengakumulasi dokumen yang diterbitkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Hal ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi capaian kinerja apabila tidak dilakukan pemisahan data berdasarkan tahun penerbitan.

Selain itu, ketergantungan pada sistem daring juga berpotensi menjadi kendala apabila terjadi gangguan teknis atau keterbatasan akses bagi sebagian pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi risiko melalui peningkatan keandalan sistem serta penyediaan alternatif layanan.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan PPS Cilacap. Indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut dengan indikator yang ditargetkan di Triwulan III Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut;

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh DJPT yang menjadi objek pengawasan.

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
86	100	116,28%	86	100	116,28%	100	0

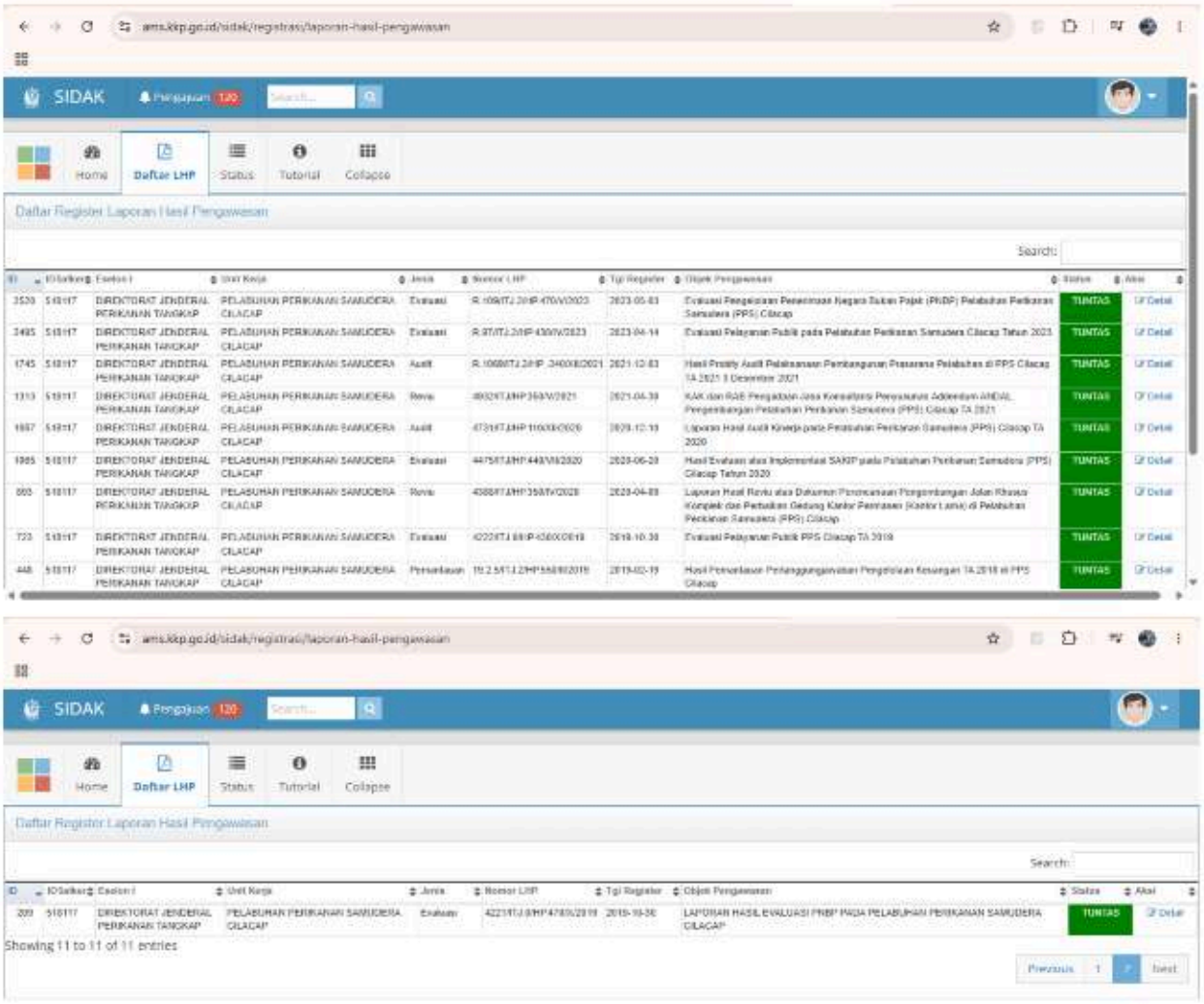
Tabel 18 Capaian IKU 11 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 18, realisasi IKU 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan di PPS Cilacap menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan mencapai angka sempurna sebesar 100% pada Triwulan III tahun 2026. Capaian ini melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 86%, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas pemanfaatan rekomendasi mencapai 116,28%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh saran perbaikan dari hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara total oleh manajemen pelabuhan, yang mencerminkan komitmen kuat dalam melakukan perbaikan kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

operasional secara berkelanjutan dan responsif terhadap hasil audit maupun pengawasan internal.

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap tercapai sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 10 *Screen shot* Aplikasi SIDAK

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 yang mencapai 100 persen merupakan hasil dari komitmen kuat manajemen PPS Cilacap dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan menyeluruh. Seluruh hasil rekomendasi pengawasan telah ditindaklanjuti melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK) KKP, yang memungkinkan pemantauan progres tindak lanjut secara sistematis,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

transparan, dan akuntabel. Kondisi ini mencerminkan efektivitas mekanisme pengendalian internal serta koordinasi antar tim kerja yang berjalan baik, sehingga setiap temuan dan potensi perbaikan dapat segera ditangani secara tuntas. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan tata kelola PPS Cilacap bersifat responsif, tidak hanya berorientasi pada pencapaian *output,* tetapi juga pada pemenuhan proses yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tidak ditemukannya faktor kegagalan pada indikator ini mengindikasikan bahwa budaya kepatuhan dan akuntabilitas telah terinternalisasi dengan baik dalam organisasi. Ke depan, konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara berkelanjutan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, serta mendukung penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh di PPS Cilacap.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Gaji dan Tunjangan (2342.EBA.994.001)				
DK	A. Pembayaran gaji dan tunjangan	9.548.221.000	6.945.873.690	72,75
	B. Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK	4.122.320.000	2.965.436.729	71,94
	TOTAL	**13.670.541.000**	**9.911.310.419**	**72,50**

Tabel 19 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui pengumuman RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), masyarakat dan para pemangku kepentingan memperoleh akses terhadap informasi mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pengumuman RUP menjadi bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pengadaan pemerintah.

Indikator Persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam mengumumkan seluruh rencana pengadaan sesuai dengan pagu pengadaan yang dimiliki. Nilai indikator dihitung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berdasarkan perbandingan antara nilai pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP dengan total pagu pengadaan unit kerja mandiri, yaitu pagu anggaran setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja yang tidak termasuk kategori pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengumuman RUP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui SiRUP.

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
77	100	129,87	77	100	129,87	100	0

Tabel 20 Capaian IKU 14 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 20, PPS Cilacap memperoleh capaian sebesar 100% pada Triwulan III Tahun 2026. Capaian tersebut melampaui target tahunan sebesar 77%, dengan realisasi kinerja mencapai 129,87% terhadap target. Hasil ini menunjukkan bahwa PPS Cilacap telah memenuhi kewajiban pengumuman seluruh RUP yang menjadi dasar pengukuran indikator pada periode pelaporan.

Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 tetap terjaga pada tingkat optimal. Berdasarkan data pembanding pada Tabel 20, capaian Triwulan III Tahun 2025 juga tercatat sebesar 100%. Dengan demikian, PPS Cilacap berhasil mempertahankan capaian yang sama dibandingkan dengan periode pembanding, tanpa mengalami penurunan persentase pengumuman RUP. Kondisi ini mencerminkan konsistensi satuan kerja dalam melaksanakan pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hasil tersebut sejalan dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1059/SJ.7/PL.410/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Diumumkan pada SiRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan lampiran nota dinas tersebut, PPS Cilacap tercatat memiliki nilai belanja pengadaan sebesar Rp106.421.616.000 dan total RUP yang diumumkan sebesar Rp106.421.616.000 sehingga persentase pengisian RUP mencapai 100%. Data tersebut menegaskan bahwa seluruh nilai belanja pengadaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang menjadi dasar perhitungan telah tercakup dalam RUP yang diumumkan pada aplikasi SiRUP.

Secara keseluruhan, capaian IKU 14 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa PPS Cilacap telah melaksanakan pengumuman RUP secara optimal. Capaian sebesar 100% tidak hanya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara nilai belanja pengadaan dan nilai RUP yang diumumkan. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pengelolaan data pengadaan yang tertib, koordinasi yang berkelanjutan antara unit perencanaan dan pengelola pengadaan, serta pemutakhiran data secara tepat waktu apabila terdapat perubahan anggaran selama tahun berjalan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

PPS Cilacap berhasil mencapai realisasi IKU 14 sebesar 100% pada Triwulan III Tahun 2026, atau sebesar 129,87% dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP telah memenuhi target kinerja dan seluruh nilai belanja pengadaan yang menjadi dasar pengukuran telah diumumkan. Selain itu, kesamaan capaian sebesar 100% pada Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa PPS Cilacap mampu mempertahankan konsistensi kinerja dalam memenuhi kewajiban pengumuman RUP.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. PPS Cilacap telah mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP dengan nilai yang sama dengan total belanja pengadaan yang menjadi dasar pengukuran, yaitu sebesar Rp106.421.616.000.
2. Kesesuaian antara nilai belanja pengadaan dan total RUP yang diumumkan menunjukkan bahwa data pengadaan yang menjadi dasar perhitungan indikator telah tercakup secara keseluruhan dalam pengumuman SiRUP pada periode pelaporan.
3. Capaian indikator yang optimal perlu didukung oleh koordinasi antara pengelola perencanaan, pengelola anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pengelola SiRUP untuk memastikan kesesuaian data perencanaan pengadaan dengan ketersediaan anggaran.
4. Pengelolaan data RUP yang tertib dan pemantauan secara berkala menjadi aspek penting untuk mempertahankan kesesuaian data, terutama apabila terjadi perubahan pagu anggaran atau penyesuaian rencana pengadaan selama tahun anggaran berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, tidak terdapat indikasi kegagalan pencapaian target IKU 14 pada Triwulan III Tahun 2026. Meskipun demikian, capaian sebesar 100% tetap memerlukan upaya pemeliharaan kinerja agar kesesuaian data RUP dengan nilai belanja pengadaan dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun anggaran. PPS Cilacap perlu terus memperkuat koordinasi, melakukan pemeriksaan berkala terhadap data yang diumumkan, serta segera menindaklanjuti setiap perubahan anggaran yang berdampak pada perencanaan pengadaan.

Sebagai langkah tindak lanjut, PPS Cilacap akan mempertahankan pengelolaan RUP yang tertib dan akuntabel melalui pemantauan berkala terhadap kesesuaian data pada aplikasi SiRUP, penguatan koordinasi antarunit terkait, serta percepatan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga capaian indikator tetap optimal, meningkatkan ketepatan informasi perencanaan pengadaan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan PPS Cilacap.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)				
DK	A. Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi	7.500.000	7.437.000	99,16
Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)				
DK	A. Pengadaan sarana penunjang perkantoran	30.000.000	-	-
Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)				
TKP	C. Rehabilitasi Prasarana Perkantoran	100.000.000		
	TOTAL	**137.500.000**	**7.437.000**	**5,41**

Tabel 21 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelaksanaan SKM bertujuan memperoleh gambaran mengenai persepsi pengguna layanan sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hasil survei menjadi salah satu dasar evaluasi dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penyusunan langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan yang mencakup persyaratan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk layanan, kecepatan respons, kemampuan petugas, layanan konsultasi, serta sarana dan prasarana.

Tahunan 2026			Tw III Tahun 2026			Perbandingan dg Tw III Tahun 2025	
Target	Capaian Tw III	%	Target	Capaian	%	Capaian	%
88,8	95,06	107,05	88,8	95,06	107,05	92,91	2,31

Tabel 22 Capaian IKU 18 Triwulan III Tahun 2026

Berdasarkan data pada Tabel 22, PPS Cilacap memperoleh nilai SKM sebesar 95,06 pada Triwulan III Tahun 2026, dengan target sebesar 88,80. Dengan demikian, capaian indikator mencapai 107,05% dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori mutu pelayanan A atau Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 yang mencapai nilai 92,91, nilai SKM Triwulan III Tahun 2026 meningkat sebesar 2,15 nilai atau sekitar 2,31%. Peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan PPS Cilacap kepada masyarakat dan pengguna jasa.

Berdasarkan Laporan SKM Triwulan III Tahun 2026, nilai tersebut diperoleh dari hasil survei terhadap 126 responden yang menggunakan 12 jenis layanan. Seluruh sembilan unsur pelayanan memperoleh nilai dalam kategori Sangat Baik. Unsur kemudahan prosedur memperoleh nilai tertinggi, yaitu 95,63, sedangkan unsur waktu penyelesaian dan layanan konsultasi memperoleh nilai terendah, masing-masing sebesar 94,64. Hasil penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11. Meskipun seluruh unsur telah berada dalam kategori Sangat Baik, ketepatan waktu penyelesaian layanan dan kemudahan akses konsultasi tetap perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di PPS Cilacap secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	Nilai unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	95.24	95.63	94.64	95.04	94.84	95.04	95.24	94.64	95.24
Mutu Pelayanan	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Pelayanan Publik	95.06								

Keterangan:

U1 Persyaratan Layanan
U2 Kemudahan Prosedur
U3 Waktu Penyelesaian
U4 Kesesuaian Biaya
U5 Kesesuaian Produk
U6 Kecepatan Respon
U7 Kemampuan petugas
U8 Layanan konsultasi
U9 Sarpras

Gambar 11 Detail Nilai SKM Per Unsur Layanan

Capaian tersebut juga perlu dilihat dalam konteks validasi hasil SKM oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2680/DJPT.1/OT.710/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026, hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan data yang divalidasi pada 23 September 2026. Nota dinas tersebut juga menjelaskan bahwa penguncian data dilakukan lebih awal untuk mendukung penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. Oleh karena itu, pelaksanaan survei, kelengkapan data responden, dan ketepatan waktu pengisian menjadi aspek penting dalam memastikan hasil SKM dapat diperhitungkan dalam evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, capaian IKU 18 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif. Nilai SKM sebesar 95,06 telah melampaui target dan meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, PPS Cilacap tetap perlu menindaklanjuti masukan pengguna layanan, khususnya yang berkaitan dengan waktu penyelesaian, kesesuaian produk layanan, dan layanan konsultasi. Upaya perbaikan tersebut diperlukan agar kualitas pelayanan yang telah berada dalam kategori Sangat Baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan hasil SKM Triwulan III Tahun 2026, PPS Cilacap memperoleh nilai 95,06 atau sebesar 107,05% dari target 88,80. Capaian tersebut meningkat sebesar 2,31% dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 dan menunjukkan bahwa kualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelayanan publik telah memenuhi harapan pengguna layanan dengan kategori Sangat Baik.

Faktor Keberhasilan

1. Penerapan standar pelayanan secara konsisten, sehingga seluruh sembilan unsur pelayanan memperoleh kategori Sangat Baik.
2. Kemudahan prosedur pelayanan, yang memperoleh nilai tertinggi sebesar 95,63 dan menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dinilai mudah diikuti oleh pengguna layanan.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SKM, melalui pemeriksaan ulang (*double check*) terhadap produk layanan dan pemantauan waktu penyelesaian menggunakan kartu kendali.
4. Komitmen petugas dalam memberikan pelayanan, yang tercermin dari penilaian positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan PPS Cilacap.

Faktor yang Perlu Ditingkatkan

1. Waktu penyelesaian dan layanan konsultasi, yang memperoleh nilai relatif terendah, masing-masing sebesar 94,64, sehingga perlu menjadi prioritas perbaikan.
2. Kesesuaian produk layanan, dengan nilai 94,84, yang perlu dipertahankan melalui pemeriksaan ulang sebelum produk layanan diserahkan kepada pengguna.
3. Ketepatan waktu dan kelengkapan data SKM, mengingat hasil survei harus melalui proses validasi dan penguncian data sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DJPT.

Sebagai tindak lanjut, PPS Cilacap akan memperkuat pemantauan waktu penyelesaian layanan melalui kartu kendali, meningkatkan pemeriksaan ulang produk layanan, serta mengoptimalkan layanan konsultasi melalui petugas dan media komunikasi yang tersedia. Selain itu, PPS Cilacap akan menindaklanjuti masukan pengguna layanan, termasuk terkait penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dan kendala aplikasi *E-Logbook* penangkapan ikan. Melalui upaya tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan capaian SKM tetap terjaga pada kategori Sangat Baik.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran sd TW III	Capaian Realisasi (%)
Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)				
DK	L. Forum Konsultasi Publik	4.784.000	-	-
	TOTAL	**4.784.000**	**-**	**-**

Tabel 23 Kegiatan yang menunjang capaian IKU 18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, PPS Cilacap memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp119.376.963.000 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPS Cilacap Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.03.2.518117/2026 tanggal 1 Desember 2025 , pada bulan September 2026 PPS Cilacap mendapatkan penambahan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp.1.692.548.000 sehingga Pagu PPS Cilacap menjadi Rp.121.069.511.000. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja negara, PPS Cilacap dikenakan blokir anggaran sebesar Rp2.287.888.000, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp118.781.623.000.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan dua program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 13.938.779.210, atau sebesar 11.51% dari total pagu anggaran dan 11.73% dari pagu anggaran efektif. Realisasi anggaran yang masih relatif rendah pada Triwulan III terutama dipengaruhi oleh belum terealisasinya anggaran *Civil Works* (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil) yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Agence Française de Développement* (AFD) dengan nilai sebesar Rp99.056.329.000. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang dikelola oleh unit Pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di PPS Cilacap.

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, proses pengadaan paket pekerjaan konstruksi masih berada pada tahap penyiapan pengumuman verifikasi tender. Pelaksanaan tender dilakukan untuk pengadaan jasa konsultan *Design and Build*, dengan target penandatanganan kontrak pada periode Januari–Februari 2027. Oleh karena itu, anggaran *Civil Works* yang bersumber dari PHLN AFD tersebut belum dapat direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2026, sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap capaian realisasi anggaran secara keseluruhan.

Di luar komponen anggaran *Civil Works* yang masih dalam proses pengadaan tersebut, pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan PPS Cilacap tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. PPS Cilacap terus melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan penyerapan anggaran, serta koordinasi intensif dengan unit pusat untuk memastikan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berjalan sesuai jadwal sehingga target realisasi anggaran pada periode berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Kinerjaku Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPS Cilacap memperoleh nilai kinerja sebesar 114,20%, sehingga berada pada kategori "Istimewa". Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III berjalan secara efektif serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Secara umum, sebagian besar indikator kinerja utama yang diukur pada Triwulan III berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut terlihat pada indikator penerimaan PNBP, volume produksi perikanan tangkap, tingkat kinerja pelabuhan, pengendalian lingkungan, pelayanan kapal perikanan, pemanfaatan hasil pengawasan, profesionalitas ASN, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar tim kerja, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan telah berjalan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak Rp. 3.996,89 Juta atau 152,59% dari target Triwulan III yaitu Rp. 2.619,303 Juta;
2. IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebanyak 34.192,75 Ton atau 162,82% dari target Triwulan III yaitu 21.000 Ton;
3. IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai dengan Nilai 92 atau sebesar 162,82% dari target Triwulan III yaitu Nilai 84;
4. IKU 7 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai Nilai 90,93 atau sebesar 275,55% dari target Triwulan III yaitu Nilai 33;
5. IKU 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan tercapai sebanyak 1.361 Kapal atau 102,87% dari target Triwulan III yaitu 1.323 Kapal;
6. IKU 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100 Persen atau 116,28% dari target Triwulan III yaitu 86 Persen;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. IKU 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 100 Persen atau 129,87% dari target Triwulan III yaitu 77 Persen;
8. IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Nilai 95,06 atau 107,05% dari target Triwulan III yaitu Nilai 88,8.

Dengan capaian yang diperoleh pada Triwulan III, PPS Cilacap optimis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026, diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan III. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian PPS Cilacap adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja melalui pemantauan secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi terhadap indikator yang belum optimal agar target tahunan dapat tercapai sesuai dengan rencana.
2. Memperkuat koordinasi antar tim kerja dalam pelaksanaan program, pengumpulan dan validasi data dukung, serta penyampaian laporan kinerja untuk memastikan konsistensi, ketepatan waktu, dan akurasi data capaian setiap indikator.
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan penerimaan negara melalui percepatan realisasi kegiatan, peningkatan kualitas administrasi keuangan, pemantauan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), serta optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan kepelabuhanan untuk mempertahankan capaian PNBP Non-SDA.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan secara konsisten, pengawasan waktu penyelesaian layanan, pemeriksaan ulang produk layanan, serta tindak lanjut terhadap masukan dan pengaduan pengguna jasa guna mempertahankan nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam kategori Sangat Baik.
5. Memperkuat pengendalian lingkungan pelabuhan melalui peningkatan frekuensi pengujian kualitas air sesuai rencana tindak lanjut, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, serta pemenuhan dan pendokumentasian bukti dukung seluruh indikator pada aplikasi SELARASKAN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Mengoptimalkan pemantauan aktivitas operasional dan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan ketepatan pendataan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas pendaratan ikan, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan pencatatan produksi.

Tindak Lanjut atas Saran Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sebagai upaya menjaga kesinambungan peningkatan kinerja, PPS Cilacap telah melakukan evaluasi terhadap saran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Tindak lanjut tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring kegiatan, penguatan koordinasi antar tim kerja, optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian risiko pencapaian indikator, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tindak lanjut atas saran Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Pemantauan capaian indikator kinerja dilanjutkan secara berkala melalui evaluasi realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang telah melampaui target maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan sebagai dasar penyusunan langkah percepatan pada Triwulan IV.
2. Penguatan koordinasi antar tim kerja dan pengelolaan data dukung.
   Koordinasi dalam penyampaian data capaian dan dokumen pendukung terus menjadi perhatian untuk menjaga konsistensi pelaporan kinerja. Upaya ini diperlukan agar data yang digunakan dalam pengukuran indikator sesuai dengan dokumen sumber dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
   Pemantauan realisasi anggaran serta kualitas administrasi pelaksanaan kegiatan perlu terus dilaksanakan, termasuk pengendalian terhadap indikator IKPA. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran.
4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
   Hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan nilai sebesar 95,06, meningkat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 92,91. Capaian tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kualitas pelayanan melalui pemeriksaan ulang produk layanan, pemantauan waktu penyelesaian, peningkatan responsivitas petugas, serta tindak lanjut terhadap masukan pengguna jasa.
5. Penguatan pengendalian lingkungan pelabuhan.
   PPS Cilacap telah menindaklanjuti pengelolaan sampah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan Sampah dalam rangka Mendukung Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan. Selain itu, peningkatan frekuensi pengujian kualitas air menjadi setiap bulan selama dua bulan ke depan direncanakan sebagai langkah untuk memperkuat pemantauan kualitas lingkungan dan pemenuhan bukti dukung penilaian SELARASKAN.

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko.
   Evaluasi terhadap capaian IKU dilanjutkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi, perubahan kondisi operasional, serta kelengkapan bukti dukung. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menetapkan langkah perbaikan terhadap indikator yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
   Penguatan kapasitas pegawai melalui pembinaan, pendampingan, dan berbagi pengetahuan perlu dilanjutkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, dan efektivitas pelayanan pada masing-masing tim kerja.

Secara umum, saran dalam Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 tetap relevan sebagai dasar perbaikan kinerja pada Triwulan III dan Triwulan IV. Beberapa tindak lanjut telah menunjukkan hasil, antara lain tercapainya target pada sejumlah indikator kinerja dan peningkatan nilai SKM, serta telah ditandatanganinya kerja sama pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Sementara itu, tindak lanjut yang berkaitan dengan pengujian kualitas air, kelengkapan bukti dukung lingkungan, serta penguatan monitoring dan evaluasi perlu terus dilaksanakan dan dipantau hingga akhir tahun anggaran.

Penutup

Laporan Kinerja PPS Cilacap Triwulan III Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta implementasi SAKIP. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Triwulan III Tahun 2026. Selain itu, laporan ini menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PPS Cilacap telah mencapai hasil yang positif, dengan seluruh indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut merupakan wujud komitmen seluruh pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian dan perbaikan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

khususnya dalam menjaga konsistensi capaian kinerja, meningkatkan kelengkapan bukti dukung, serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan kualitas pelayanan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, PPS Cilacap akan terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan koordinasi antar tim kerja, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, tindak lanjut terhadap hasil evaluasi setiap indikator akan terus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu.

Melalui komitmen dan sinergi seluruh unsur organisasi, PPS Cilacap diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah diperoleh sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Triwulan IV Tahun 2026. Dengan demikian, seluruh sasaran strategis dan target kinerja Tahun 2026 diharapkan dapat tercapai secara optimal guna mendukung terwujudnya pengelolaan pelabuhan perikanan yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perikanan tangkap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN DAN DATA DUKUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN *www.kkp.go.id*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mahrus**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Juni 2026

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Pihak Pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lotharia Latif	**Mahrus**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	3.492,404
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	30.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	33
		7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.333
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	84,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	77
		15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	82
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	102.625.306.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	16.751.657.000
TOTAL		**119.376.963.000**

Jakarta, 29 Juni 2026

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap

Mahrus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MANUAL INDIKATOR KINERJA 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Manual IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026 dapat tersusun. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur Indikator Kinerja Utama PPS Cilacap, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat dipantau pencapaiannya.

Cilacap, 29 Juni 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap



Mahrus,S.St.Pi.,M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Daftar Isi

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan
9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
15. Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap
Definisi	:	• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	:	Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Juta Rupiah
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Tim Kerja Pelayanan Usaha PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3.492,404 Juta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Cilacap meningkat
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$

Keterangan:
$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut
$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I
Nilai TW II = capaian TW I + TW II
Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III
Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan	:	Ton
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Tim Kerja Pelayanan Usaha PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	30.000 Ton

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap
Definisi	:	• Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. • Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisas atau evaluasi permohonan pengusahaan.
Formula Perhitungan	:	Indikator I : $\frac{Hasil\ Analisis\ Kesesuaian\ Permohonan\ Pengusahaan\ terhadap\ usulan\ pengusahaan\ baru/perpanjangan\ yang\ dianalisa\ dan/atau\ dievaluasi}{Total\ jumlah\ usulan\ pengusahaan\ yang\ masuk\ di\ (nama\ satker)}\ x\ 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Hasil Analisis Kesusaian Permohonan Pengusahaan, Tim Kerja Pelayanan Usaha PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Tingkat Kinerja PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Tingkat Kinerja PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.
Formula Perhitungan	:	$NK = \frac{\text{Bobot(A) x Skala (S)}}{4}$

Keterangan :
1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:
Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	Tim Kerja Operasional Pelabuhan PPS Cilacap	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	84

*Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya
Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87
Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	:	1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x1) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 ..... (x2) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 - [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3) Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Kesyahbandaraan PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPS Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap
Definisi	:	• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. • SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.
Formula Perhitungan	:	Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%) Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) **Kategori** Kurang : 0-30 Baik : >61 - 80 Cukup : >30-60 Sangat Baik : >81 – 100 **Keterangan:** Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Keterangan:
Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)
Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	Dit.KAPI	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	:	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker) Keterangan: Nilai TW I = capaian 2024 + 2025 + TW I; Nilai TW II = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2024 + 2025 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Kapal
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Kesyahbandaran PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	1.333 Kapal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Cilacap
Nama IKU	:	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
Definisi	:	• Merupakan indikator yang menunjukan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. • Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. • Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut: Nilai ≤ 0,25 kategori “Kurang”; Nilai > 0,25 s.d. < 0,50 kategori “Cukup”; Nilai > 0,50 s.d. < 0,75 kategori “Baik”; Nilai > 0,75 s.d. 1,00 kategori “Sangat Baik”;
Formula Perhitungan	:	Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$

(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$

(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$

(4) Kepatuhan ≥100 GT = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT}}$

(5) Kepatuhan ≥100 GT Laut Lepas = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT Laut Lepas}}$

(6) Kepatuhan ≥300 GT = $\frac{(e \times 0{,}25) + (f \times 0{,}50) + (g \times 0{,}75) + (h \times 1{,}00)}{\text{Jumlah SPB ≥300 GT}}$

Total Nilai = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

(sesuai range ikan/ada/tidak)

Keterangan :
(a) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
(b) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
(c) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
(d) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
(e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
(f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
(g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
(h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Timja Kesyahbandaran PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Rata-rata
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	0,28 (Kategori Cukup)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Nilai PM Pembangunan ZI PPS Cilacap (yang telah dinilai WBK)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan PPS Cilacap
Definisi	:	Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	:	Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	75,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Cilacap
Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	:	$\boldsymbol{RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N}\ x\ 100\%}$ Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan ΣNt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12.Nilai PM SAKIP PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai PM SAKIP PPS Cilacap
Definisi	:	Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	88,2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13.Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Indeks Profesionalitas ASN di PPS Cilacap
Definisi	:	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	:	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Biro SDMAO
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	84,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPS Cilacap
Definisi	:	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15.Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Persentase Pengelolaan BMN di PPS Cilacap
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Cilacap
Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	:	Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	92,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPS Cilacap
Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
Formula Perhitungan	:	NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	71,75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPS Cilacap
Nama IKU	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPS Cilacap
Definisi	:	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Sub Bagian Umum PPS Cilacap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	88,8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Terima Kasih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

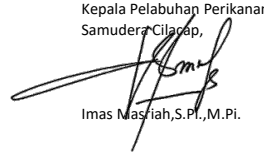
INFORMASI CASCADING PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TAHUN 2026

Sasaran Strategis (Lv 0)	Indikator Kinerja (Lv 0)	Target	Sasaran Program (Lv I)	Indikator Kinerja (Lv I)	Target	Sasaran Kegiatan	IKU	Jenis Indikator Kinerja	Target	Periode Perhitungan	Metode Cascading	PJ
Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	25,84	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,47	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (juta)	IKU	3.492,404	Triwulanan	Buat Baru	Tim Kerja Pelayanan Usaha
						Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	IKU	30.000	Triwulanan	Komponen Pembentuk	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
						Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	IKU	100	Tahunan	Buat Baru	Tim Kerja Pelayanan Usaha
							Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKU	84	Triwulanan	Buat Baru	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
							Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	IKU	85	Tahunan	Buat Baru	Tim Kerja Kesyahbandaran
							Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	IKU	33	Tahunan	Buat Baru	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
							Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKU	33	Triwulanan	Buat Baru	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
						Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	IKU	1.333	Triwulan	Buat Baru	Tim Kerja Kesyahbandaran
							Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	IKU	0,28	Semester	Buat Baru	Tim Kerja Kesyahbandaran
Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86,5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	IKM	75,5	Tahunan	Buat Baru	Sub Bagian Umum
							Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	IKM	86	Triwulan	Dipersempit	Sub Bagian Umum
							Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKM	88,2	Tahunan	Dipersempit	Sub Bagian Umum
							Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks)	IKM	84,5	Semester	Dipersempit	Sub Bagian Umum
							Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	IKM	77	Triwulanan	Komponen Pembentuk	Sub Bagian Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

							Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	IKM	82	Tahunan	Dipersempit	Sub Bagian Umum
							Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKM	92,1	Semester	Dipersempit	Sub Bagian Umum
							Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKM	71,75	Tahunan	Komponen Pembentuk	Sub Bagian Umum
							Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	IKM	88,8	Triwulanan	Dipersempit	Sub Bagian Umum

Cilacap,15 Januari 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,



Imas Masriah,S.Pi.,M.Pi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MATRIKS RINCIAN TARGET IKU
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	TARGET 2026						
					TW I	TW II	SD TW II	TW III	SD TW III	TW IV	SD TW IV
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Juta	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	873,101	873,101	1746,202	873,101	2619,303	873,101	3492,404
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Ton	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	5.000	6.000	11.000	10.000	21.000	9.000	30.000
3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						100	100
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Rata-rata	84	84	84	84	84	84	84
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						85	85
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						33	33
7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Rata-rata	33	33	33	33	33	33	33
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	1.314	5	1.319	4	1.323	10	1.333
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Semester	Rata-rata		0.28	0.28			0,28	0,28
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						75,5	75,5
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	86	86	86	86	86	86	86
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						88,2	88,2
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Indeks	Semester	Nilai Posisi Akhir		77	77			84,5	84,5
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	77	77	77	77	77	77	77
15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						82	82
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Semester	Nilai Posisi Akhir		75	75			92,1	92,1
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Tahunan	Nilai Posisi Akhir						71,75	71,75
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Triwulanan	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8

Cilacap, 29 Juni 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,



Mahrus, S.St.Pi.,M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2026

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2026	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET							REALISASI						TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jan	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Juta)	Timja PU	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.053)			2	Lembaga																
			OP	B Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan/Penerapan PNBP Pasca Produksi	27.760.000	1.850.000				v						v						sudah di realisasikan di bulan juli	kegiatan telah selesai dilaksanakan di tanggal 23 Juni 2026, terkendala proses realisasi dikarenakan ada proses perubahan KPA pada sistem yang belum berhasil	
Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton)	Timja OP	Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.053)		-	2	Lembaga																
				A Bimbingan Teknis/Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang BaikBagi Awak Kapal	7.120.000	1.850.000				v			v			v						sudah di realisasikan di bulan juli	kegiatan telah selesai dilaksanakan di tanggal 18 Juni 2026, terkendala proses realisasi dikarenakan ada proses perubahan KPA pada sistem yang belum berhasil	
				Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.051)																				
			Kesyahbandaran	E Rapat Evaluasi dalam rangka implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	29.058.000	7.850.000					v			v	v	v						sudah di realisasikan di bulan juli	kegiatan telah dilaksanakan pada 30 april 2026 sehingga SPJ masuk dan realisasi di bulan mei	pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya, agar dapat diproses realisasi pada bulan tersebut serta meningkatkan koordinasi dengan
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)																				
			dukman	J PENYIAPAN TENAGA PENDATAAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PNBP PASCA PRODUKSI	14.690.000	14.689.800																		
	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Timja PU	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)			2	Lembaga																
			PU	C Kepatuhan Usaha dan Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	8.891.000	3.700.000				v						v								
	4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)			2	Lembaga																
			Dukman	C OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN	266.239.000	58.585.945						v			v									
			Cikidang	G Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan CIKIDANG	29.911.000	1.900.000				v			v		v	v						sudah di realisasikan di bulan juli	kegiatan sudah dilaksanakan bulan juni, menunggu proses LPJ bendahara yang terkendala proses peralihan KPA pada sistem	
			OP	E Monitoring Kelembagaan dan Pelaksanaan Tenaga Bongkar Muat Hasil Tangkapan di PPS Cilacap	6.835.000						v			v	v								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2026	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET							REALISASI						TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jan	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)			2	Lembaga																
			PU	A Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan	14.891.000	3.700.000					v				v								pelaksanaan kegiatan di tanggal 19 mei, tetapi baru bisa direalisasikan karena menunggu proses GU di bendahara	
			Cikidang	B Pelayanan Pengusahaan pelabuhan perikanan di PP Cikidang Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	39.663.000	8.090.000				v	v		v	v		v	v							
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.057)			2	Lembaga																
			Dukman	A Pameran/Promosi Pelabuhan Perikanan/Publikasi	30.629.000	18.100.000				v				v	v	v	v							
			Dukman	B DUKUNGAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN	180.354.000	46.738.579				v	v	v	v	v	v	v	v							
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2342.EBA.994.002)			1	Layanan																
			Dukman	A Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.323.583.000	1.344.521.821			v	v	v	v	v	v	v	v	v							
				B Langganan Daya Dan Jasa	1.164.600.000	698.897.646			v	v	v	v	v	v	v	v	v							
			TKSP dan Dukman	C Pemeliharaan Kantor	982.031.000	505.080.425			v	v	v	v	v	v	v	v	v							
			Dukman	D Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	165.950.000	95.900.000				v	v	v	v	v	v	v	v							
	5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	Timja Kesyahbandaran	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.052)			2	Lembaga																
			Kesyahbandaran	A Diseminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	34.860.000	1.850.000							v	v	v								pelaksanaan kegiatan di tanggal 29 april sehingga SPJ masuk dan realisasi di bulan mei	pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya, agar dapat diproses realisasi pada bulan tersebut
				Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.051)			2	Lembaga																
			Kesyahbandaran	A FGD Operasional Syahbandar di PPS Cilacap Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara	42.312.000	7.885.000				v	v				v		v							
				B Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran di Wilayah Binaan	37.483.000	5.309.000				v					v									
			Cikidang	C Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	27.700.000	3.800.000									v	v								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2026	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET							REALISASI						TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jan	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
				D Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai SK.Dirjen di PP CIKIDANG Guna Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi	8.760.000	1.900.000					v					v								
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)			2	Lembaga																
			Dukman	F Koordinasi lintas sektor monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu satu atap	6.295.000					v			v		v								belum siapnya aplikasi yang akan di launching	
	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)		Pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan (2338.RBQ.004.052)			2	Lembaga																
			TKSP	A Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil)	99.056.329.000	-									v									
				AB Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil) (Blokir A)	1.500.000.000										v									
				B Project Implementing Unit di PPS Cilacap (Kesekretariatan Pelaksanaan Proyek di PIU)	807.829.000	244.162.287				v	v	v	v	v	v	v	v							
	7	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)			2	Lembaga																
			Dukman	A Gerakan Bersih Pantai	11.816.000								v		v									
				B Sosialisasi Penerapan Objek Vital Nasional di PPS Cilacap	5.980.000	3.390.000									v									
			TKSP	D Pelaksanan Tata Kelola Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	85.754.000	8.275.000					v	v			v		v							
			TKSP dan Kesyahbandaran	I Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO14001:2015	52.000.000							v												
			TKSP	J Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelabuhan dan Bandar Usaha Sehat (PBUS)	17.591.000	5.200.000					v			v	v	v								
Pengelolaan awak Kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentual (kapal)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)											v									
			Kesyahbandaran	H Monitoring Pelaksanaan Pelayanan SPDN/SPBUN di PPS Cilacap	17.539.000	1.850.000										v							sudah direalisasikan di bulan Juli	pelaksanaan di tanggal 24 juni, sedang proses SPJ menunggu revolving GU	pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya, agar dapat diproses realisasi pada bulan tersebut
	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan																						
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK) (Nilai)																						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2026	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET							REALISASI						TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jan	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimafaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Gaji dan Tunjangan (2342.EBA.994.001)			1	Layanan																
			Dukman	A Pembayaran gaji dan tunjangan	8.280.085.000	6.276.727.510			v	v	v	v	v	v	v	v	v								
				B PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	3.697.908.000	2.674.117.503			v	v	v	v	v	v	v	v	v								
	12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap																						
	13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)			2	Lembaga																
			Dukman	K Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka mendukung implementasi EPIT dan PNBP Pasca Produksi	213.490.000	211.711.000																		
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang di umumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)		-	1	Unit																
			Dukman	A Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi	7.500.000	7.437.000																		
				Pengadaan sarana perkantoran (2342.EBB.951.051)			1	Unit																
			dukman	A Pengadaan sarana penunjang perkantoran	30.000.000						v											dijadwalkan ulang untuk pelaksanaan kegiatannya	adanya perubahan rencana terkait spesifikasi kebutuhannya	
				Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)			2	Unit																
			TKSP	A Rehabilitasi Prasarana Perkantoran	100.000.000	-						v	v											
	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap		Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.054)	-	-	2	Lembaga																
			Cikidang	D Koordinasi Instansi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Proses Sertifikasi Tanah di Cikidang	38.743.000	1.900.000						v			v	v						sudah direalisasikan di bulan Juli	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi menunggu LPJ bendahara, dan proses peralihan KPA, tinggal menunggu realisasi dan dijadwalkan realisasi di bulan juli	
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)																						
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap																						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Unit PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD TW III 2026	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET							REALISASI						TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
									Jan	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
		(nilai)																						
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)		Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.055)																				
				L FORUM KONSULTASI PUBLIK	4.784.000									v										

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,

Mahrus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit:

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Tahun:

2026

Tampilkan

TW1



TW2



TW3



TW4



Jenis	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	114.26	115.4	115.45	114.2	114.37	
Skor Verifikasi	114.26	115.4	115.45	114.2	114.37	

Legend

- 110 - 120 (Istimewa)
- 90 - 110 (Baik)
- 70 - 90 (Cukup)
- 50 - 70 (Kurang)
- 0 - 50 (Sangat Kurang)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
BULAN SEPTEMBER

TAHUN ANGGARAN	2026
KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
NKO	114.20%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target SEPTEMBER	Capaian SEPTEMBER	%	Target s/d SEPTEMBER	Capaian s/d SEPTEMBER	%	Tgl Input
SK.01	**Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**						**120**			**120**		
IKSK.01.01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3.492,40	2.619,30	3.996,89	120	2.619,30	3.996,89	120	13/10/2026 07:22
SK.02	**Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meningkat**						**120**			**120**		
IKSK.02.02	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30.000,00	21.000,00	34.192,75	120	21.000,00	34.192,75	120	13/10/2026 07:22
SK.03	**Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang optimal dan bertanggung jawab**						**114,55**			**113,71**		
IKSK.03.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0		13/10/2026 07:22
IKSK.03.04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	Rata-rata	84	84	92	109,52	168	186,34	110,91	13/10/2026 07:22
IKSK.03.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	0			0	0		13/10/2026 07:22
IKSK.03.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	33	0			0	0		13/10/2026 07:22
IKSK.03.07	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	Rata-rata	33	33	90,93	120	66	178,74	120	13/10/2026 07:22
SK.04	**Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**						**102,87**			**102,87**		
IKSK.04.08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan Data Dukung1	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.333,00	1.323,00	1.361,00	102,87	1.323,00	1.361,00	102,87	13/10/2026 07:22
IKSK.04.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	Maximize	Rata-rata	0,28	0			0,28	0		13/10/2026 07:22
SK.05	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**						**114,44**			**114,44**		
IKSK.05.10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang telah dinilai WBK)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,5	0			0	0		13/10/2026 07:22
IKSK.05.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	100	116,28	86	100	116,28	13/10/2026 07:22
IKSK.05.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,2	0			0	0		13/10/2026 07:22
IKSK.05.13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,5	0			0	0		13/10/2026 07:22
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	IKSK.05.14	Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120	13/10/2026 07:22
	IKSK.05.15	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0			0	0		13/10/2026 07:22
	IKSK.05.16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0			0	0		13/10/2026 07:22
	IKSK.05.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0			0	0		13/10/2026 07:22
	IKSK.05.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,8	88,8	95,06	107,05	88,8	95,06	107,05	13/10/2026 07:22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1595/PPSC/TU.140/X/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 13 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Pelayanan Usaha dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Rp.Juta)
   - Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPS Cilacap adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan target dan capaian Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut :

IKU	TARGET TW III (Rp. Juta)	REALISASI TW III (Rp. Juta)	CAPAIAN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	2.619,30	3.996,89	152,59

Penerimaan PNBP PPS Cilacap terbesar masih berasal dari penerimaan tambat sebesar Rp. 2.608.703.554,- dan penerimaan terbesar kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dan/ atau Bangunan yaitu sebesar Rp. 586.159.853,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perbandingan dengan capaian Triwulan III Tahun 2025:

IKU	REALISASI TW III Tahun 2025 (Rp. Juta)	REALISASI TW III Tahun 2026 (Rp. Juta)	NAIK/TURUN (%)
Nilai PNBP Non SDA di PPS Cilacap (Rp. Juta)	3.996,61	3.996,89	0,01

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP Triwulan III Tahun 2025, penerimaan PNBP di Triwulan III Tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,01 %. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai PNBP dari penerimaan pelayanan jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan, pelayanan jasa penggunaan transportasi, pelayanan jasa tambat, pelayanan jasa pas masuk berlangganan, dan pelayanan jasa kebersihan kolam.

2. Terkait dengan capaian IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Daniel Wahyu Setyawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1595/PPSC/TU.140/X/2026
Tanggal : 13 Oktober 2026

PENERIMAAN PNBP NON SDA S.D. SEPTEMBER 2026

Akun	Uraian	S.d. bulan Agustus 2026	September 2026	Jml Kumulatif
425131	**Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan**	**0**	**0**	**0**
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	0	0
425151	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**594.922.605**	**49.962.748**	**644.885.353**
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	379.354.991	11.624.999	390.979.990
	Pemeliharaan Prasarana	94.838.739	2.906.249	97.744.988
	Bangunan	65.653.375	11.677.500	77.330.875
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	0	20.104.000	20.104.000
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0	0	0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	0	0	0
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	31.088.000	3.200.000	34.288.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	2.487.500	450.000	2.937.500
	Ruang Pertemuan	21.500.000		21.500.000
425621	**Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan**	**2.972.728.805**	**379.049.962**	**3.351.778.767**
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	2.309.244.881	299.458.673	2.608.703.554
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	171.631.000	21.373.000	193.004.000
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	129.990.000	17.145.000	147.135.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	61.485.940	2.656.400	64.142.340
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	168.708.900	21.670.500	190.379.400
	Pelayanan Jasa Air	4.503.398	538.490	5.041.888
	Pelayanan Jasa Listrik	127.164.686	16.207.899	143.372.585
425911	**Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu**	**228.000**		**228.000**
	JUMLAH PNBP	**3.567.879.410**	**429.012.710**	**3.996.892.120**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERBANDINGAN PENERIMAAN PNBP NON SDA
TRIWULAN III TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2026

Akun	Uraian	Triwulan III Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2026	Kenaikan / Penurunan
425131	**Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan**	**123.207.934**	**0**	**(123.207.934)**
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	123.207.934	0	(123.207.934)
425151	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi**	**517.093.608**	**644.885.353**	**127.791.745**
	Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster	323.805.826	390.979.990	67.174.164
	Pemeliharaan Prasarana	80.270.262	97.744.988	17.474.726
	Bangunan	71.458.538	77.330.875	5.872.337
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penumpukan Barang	0	20.104.000	20.104.000
	Pelayanan Penggunaan Tanah untuk Penjemuran jaring / ikan	0	0	0
	Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer	24.714.982	0	(24.714.982)
	Pelayanan Jasa Penggunaan Transportasi	14.000.000	34.288.000	20.288.000
	Pelayanan Jasa Peralatan dan Gerobak Dorong	2.844.000	2.937.500	93.500
	Ruang Pertemuan		21.500.000	21.500.000
425621	**Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan**	**3.356.316.159**	**3.351.778.767**	**(4.537.392)**
	Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh	2.557.523.924	2.608.703.554	51.179.630
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian	216.140.000	193.004.000	(23.136.000)
	Pelayanan Jasa Pas Langganan	128.115.000	147.135.000	19.020.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan	76.746.065	64.142.340	(12.603.725)
	Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam	180.449.750	190.379.400	9.929.650
	Pelayanan Jasa Air	4.101.110	5.041.888	940.778
	Pelayanan Jasa Dock	48.440.000	0	(4.800.000)
	Pelayanan Jasa Listrik	144.800.310	143.372.585	(1.427.725)
425911	**Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu**	**0**	**228.000**	228.000
	JUMLAH PNBP	**3.996.617.701**	**3.996.892.120**	274.419

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1602./PPSC/TU.140/X/2026

Yth. : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 13 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode pengukuran triwulanan sebagai berikut:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap (Ton)
   - Indikator ini merupakan jumlah produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) dalam bentuk basah yang tercatat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	21.000	34.192,75	162,82

Volume produksi pada Triwulan III Tahun 2026 didominasi oleh jenis ikan seperti Cumi Karet, Ubur – Ubur, Cakalang, Madidihang, Tuna Mata Besar, Albakora, Layang Benggol, Lemadang, dan Ikan Pedang. Adapun untuk capaian kumulatif volume produksi sampai dengan Triwulan III mencapai 162,82% dari target produksi Tri Wulan III Tahun 2026. terjadi peningkatan/kenaikan produksi dari capaian produksi pada Triwulan III Tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan/kenaikan jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan, jumlah operasi penangkapan (trip) dan musim penangkapan ikan. Selain itu juga disebabkan munculnya musim penangkapan ubur-ubur yang terjadi mulai dari bulan Agustus sd September 2026 sehingga menyebabkan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan mengalami peningkatan/kenaikan jika dibandingkan pada periode sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2026:

IKU	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	TW III 2025	TW III 2026	
Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (ton)	26.063,95	34.192,75	31,19

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Volume produksi yang didaratkan juga mengalami peningkatan/kenaikan yang signifikan sebesar 31,19 %. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan/kenaikan jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan, jumlah operasi penangkapan (trip), dan musim penangkapan ikan. Selain itu juga disebabkan munculnya musim penangkapan ubur-ubur yang terjadi mulai dari bulan Agustus sd September 2026 sehingga menyebabkan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan mengalami peningkatan/kenaikan yang signifikan jika dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
   - Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja operasional pelabuhan berdasarkan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan. Penilaian meliputi aspek administrasi dan sistem informasi, fasilitas pelabuhan, pelayanan umum, serta investasi dan industri.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	84	92,00	109,52

Capaian kinerja operasional pelabuhan pada Triwulan III tahun 2026 mencapai nilai 92,00, yang termasuk dalam kategori *sangat baik*. Nilai tersebut merupakan hasil dari Evaluasi Kinerja (EVKIN) yang mencakup 27 komponen penilaian. Capaian ini didorong oleh meningkatnya pendapatan pelabuhan Non SDA, frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, pelayanan tambat-labuh, frekuensi pengiriman data (PIPP), dan tata kelola lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perbandingan dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

NO	IKU	REALISASI TW III 2025	REALISASI TW III 2026	NAIK/ TURUN (%)
1	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	96,5	92,00	(4,66)

Jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025, terjadi penurunan sebesar 4,66 %. penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan/pengembangan aplikasi PIPP dan perubahan jumlah item/kriteria yang menjadi IKU pada tahun 2025 sebanyak 18 IKU dan 27 IKU pada tahun 2026 sehingga memberikan perubahan yang cukup signifikan. Selain itu juga disebabkan karena menurunnya tingkat pelayanan penyaluran BBM untuk kapal perikanan dan jumlah postingan pada media sosial (Instagram, facebook, tik tok, twitter) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui aplikasi PIPP.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Yatim Kurniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA DUKUNG IKU 2
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN III
(BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER)
TAHUN 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
b. IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Ton);
c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
d. Formula perhitungan : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS Cilacap.
f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri dari ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Lokasi

Lokasi pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan metode Sampling dan Sensus.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan pendataan produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap sebanyak 11 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT sebanyak 10 orang dan untuk pendataan kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3;

3. HASIL KEGIATAN

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan proses pengolahan data, kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi harian, yang akan dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan triwulan I, Sampai dengan bulan Desember 2026 dan Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap :

No	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	1.994,85	53.761.871.500
2	Februari	1.378,02	34.342.680.549
3	Maret	2.712,03	63.719.623.000
4	April	2.332,16	51.143.859.500
5	Mei	3.174,87	78.361.893.000
6	Juni	5.638,93	136.871.750.500
7	Juli	4.307.21	105.589.747.000
8	Agustus	5.433.70	114.451.262.250
9	September	7.220.94	134.681.920.000
	Jumlah	**34.192,75**	**772.924.607.299**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan antara tahun 2026 dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk volume produksi pada tahun 2026 mengalami kenaikan/peningkatan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan, jumlah operasi penangkapan (trip) dan musim penangkapan ikan. Selain itu juga disebabkan munculnya musim penangkapan ubur – ubur yang terjadi mulai bulan Agustus 2026 sampai dengan September 2026 sehingga menyebabkan hasil tangkapan yang didaratkan mengalami peningkatan/kenaikan yang signifikan.

BULAN	VOLUME(Ton)		NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2025	2026	2025	2026
JANUARI	1.306,27	1.994,85	28.994.199.000	53.761.871.500
FEBRUARI	935,71	1.378,08	24.094.214.000	34.342.680.549
MARET	3.000,37	2.712,00	79.282.409.000	63.719.623.000
APRIL	1.193,95	2.332,16	33.914.437.000	51.143.859.500
MEI	2.442,46	3.174,87	69.522.135.000	78.361.893.000
JUNI	3.048,08	5.638,93	88.066.303.640	136.871.750.500
JULI	3.588,29	4.307,21	95.081.888.100	105.589.747.000
AGUSTUS	5.483,71	5.433,70	158.838.272.000	114.451.262.250
SEPTEMBER	4.378,19	7.220,94	125.868.993.000	134.681.920.000
JUMLAH	**26.063,95**	**34.192,75**	**323.873.697.640**	**772.924.607.299**

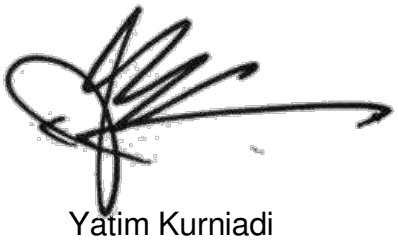
4. Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap antara lain adalah :

Tuna Mata Besar, Madidihang, Cakalang, Lemadang, Layur, Albakora, Ikan Pedang (meka), Ikan Setan (Gindara), Setuhuk hitam, Setuhuk Loreng, Nyunglas, Hiu Lalaek (Cucut Selendang), Hiu Lanjam (Cucut lanjaman), Hiu Tikus (Cucut pahitan), Cumi Karet, Layang Benggol, Manyung, Tongkol Pisang Cerutu (Lisong), Hiu Anjing (Cucut Cakilan), Hiu Monyet (Cucut Tikusan), Ikan Layaran, Sunglir, Ubur - Ubur dan lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut.

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan



Yatim Kurniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BULAN	VOLUME(Ton)	
	2025	2026
JANUARI	1.306,27	1.994,85
FEBRUARI	935,71	1.378,08
MARET	3.000,37	2.712,00
APRIL	1.193,95	2.332,16
MEI	2.442,46	3.174,87
JUNI	3.048,08	5.638,93
JULI	3.588,29	4.307,21
AGUSTUS	5.483,71	5.433,70
SEPTEMBER	4.378,19	7.220,94
JUMLAH	**26.063,95**	**34.192,75**

BULAN	NILAI PRODUKSI (Rp)	
	2025	2026
JANUARI	28.994.199.000	53.761.871.500
FEBRUARI	24.094.214.000	34.342.680.549
MARET	79.282.409.000	63.719.623.000
APRIL	33.914.437.000	51.143.859.500
MEI	69.522.135.000	78.361.893.000
JUNI	88.066.303.640	136.871.750.500
JULI	95.081.888.100	105.589.747.000
AGUSTUS	158.838.272.000	114.451.262.250
SEPTEMBER	125.868.993.000	134.681.920.000
JUMLAH	**323.873.697.640**	**772.924.607.299**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN JANUARI 2026

No	JENIS IKAN	JANUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	20.972	595.690.000	28.404
2	Alu-alu	609	11.730.000	19.261
3	Anggoli	15	255.000	17.000
4	Aruan tasek	39	702.000	18.000
5	Balong	3.256	79.617.000	24.452
6	Barakuda	250	6.712.000	26.848
7	Bawal Hitam	1.226	56.600.000	46.166
8	Bawal Putih	452	69.800.000	154.425
9	Bawal sabit	180	3.600.000	20.000
10	Belo/Selanget	21.910	109.550.000	5.000
11	Bilis/Bulu Ayam	25.993	129.965.000	5.000
12	Cakalang	254.362	3.502.228.500	13.769
13	Cucut baster	373	4.784.000	12.826
14	Cumi karet	633.891	19.547.253.000	30.837
15	Dogol	4.250	297.500.000	70.000
16	Gulamah	12.239	183.585.000	15.000
17	Hiu anjing	1.564	19.432.000	12.425
18	Hiu lalaek	3.954	32.044.000	8.104
19	Hiu lanjam	8.562	120.061.000	14.023
20	Hiu macan	1.732	27.712.000	16.000
21	Hiu monyet	6.410	57.985.000	9.046
22	Hiu taji	548	2.872.000	5.241
23	Hiu teteri	190	1.710.000	9.000
24	Hiu tikus	11.608	167.753.000	14.451
25	Ikan ayam-ayam	30	360.000	12.000
26	Ikan layaran	6.954	138.706.000	19.946
27	Ikan pedang	58.497	1.723.428.000	29.462
28	Ikan setan	1.204	27.692.000	23.000
29	Jambret/Rebon	23.251	581.275.000	25.000
30	Jerbung	3.853	770.600.000	200.000
31	Kembung	485	12.125.000	25.000
32	Kerong / Gerok	3.236	97.080.000	30.000
33	Kerosok	8.140	325.600.000	40.000
34	Kurisi	5.819	98.923.000	17.000
35	Layang	175	5.250.000	30.000
36	Layang benggol	66.983	628.910.000	9.389
37	Layur	4.782	143.460.000	30.000
38	Lemadang	72.900	1.429.776.000	19.613
39	Lendra/Lidah	1.518	37.950.000	25.000
40	Madidihang	347.329	13.662.775.000	39.337
41	Manyung	14.177	212.655.000	15.000
42	Nyunglas	3.712	111.084.000	29.926
43	Opah	226	3.634.000	16.080
44	Pari kelapa	8	64.000	8.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

45	Pari kelelawar	243	1.944.000	8.000
46	Pinjala	107	1.926.000	18.000
47	Remang	556	15.568.000	28.000
48	Selar bentong	978	14.670.000	15.000
49	Setuhuk hitam	9.517	291.368.000	30.616
50	Setuhuk loreng	1.689	51.671.500	30.593
51	Sunglir	9.451	190.628.000	20.170
52	Tigawaja	5.356	133.900.000	25.000
53	Tk madidihang	83.508	1.578.351.500	18.901
54	Tk mata besar	118.445	2.081.974.000	17.578
55	Tongkol pisang cerutu	5.899	44.589.000	7.559
56	Tuna mata besar	117.545	4.177.434.000	35.539
57	Tuna sirip biru selatan	3.689	137.360.000	37.235
TOTAL		**1.994.847**	**53.761.871.500**	**24.605**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN PEBRUARI 2026

No	JENIS IKAN	FEBRUARI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	31.054	667.661.000	21.500
2	Alu-alu	206	3.374.000	16.379
3	Barakuda	113	2.812.000	24.885
4	Bawal sabit	919	18.380.000	20.000
5	Bawal hitam	2.252	91.840.000	40.782
6	Belo/selanget	22.017	110.085.000	5.000
7	Bilis/bulu ayam	20.897	104.485.000	5.000
8	Cakalang	154.263	1.930.285.500	12.513
9	Cucut baster	939	15.024.000	16.000
10	Cumi karet	329.923	10.130.700.000	30.706
11	Hiu anjing	1.153	18.448.000	16.000
12	Hiu lalaek	5.709	68.508.000	12.000
13	Hiu lanjam	4.174	62.610.000	15.000
14	Hiu monyet	2.156	30.788.000	14.280
15	Hiu tikus	5.815	98.855.000	17.000
16	Gulamah	13.138	181.680.000	13.829
17	Ikan layaran	3.507	63.324.000	18.056
18	Ikan pedang	30.651	766.275.000	25.000
19	Ikan setan	17.360	399.280.000	23.000
20	Jambret/reon	24.055	579.775.000	24.102
21	Kakap batu	5	100.000	20.000
22	Kembung	1.020	25.500.000	25.000
23	Kerong/gerok	5.015	150.450.000	30.000
24	Kerosok	7.604	290.225.000	38.167
25	Layang	19.624	117.744.000	6.000
26	Layur	4.086	124.732.000	30.527
27	Lemadang	63.724	1.264.863.049	19.849
28	Lendra	1.015	25.375.000	25.000
29	Lobster	108	21.600.000	200.000
30	Madidihang	244.277	9.038.249.000	37.000
31	Manyung	13.842	207.630.000	15.000
32	Nyunglas	7.669	191.725.000	25.000
33	Pari kelapa	55	440.000	8.000
34	Pari kelelawar	44	352.000	8.000
35	Remang	103	2.884.000	28.000
36	Semar	1.340	26.380.000	19.687
37	Setuhuk hitam	7.431	189.408.000	25.489
38	Setuhuk loreng	1.257	32.053.500	25.500
39	Sunglir	3.513	70.260.000	20.000
40	Tigawaja	5.697	142.425.000	25.000
41	Tk madidihang	170.309	3.722.588.000	21.858
42	Tk mata besar	86.613	1.255.888.500	14.500
43	Tongkol pisang cerutu	129	645.000	5.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

44	Tuna mata besar	57.161	1.943.474.000	34.000
45	Tuna sirip biru selatan	6.140	153.500.000	25.000
TOTAL		**1.378.082**	**34.342.680.549**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN MARET 2026

No	JENIS IKAN	MARET		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	38.939	837.681.500	21.513
2	Alu-alu	128	1.536.000	12.000
3	Balong	1.080	48.600.000	45.000
4	Barakuda	84	852.000	10.143
5	Bawal hitam	1.238	52.220.000	42.181
6	Bawal putih	435	104.900.000	241.149
7	Bawal sabit	976	19.520.000	20.000
8	Belo	8.517	49.109.000	5.766
9	Bilis	23.163	139.253.000	6.012
10	Cakalang	497.472	6.219.612.000	12.502
11	Cobia	52	936.000	18.000
12	Cucut baster	1.688	27.008.000	16.000
13	Cumi karet	616.200	18.486.000.000	30.000
14	Dogol	3.160	237.000.000	75.000
15	Gindara	9	207.000	23.000
16	Gulamah	11.170	169.626.000	15.186
17	Hiu anjing	1.629	26.064.000	16.000
18	Hiu koboi	21	336.000	16.000
19	Hiu lalaek	2.643	31.949.000	12.088
20	Hiu lalek	1.290	15.480.000	12.000
21	Hiu lanjam	6.424	96.360.000	15.000
22	Hiu macan	6.683	82.404.000	12.330
23	Hiu monyet	19.742	275.564.800	13.958
24	Hiu teteri	303	6.817.500	22.500
25	Hiu tikus	11.253	195.105.000	17.338
26	Ikan ayam-ayam	24	216.000	9.000
27	Ikan kambing-kambing	425	10.625.000	25.000
28	Ikan layaran	4.528	81.504.000	18.000
29	Ikan pedang	43.801	1.095.025.000	25.000
30	Ikan setan	5.231	128.957.000	24.652
31	Jambret	18.342	474.280.000	25.858
32	Jerbung	2.280	465.820.000	204.307
33	Kerong	4.424	137.195.000	31.012
34	Kerosok	5.964	241.440.000	40.483
35	Kurisi	2.180	37.060.000	17.000
36	Layang benggol	104.823	628.938.000	6.000
37	Layur	18.605	621.986.000	33.431
38	Lemadang	156.799	3.066.291.500	19.556
39	Lendra	1.136	30.850.000	27.157
40	Madidihang	353.427	13.005.631.000	36.799
41	Manyung	7.749	116.235.000	15.000
42	Nyunglas	12.092	301.975.000	24.973

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

43	Pari kelapa	33	231.000	7.000
44	Pari kelelawar	47	1.081.000	23.000
45	Pinjala	63	1.883.700	29.900
46	Selar bentong	66	990.000	15.000
47	Semar	2.128	21.280.000	10.000
48	Setuhuk hitam	9.801	249.886.000	25.496
49	Setuhuk loreng	1.059	27.004.500	25.500
50	Sunglir	7.082	142.891.000	20.177
51	Tigawaja	4.356	111.300.000	25.551
52	Tk madidihang	331.424	7.740.601.500	23.356
53	Tk mata besar	173.117	2.522.759.000	14.573
54	Tongkol banyar	225	2.250.000	10.000
55	Tongkol pisang cerutu	31.893	159.465.000	5.000
56	Tuna mata besar	145.077	4.932.618.000	34.000
57	Tuna sirip biru selatan	9.503	237.213.000	24.962
TOTAL		**2.712.003**	**63.719.623.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN APRIL 2026

No	JENIS IKAN	APRIL		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	91595	1.971.191.500	21.521
2	Alu-alu	444	5.430.000	12.230
3	Barakuda	41	528.000	12.878
4	B. Hitam	200	8.000.000	40.000
5	Bawal sabit	85	1.700.000	20.000
6	Belo/selanget	14.903	104.321.000	7.000
7	Bilis / Bulu Ayam	27.436	192.052.000	7.000
8	Cakalang	807208	10.589.221.000	13.118
9	Cucut baster	222	3.200.000	14.414
10	Cumi karet	346924	10.407.720.000	30.000
11	Dogol	9.421	659.470.000	70.000
12	Gulamah	18.018	270.270.000	15.000
13	Hiu anjing	468	7.488.000	16.000
14	Hiu lalaek	3106	69.636.000	22.420
15	Hiu lanjam	5284	80.096.000	15.158
16	Hiu macan	460	6.452.000	14.026
17	Hiu monyet	2489	34.846.000	14.000
18	Hiu taji	794	3.176.000	4.000
19	Hiu tikus	7430	126.310.000	17.000
20	Ikan layaran	4846	88.000.000	18.159
21	Ikan pedang	39472	986.800.000	25.000
22	Ikan setan	1208	27.784.000	23.000
23	Jambret / Rebon	25.670	641.750.000	25.000
24	Jerbung	5.524	1.104.800.000	200.000
25	Kembung	1.819	49.400.000	27.158
26	Kerong / Gerok	2.530	75.900.000	30.000
27	Kerosok	7.416	259.560.000	35.000
28	Layang benggol	34097	204.582.000	6.000
29	Layur	101213	3.423.834.000	33.828
30	Lemadang	80806	1.616.120.000	20.000
31	Lendra/lidah	1.772	44.300.000	25.000
32	Lobster	119	23.800.000	200.000
33	Madidihang	207101	7.660.377.000	36.989
34	Manyung	9408	141.120.000	15.000
35	Nyunglas	12246	306.207.500	25.005
36	Pari kelelawar	214	1.712.000	8.000
37	Semar	92	920.000	10.000
38	Setuhuk hitam	9657	246.236.500	25.498
39	Setuhuk loreng	906	23.103.000	25.500
40	Sunglir	2887	57.740.000	20.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

41	Tk madidihang	166056	3.643.114.500	21.939
42	Tk mata besar	192828	3.120.322.500	16.182
43	Tongkol pisang cerutu	1701	8.505.000	5.000
44	Tigawaja	3.660	91.500.000	25.000
45	Tuna mata besar	77296	2.628.064.000	34.000
46	Tuna sirip biru selatan	5088	127.200.000	25.000
TOTAL		**2.332.160**	**51.143.859.500**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN MEI 2026

No	JENIS IKAN	MEI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	152.714	3.283.351.000	21.500
2	Alu-alu	250	3.000.000	12.000
3	Aruan tasek	38	684.000	18.000
4	Bawal hitam	1.417	56.680.000	40.000
5	Bawal putih	446	89.200.000	200.000
6	Bawal sabit	535	10.700.000	20.000
7	Belo/selanget	23.100	161.700.000	7.000
8	Bilis / Bulu Ayam	23.103	161.721.000	7.000
9	Cakalang	826.137	10.397.104.000	12.585
10	Cucut baster	2.886	46.176.000	16.000
11	Cumi karet	1.068.574	32.019.300.000	29.965
12	Dogol	1.208	84.560.000	70.000
13	Gulamah	9.381	142.445.000	15.184
14	Hiu anjing	795	12.720.000	16.000
15	Hiu kodok	20	180.000	9.000
16	Hiu lalaek	3.909	46.908.000	12.000
17	Hiu lanjam	4.954	81.048.500	16.360
18	Hiu macan	631	7.572.000	12.000
19	Hiu monyet	7.870	110.180.000	14.000
20	Hiu teteri	284	6.390.000	22.500
21	Hiu tikus	13.284	225.828.000	17.000
22	Ikan layaran	4.936	88.848.000	18.000
23	Ikan pedang	66.831	1.665.749.000	24.925
24	Ikan sebelah	73	657.000	9.000
25	Ikan setan	1.506	34.558.000	22.947
26	Jambret / Rebon	24.028	600.700.000	25.000
27	Jerbung	724	144.800.000	200.000
28	Kakap cina	25	500.000	20.000
29	Kambing-kambing	96	864.000	9.000
30	Kembung	692	17.300.000	25.000
31	Kerong / Gerok	3.230	96.900.000	30.000
32	Kerosok	6.942	242.970.000	35.000
33	Kuwe	30	900.000	30.000
34	Layang benggol	17.500	105.000.000	6.000
35	Layur	77.392	2.534.082.000	32.743
36	Lemadang	25.338	513.840.000	20.279
37	Lendra/lidah	216	5.400.000	25.000
38	Madidihang	465.493	17.223.241.000	37.000
39	Manyung	13.415	201.225.000	15.000
40	Nyunglas	10.815	270.375.000	25.000
41	Pari kelelawar	849	6.792.000	8.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

42	Remang	12	336.000	28.000
43	Semar	125	1.920.000	15.360
44	Setuhuk hitam	11.998	305.133.000	25.432
45	Setuhuk loreng	1.982	50.541.000	25.500
46	Sunglir	221	4.420.000	20.000
47	Tk madidihang	25.350	557.535.000	21.993
48	Tk mata besar	122.913	1.818.684.000	14.797
49	Tigawaja	6.659	166.475.000	25.000
50	Tongkol pisang cerutu	3.782	18.910.000	5.000
51	Tuna mata besar	137.335	4.665.140.500	33.969
52	Tuna sirip biru selatan	2.826	70.650.000	25.000
TOTAL		**3.174.870**	**78.361.893.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA BULAN JUNI 2026

No	JENIS IKAN	JUNI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	218.790	4.703.292.000	21.497
2	Alu-alu	699	8.388.000	12.000
3	Aruan tasek	15	270.000	18.000
4	Ayam-ayam	365	3.285.000	9.000
5	Balong	126	3.150.000	25.000
6	Bawal hitam	682	27280000	40.000
7	Bawal sabit	2.280	45.600.000	20.000
8	Belo/selanget	14271	99897000	7.000
9	Bilis / Bulu Ayam	32837	229859000	7.000
10	Cakalang	1.693.321	21.166.512.500	12.500
11	Cucut baster	175	2.100.000	12.000
12	Cumi karet	1.740.145	52.204.350.000	30.000
13	Dogol	5925	414750000	70.000
14	Gindara	4	92.000	23.000
15	Gulamah	7.934	119.010.000	15.000
16	Hiu anjing	586	8.645.000	14.753
17	Hiu kodok	20	100.000	5.000
18	Hiu lalaek	4.094	49.128.000	12.000
19	Hiu lanjam	3.106	46.590.000	15.000
20	Hiu macan	803	9.636.000	12.000
21	Hiu monyet	1.613	22.582.000	14.000
22	Hiu teteri	191	4.297.500	22.500
23	Hiu tikus	6.780	115.260.000	17.000
24	Ikan ayam-ayam	110	990.000	9.000
25	Ikan layaran	6.950	125.457.000	18.051
26	Ikan pedang	97.487	2.437.175.000	25.000
27	Ikan sebelah	62	558.000	9.000
28	Ikan setan	11.433	262.959.000	23.000
29	Jambret / Rebon	25.530	646.170.000	25.310
30	Jerbung	4.425	885.000.000	200.000
31	Kambing-kambing	154	1.386.000	9.000
32	Kembung	480	12.000.000	25.000
33	Kerong / Gerok	1.604	48.120.000	30.000
34	Kerosok	6.708	234.780.000	35.000
35	Kurisi	670	11.390.000	17.000
36	Kuwe	30	900.000	30.000
37	Layang	19.193	115.158.000	6.000
38	Layang benggol	39.350	236.100.000	6.000
39	Layur	29.540	982.980.000	33.276
40	Lemadang	34.254	689.885.000	20.140

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

41	Lendra/lidah	2.050	51.250.000	25.000
42	Lobster	193	77.200.000	400.000
43	Madidihang	969.284	35.862.518.000	36.999
44	Manyung	8.944	134.160.000	15.000
45	Nyunglas	17.689	439.870.000	24.867
46	Opah	1.950	23.400.000	12.000
47	Pari kelelawar	823	6.290.000	7.643
48	Semar	282	2.820.000	10.000
49	Setuhuk hitam	18.594	474.147.000	25.500
50	Setuhuk loreng	4.239	108.094.500	25.500
51	Sunglir	3.302	66.040.000	20.000
52	Tigawaja	3.787	94.675.000	25.000
53	Tk madidihang	140.309	3.086.198.000	21.996
54	Tk mata besar	251.427	3.649.728.000	14.516
55	Tongkol pisang cerutu	2.956	14.780.000	5.000
56	Tuna mata besar	199.353	6.780.273.000	34.011
57	Tuna sirip biru selatan	1.009	25.225.000	25.000
TOTAL		**5.638.933**	**136.871.750.500**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA DUKUNG JULI 2026

No	JENIS IKAN	JULI		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	121.445	2.611.067.500	21.500
2	Alu-alu	128	1.536.000	12.000
3	Aruan tasek	8	144.000	18.000
4	Barakuda	81	2.268.000	28.000
5	Bawal sabit	85	1.700.000	20.000
6	Belo/selanget	20452	143164000	7.000
7	Bilis / Bulu Ayam	24.141	168.987.000	7.000
8	Cakalang	1355326	16941575000	12.500
9	Cucut baster	167	2604000	15.593
10	Cumi karet	1.192.081	35.598.850.000	29.863
11	Gulamah	4.199	62.757.000	14.946
12	Hiu anjing	258	4128000	16.000
13	Hiu lalaek	3.495	41.940.000	12.000
14	Hiu lanjam	3.266	48.990.000	15.000
15	Hiu macan	1.145	18.320.000	16.000
16	Hiu monyet	1.881	26.334.000	14.000
17	Hiu teteri	1.187	27.894.500	23.500
18	Hiu tikus	4.995	84.915.000	17.000
19	Ikan ayam-ayam	717	6.453.000	9.000
20	Ikan layaran	4.617	83.106.000	18.000
21	Ikan pedang	61.690	1.542.250.000	25.000
22	Ikan sebelah	215	2.580.000	12.000
23	Ikan setan	5.190	119.370.000	23.000
24	Jambret / Rebon	23.381	563.025.000	24.080
25	Kakap jenaha	268	13.400.000	50.000
26	Kakap merah	6	330.000	55.000
27	Kembung	1.244	43.980.000	35.354
28	Kerapu	173	7.785.000	45.000
29	Kerong / Gerok	2.172	65.160.000	30.000
30	Kerosok	6.245	218.575.000	35.000
31	Kuwe	32	288.000	9.000
32	Layang benggol	105.654	633.924.000	6.000
33	Layur	7.904	237.120.000	30.000
34	Lemadang	38.824	776.480.000	20.000
35	Lendra/lidah	380	9.500.000	25.000
36	Madidihang	1.046.621	38.724.977.000	37.000
37	Manyung	16.826	252.390.000	15.000
38	Nyunglas	14.264	356.604.500	25.000
39	Pari gergaji	163	1.141.000	7.000
40	Pari kelelawar	476	3.660.000	7.689

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

41	Selar komo	67	670.000	10.000
42	Semar	223	2.230.000	10.000
43	Setuhuk hitam	9.281	236.665.500	25.500
44	Setuhuk loreng	2.221	56.635.500	25.500
45	Sunglir	581	11.620.000	20.000
46	Tenggiri	416	31.200.000	75.000
47	Tigawaja	4.979	124.475.000	25.000
48	Tk madidihang	36.256	797.000.000	21.983
49	Tk mata besar	51.229	744.968.500	14.542
50	Tongkol banyar	17	85.000	5.000
51	Tongkol pisang cerutu	10.541	52.705.000	5.000
52	Tuna mata besar	120.000	4.082.220.000	34.019
TOTAL		**4.307.213**	**105.589.747.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BULAN AGUSTUS 2026

No	JENIS IKAN	AGUSTUS		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	86.961	1.869.661.500	21.500
2	Alu-alu	43	516.000	12.000
3	Aruan tasek	13	195.000	15.000
4	Barakuda	16	408.000	25.500
5	Bawal sabit	854	17.080.000	20.000
6	Belo/selanget	15.996	111.972.000	7.000
7	Bilis / Bulu Ayam	26.711	186.977.000	7.000
8	Cakalang	2.009.215	25.259.916.500	12.572
9	Cucut baster	532	8.768.000	16.481
10	Cumi karet	1.497.220	44.916.600.000	30.000
11	Gulamah	6.950	104.250.000	15.000
12	Hiu anjing	990	15.840.000	16.000
13	Hiu lalaek	2.734	32.808.000	12.000
14	Hiu lanjam	4.908	73.620.000	15.000
15	Hiu macan	850	10.200.000	12.000
16	Hiu merah bulu	291	8.730.000	30.000
17	Hiu monyet	549	7.704.000	14.033
18	Hiu teteri	102	2.295.000	22.500
19	Hiu tikus	3.024	51.408.000	17.000
20	Ikan ayam-ayam	40	360.000	9.000
21	Ikan gerot	103	1.030.000	10.000
22	Ikan layaran	990	17.910.000	18.091
23	Ikan pedang	44.891	1.122.275.000	25.000
24	Ikan sebelah	83	747.000	9.000
25	Ikan setan	10.300	236.900.000	23.000
26	Jambret / Rebon	29.692	742.300.000	25.000
27	Kakap merah	200	11.000.000	55.000
28	Kambing-kambing	60	540.000	9.000
29	Kembung	4.242	148.470.000	35.000
30	Kerapu balong	63	1.008.000	16.000
31	Kerong / Gerok	1.334	40.020.000	30.000
32	Kerosok	7.042	246.470.000	35.000
33	Layang benggol	146.264	877.584.000	6.000
34	Layur	8.340	250.340.000	30.017
35	Lemadang	45.426	908.780.000	20.006
36	Madidihang	741.428	27.432.836.000	37.000
37	Manyung	10.640	152.856.750	14.366
38	Nyunglas	8.553	298.882.000	34.945
39	Opah	54	540.000	10.000
40	Pari kelapa	43	301.000	7.000
41	Pari kelelawar	132	842.000	6.379

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

42	Semar	50	1.000.000	20.000
43	Setuhuk hitam	11.281	287.605.500	25.495
44	Setuhuk loreng	2.174	55.437.000	25.500
45	Sunglir	634	12.680.000	20.000
46	Tigawaja	2.933	73.325.000	25.000
47	Tk madidihang	64.440	1.418.205.000	22.008
48	Tk mata besar	122.980	1.793.311.000	14.582
49	Tongkol banyar	565	5.650.000	10.000
50	Tongkol pisang cerutu	2.525	13.598.000	5.385
51	Tuna mata besar	156.950	5.336.300.000	34.000
52	Tuna sirip biru selatan	90	2.250.000	25.000
53	Ubur-ubur	351.200	280.960.000	800
TOTAL		**5.433.701**	**114.451.262.250**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BULAN SEPTEMBER 2026

No	JENIS IKAN	SEPTEMBER		
		PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	HARGA RATA-RATA
1	Albakora	102.888	2.200.464.000	21.387
2	Alu-alu	33	396.000	12.000
3	Barakuda	9	108.000	12.000
4	Bawal sabit	822	17.700.000	21.533
5	Belo	600	4.200.000	7.000
6	Bilis	8.874	66.438.000	7.487
7	Cakalang	1.599.723	19.996.537.500	12.500
8	Cucut baster	716	10.852.000	15.156
9	Cumi karet	2.417.099	72.568.620.000	30.023
10	Dogol	7.881	513.870.000	65.204
11	Gulamah	10.473	157.095.000	15.000
12	Hiu anjing	1.331	20.646.000	15.512
13	Hiu lalaek	3.596	43.152.000	12.000
14	Hiu lanjam	8.392	125.880.000	15.000
15	Hiu macan	528	8.276.000	15.674
16	Hiu monyet	1.262	17.839.000	14.135
17	Hiu teteri	912	20.520.000	22.500
18	Hiu tikus	5.943	101.031.000	17.000
19	Ikan ayam-ayam	372	3.600.000	9.677
20	Ikan layang	27	486.000	18.000
21	Ikan layaran	402	7.236.000	18.000
22	Ikan pedang	48.720	1.218.000.000	25.000
23	Ikan sebelah	70	555.000	7.929
24	Ikan semar	44	880.000	20.000
25	Ikan setan	1.512	34.776.000	23.000
26	Jambret	6.791	169.775.000	25.000
27	Jerbung	6.280	1.256.000.000	200.000
28	Kerong	280	8.400.000	30.000
29	Kerosok	3.478	121.730.000	35.000
30	Layang benggol	64.056	384.336.000	6.000
31	Layur	2.349	79.866.000	34.000
32	Lemadang	49.229	984.580.000	20.000
33	Lendra	1.080	27.000.000	25.000
34	Madidihang	576.448	22.066.251.000	38.280
35	Manyung	14.735	221.025.000	15.000
36	Nyunglas	4.268	106.490.500	24.951
37	Pari kelelawar	1.175	9.400.000	8.000
38	Semar	1.278	25.200.000	19.718
39	Setuhuk hitam	7.665	195.457.500	25.500
40	Setuhuk loreng	2.059	52.504.500	25.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

41	Sunglir	208	4.160.000	20.000
42	Tigawaja	300	7.500.000	25.000
43	Tk madidihang	31.788	699.336.000	22.000
44	Tk mata besar	64.638	978.981.000	15.146
45	Tongkol pisang cerutu	5.342	26.710.000	5.000
46	Tuna mata besar	250.664	8.589.590.000	34.267
47	Tuna sirip biru selatan	198	4.950.000	25.000
48	Ubur-ubur	1.904.400	1.523.520.000	800
TOTAL		**7.220.938**	**134.681.920.000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA DUKUNG IKU 4
TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
(EVKIN (PERSEN)) TRIWULAN III
TAHUN 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua,Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 24 Januari tahun 2025, sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan :

a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
b. IKU 4 : Tingkat Oprasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen);
c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ;
d. Formula perhitungan : Prosentase rata rata capaian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi Kinerja (EVKIN) ;
e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin .

2. Lokasi

Lokasi monitoring dan evaluasi terkait tingkat kinerja pelabuhan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Metode Kerja

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan

Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan (EVKIN) terdiri dari 12 orang yaitu penginputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT. Alat bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL 3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Hasil Kegiatan

Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) pada triwulan III :

No	Bulan	Nilai EVKIN (%)	Keterangan
1.	**Tri Wulan III**	**92,00**	**Sangat Baik**

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk Tri Wulan III adalah sebesar **92,00 % (Kategori : Sangat Baik).**

An. Kepala Pelabuhan
Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Yatim Kurniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN

PPS. Cilacap

TRIWULAN 3

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Skala Nilai	Ket.	Ket. Detail
1	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	Rp 92.891.830	Rp 3,00	Baik	> 75% - 100% realisasi triwulan dari target Triwulan	Pagu Anggaran 2026 : 121.069.511.000,00 Target Triwulan 3 : 4.724.036.745,00 Realisasi Triwulan 3 : 4.388.244.181,00 (92,89%) Total realisasi anggaran Rp. 15.303.744.452,00 (12,64%)
2	Pendapatan Pelabuhan (PNBP Sumber Daya Alam)	%	Rp 46	Rp 4,00	Sangat Baik	> 21% pendapatan dari target selama setahun	Target PNBP SDA tahun 2026 : 21.150.000.000,00 Realisasi PNBP SDA Triwulan 3 : 9.767.239.200,00 (46,18%) Total realisasi PNBP SDA Rp. 23.070.010.457,00
3	Pendapatan Pelabuhan (PNBP Non Sumber Daya Alam)	%	Rp 1.550.834.824.522	Rp 6,00	Sangat Baik	> 100% pendapatan triwulan dari target triwulan	Target PNBP Non SDA Triwulan 3 : 6.984.808.000,00 Realisasi PNBP Non SDA Triwulan 3 : 10.832.283.489,00 (155,08%) Realisasi PNBP Non SDA Tahun 2026 : 20.679.991.516,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4	**Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan**	**Kelengkapan**	**000**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**Terdapat Personil Kepala Pelabuhan/Penanggung Jawab Pelabuhan, Syahbandar/Petugas Kesyahbandaran, Tata Usaha/ Dukungan Manajerial / Operasional**	**Kepala Pelabuhan / Penanggung Jawab Pelabuhan : 1 orang** **Syahbandar/Petugas Kesyahbandaran : 1 orang** **Tata Usaha/ Dukungan Manajerial / Operasional : 62 orang**
5	**Penyerapan Tenaga Kerja**	**Orang**	**4.824**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 3.000 orang**	**Jumlah tenaga kerja : 4.824,00 orang.**
6	**Sosialisasi dan bimbingan teknis**	**Sesi**	**019**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 15 kegiatan**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah 19,00 kegiatan.**
7	**Sosial media**	**Post**	**008**	**Rp 0,00**	**Kurang**	**< 10 postingan dan/atau repost**	**Jumlah Share Sosial Media : 8,00.**
8	**Koordinasi Lintas Sektoral dan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan**	**034**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 10 Koordinasi**	**Realisasi Nilai Koordinasi LSPD : 34,00.**
9	**Standardisasi dan Penghargaan**	**Dokumen**	**008**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 5 Dokumen**	**Realisasi Nilai Standarisasi Penghargaan : 8 dokumen** **Penghargaan : 6 dokumen** **Standarisasi : 2 dokumen**
10	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**%**	**95.060.000**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Realisasi Nilai IKM : 95,06.**
11	**Penerbitan Dokumen Kedatangan Kapal**	**%**	**10.562.913.907.285**	**Rp 6,00**	**Sangat Baik**	**100% dokumen Kedatangan Kapal yang diterbitkan dibandingkan dengan jumlah Kedatangan Kapal dalam absensi kedatangan kapal**	**Jumlah dokumen kedatangan kapal yang diterbitkan Triwulan 3 : 319** **Jumlah kedatangan kapal berdasarkan absensi Triwulan 3 : 302.**
12	**Penggunaan Sistem Informasi Kesyahbandaran**	**Ya/Tidak**	**000**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**Menggunakan sistem informasi kesyahbandaran**	**Sistem Informasi Kesyahbandaran digunakan.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13	**Data Muatan Sampah pada Kapal Perikanan**	**Ya/Tidak**	**000**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**Ada Data**	**Muatan sampah Triwulan 3 adalah 1.193,00 kg.**
14	**Produksi Perikanan**	**Ton/Hari**	**18.335.459.782.609**	**Rp 6,00**	**Sangat Baik**	**> 50 ton per hari**	**Produksi Triwulan 3 adalah 16.868.623,00 kg atau 183,35 Ton/hari.** **Produksi = 16.868.623,00 kg** **Pemasaran Masuk = 0,00 kg** **Kapal Port To Port = 0,00 kg**
15	**Aktifitas Entri data pada Sistem Informasi Pelabuhan Perikanan**	**Hari**	**091**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 60 hari**	**Jumlah hari entri : 91** **Jumlah hari pendaratan di PIPP Mobile : 91** **Jumlah hari entri Pemasaran Masuk : 0**
16	**Tata Kelola Lingkungan**	**Nilai**	**90.930.000**	**Rp 6,00**	**Sangat Baik**	**Nilai > 80 - 100**	**Realisasi nilai tata kelola lingkungan : 90,93**
17	**Pelayanan Tambat Labuh**	**%**	**10.236.071.765.817**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 80% -<100%, perbandingan jumlah kode billing yang diterbitkan dengan jumlah Persetujuan Berlayar yang terbit**	**Jumlah Billing yang diterbitkan : 1084** **Jumlah SPB kapal > 5 : 1059 kapal.**
18	**Penyaluran Air Bersih Untuk Kapal Perikanan**	**%**	**16.559.538.423.815**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**>75 - 100% dari kebutuhan**	**Kebutuhan air bersih tahun 2026 : 5.012.217,00 liter** **Ketersediaan air bersih Triwulan 3 : 8.300.000,00 liter** **Dari dalam pelabuhan : 2.450.000,00 liter** **Dari luar pelabuhan : 5.850.000,00 liter** **Total Ketersediaan : 8.300.000,00 liter**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	**Penyaluran Es Untuk Kapal Perikanan**	**%**	**22.959.822.546.599**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**>75 - 100% dari kebutuhan**	**Kebutuhan es tahun 2026 : 55.902,00 kg** **Ketersediaan es Triwulan 3 : 1.283.500,00 kg** **Dari dalam pelabuhan : 682.000,00 kg** **Dari luar pelabuhan : 601.500,00 kg** **Total Ketersediaan : 1.283.500,00 kg**
20	**Penyaluran BBM untuk Kapal Perikanan**	**%**	**21.733.768.479.451**	**Rp 1,00**	**Kurang**	**<25% dari kebutuhan**	**Kebutuhan bbm tahun 2026 : 12.179.204,00 liter** **Ketersediaan bbm Triwulan 3 : 2.647.000,00 liter** **Dari dalam pelabuhan : 1.270.000,00 liter** **Dari luar pelabuhan : 1.377.000,00 liter** **Total Ketersediaan : 2.647.000,00 liter**
21	**Pelayanan Perbaikan Kapal (Docking, bengkel)**	**Ada/Tidak**	**000**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**Ada**	
22	**Pelayanan pengolahan hasil perikanan di kawasan pelabuhan**	**%**	**13.770**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 80%-100% Perbandingan total produksi ikan yang didaratkan dengan kapasitas yang tersedia**	**Hasil produksi (UPI) dibandingkan dengan produksi yang didaratkan : 13.770,30%** **Produksi / Kapasitas (UPI) : 122.500,00 kg** **Produksi yang didaratkan : 16.868.623,00 kg**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

23	**Pemanfaatan lahan industri di pelabuhan**	**%**	**971.206.581**	**Rp 4,00**	**Sangat Baik**	**> 80%-100% Perbandingan luas lahan industri Pelabuhan Perikanan yang dimanfaatkan dengan luas kawasan/area industri Pelabuhan Perikanan**	**Luas Lahan Industri : 17.500,00 m2** **Luas Lahan yang sudah dimanfaatkan : 17.000,00 m2** **Luas lahan yang belum dimanfaatkan : 500,00 m2**
				Rp 92,00			
Jumlah				**SANGAT BAIK**			
Kesimpulan dan Rekomendasi							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.3781/DJPT.4/PI.310/X/2026 12 Oktober 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan III TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2.1, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan III TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Juli s.d September 2026 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JULI	AGS	SEP			
1	PPN Brondong	94,10	99,90	100,00	294,00	98,00	Sangat Baik
2	PPN Pemangkat	98,30	96,90	95,30	290,50	96,83	Sangat Baik
3	PPN Sibolga	97,00	96,40	96,20	289,60	96,53	Sangat Baik
4	PPN Palabuhanratu	92,60	94,50	95,00	282,10	94,03	Sangat Baik
5	PPN Prigi	91,80	95,60	92,10	279,50	93,17	Sangat Baik
6	PPN Pengambengan	91,80	93,20	91,30	276,30	92,10	Sangat Baik
7	PPN Kejawanan	89,50	90,60	92,90	273,00	91,00	Sangat Baik
8	PPS Cilacap	96,00	86,60	90,20	272,80	90,93	Sangat Baik
9	PPS Bitung	86,60	90,40	91,40	268,40	89,47	Sangat Baik
10	PPS Bungus	84,50	88,30	93,40	266,20	88,73	Sangat Baik
11	PPN Ternate	86,80	82,50	82,50	251,80	83,93	Sangat Baik
12	PPN Pekalongan	76,50	88,80	86,50	251,80	83,93	Sangat Baik
13	PPN Ambon	92,40	91,40	66,30	250,10	83,37	Sangat Baik
14	PPS Nizam Zachman	80,50	83,40	79,60	243,50	81,17	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JULI	AGS	SEP			
15	PPS Kendari	79,50	71,10	88,80	239,40	79,80	Baik
16	PPN Tanjung Pandan	88,10	80,20	71,00	239,30	79,77	Baik
17	PPN Tual	76,50	78,20	81,40	236,10	78,70	Baik
18	PPN Kwandang	81,40	78,90	75,80	236,10	78,70	Baik
19	PPN Sungailiat	77,30	72,50	65,50	215,30	71,77	Baik
20	PPS Belawan	76,00	67,60	62,00	205,60	68,53	Baik
21	PPP Teluk Batang	68,80	65,50	66,50	200,80	66,93	Baik
22	PPN Karangantu	75,40	61,50	63,00	199,90	66,63	Baik

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Juli s.d September 2026 secara detail dapat dilihat melalui akun SELARASKAN masing-masing UPT.
3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN dibawah SANGAT BAIK agar lebih meningkatkan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN SANGAT BAIK agar mempertahankan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1.
Nomor : B.3781/DJPT.4/PI.310/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Imas Masriah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1604/PPSC/TU.140/X/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026 dan telah ditetapkannya hasil penilaian tata kelola lingkungan pelabuhan perikanan Triwulan III Tahun 2026 pada aplikasi SELARASKAN, bersama ini kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana sebagai berikut.

1. **Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**

   - Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2026

     Kegiatan pengendalian pengembangan fasilitas di PPS Cilacap didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Master Plan PPS Cilacap Tahun 2007-2028.

     Berdasarkan Master Plan tersebut terdapat 52 fasilitas yang perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi tetap optimal. Jumlah fasilitas yang telah dilakukan pengendalian sebanyak 22 unit.

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	42,31	128,21

   - Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode Triwulan III 2025

IKU	Target	Realiasi	Capaian (%)
Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPS Cilacap (%)	33	42,31	128,21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jika dilihat kedua periode capaian kinerja pengendalian pengembangan fasilitas masih sama. Hal ini karena fasilitas pelabuhan yang ada sejak tahun sebelumnya belum dilakukan rehab ataupun pengembangan. Pengembangan fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027 melalui pembiayaan pinjaman luar negeri (Loan) dengan nama kegiatan Proyek Eco Fishing Port yang saat ini sedang tahap pemilihan penyedia melalui tender internasional dengan metode pelaksanaan *Design and Build.*

2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

- Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2026

  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Penilaian kegiatan pengendalian lingkungan di PPS Cilacap dilakukan melalui kegiatan pengendalian lingkungan yang dilaporkan secara periodik pada aplikasi sistem informasi berbasis WEB yaitu SELARASKAN yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pada aplikasi SELARASKAN terdapat 2 program yang terdiri dari 18 indikator program mandatory, dan minimal 5 indikator program voluntary dengan jumlah bobot 60%. Sedangkan pada indikator hasil terdapat 8 penilaian dengan jumlah bobot 40%.

  Pada triwulan III tahun 2026 realisasi nilai pengendalian lingkungan berdasarkan hasil evaluasi implementasi SELARASKAN oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Juli	Agustus	September			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	33	96,00	86,60	90,20	272,80	90,93	275,55

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Perbandingan dengan capaian kinerja pada periode III Tahun 2025

  Nilai pengendalian lingkungan di PPS Cilacap pada Triwulan III Tahun 2025 rata-rata 94,66 atau 314,5% dari target sebesar 30,1. Nilai capaian kinerja periode TW III tahun 2026 lebih kecil dari capaian di periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena masih terdapat evidence yang dinilai belum maksimal khususnya pada penggunaan listrik dan air serta pemeliharaan listrik dan air. Selain itu evidence pengolahan sampah belum optimal.

IKU	Target	Realisasi Bulan			Skor Kumulatif	Rata-Rata	Capaian (%)
		Juli	Agustus	September			
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap (nilai)	30,1	93,26	93,08	97,65	283,99	94,66	314,5

Terkait dengan laporan capaian indikator kinerja tersebut, terlampir kami sampaikan data dukung yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terlima kasih.

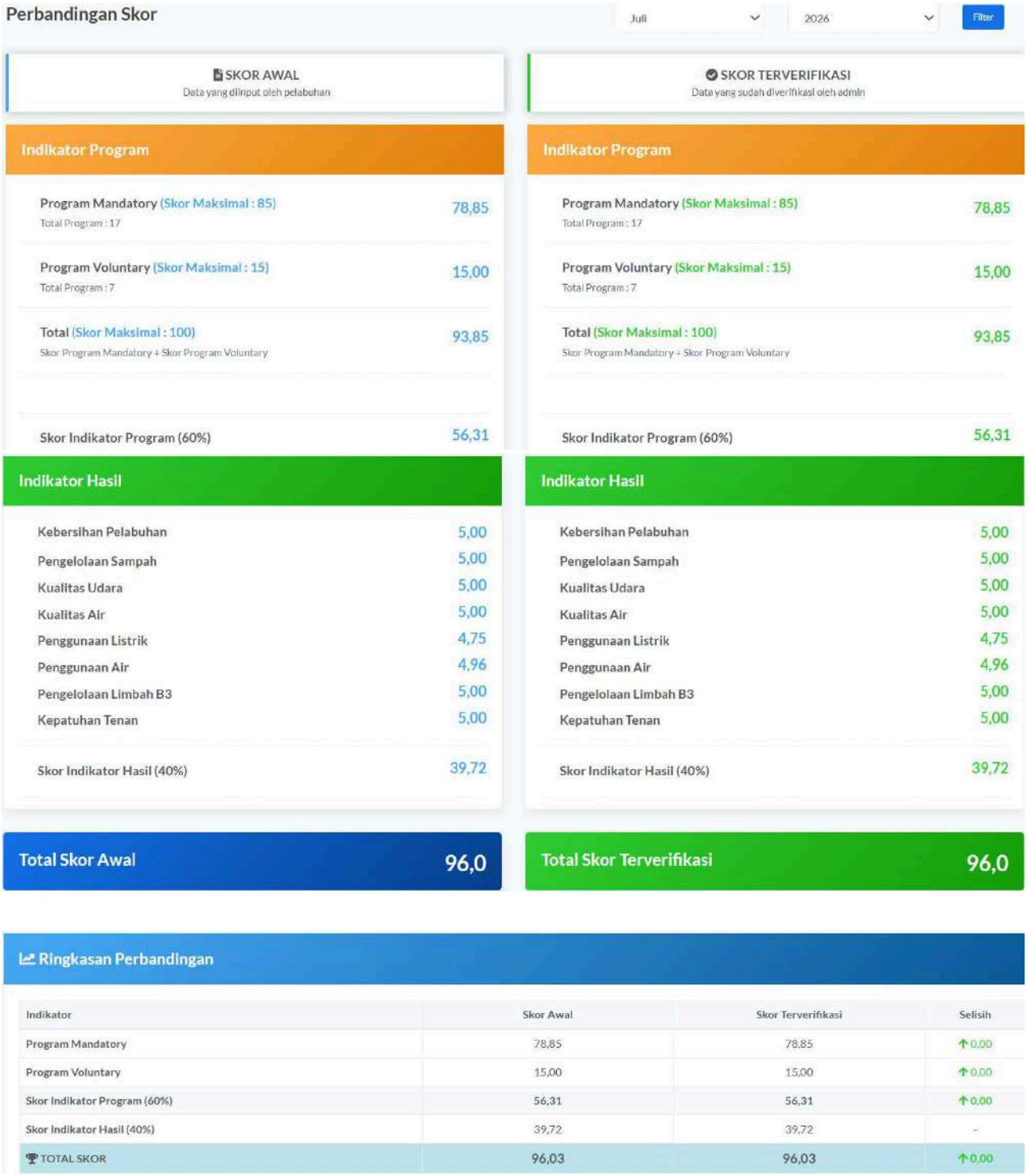
Ditandatangani
Secara Elektronik

Kushartanto Ahmad Santosa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

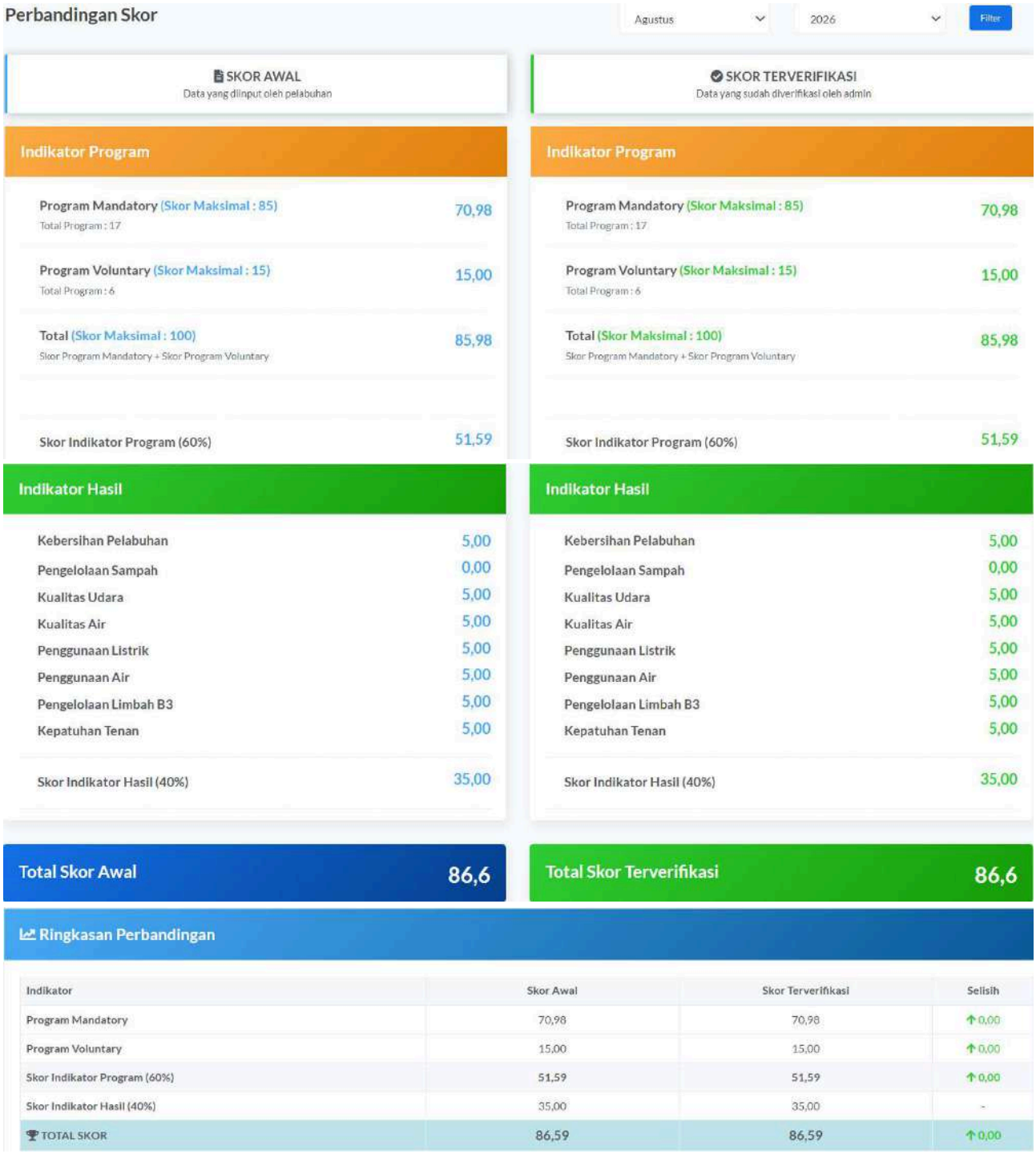
TANGKAPAN LAYAR APLIKASI SELARASKAN

Bulan: Juli 2026



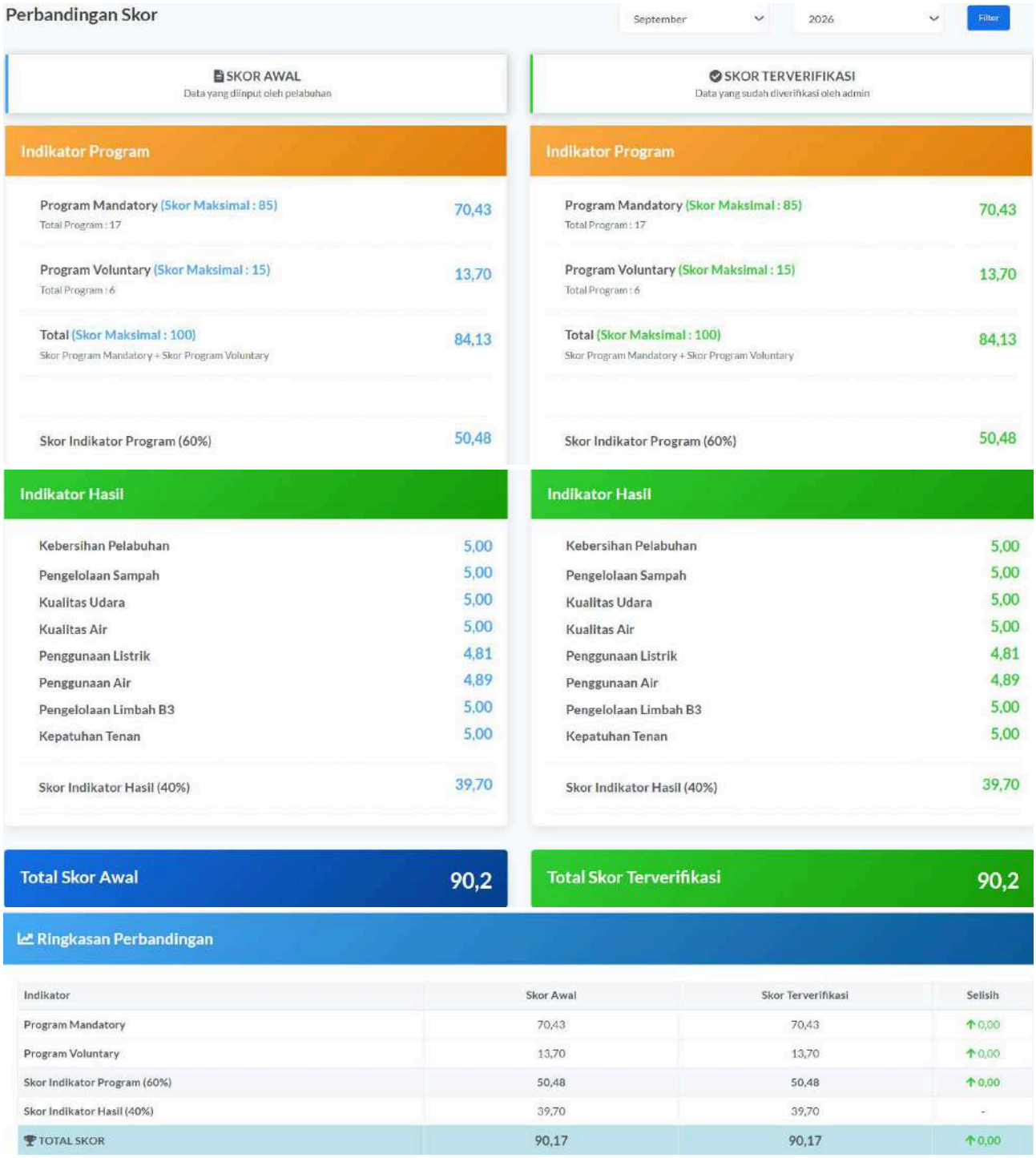
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bulan: Agustus 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bulan: September 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

REALIASI INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2026
PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
BERDASARKAN MASTER PLAN TAHUN 2007
PENTAHAPAN TAHUN 2008 s.d 2028

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Realisasi	Keterangan
A	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah**				
1	Perbaikan revetment kolam A	1	Unit	Sudah	
2	Pengerukan kolam A	1	Unit	Belum	
3	Pengerukan kolam B dan jalur pelayaran sampai kedalaman -3 dari LWS (-4,5 m dari MWL)	1	Unit	Sudah	
4	Perbaikan revetment kolam B	1	Unit	Belum	
5	Pembangunan pasar ikan higienis	1	Unit	Belum	
6	Peningkatan TPI Lama (peninggian atap dan lantai)	1	Unit	Sudah	
7	Pembangunan Pos Jaga	1	Unit	Sudah	
8	Pembangunan Cold Storage	1	Unit	Sudah	
9	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Sudah	
10	Pembangunan areal parkir pelabuhan	1	Unit	Sudah	
B	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan**				
1	Pematangan lahan areal pelabuhan bagian selatan	1	Unit	Sudah	
2	Pengerukan kolam C dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5m dari MWL)	1	Unit	Sudah	
3	Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m3	1	Unit	Sudah	
4	Pembangunan revetment dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum	
5	Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty	3	Unit	Sudah	
6	Pembangunan transit shield	1	Unit	Sudah	
7	Pembangunan jaringan air bersih	900	LS	Sudah	
8	Pembangunan MCK	2	Unit	Belum	
9	Pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum	
10	Pembangunan mushollah	1	Unit	Sudah	
11	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Sudah	
12	Pembangunan shelter nelayan	2	Unit	Belum	
13	Pembangunan kios pesisir/waserda	6	Unit	Sudah	
14	Pembangunan Jaringan Drainase	1	Unit	Sudah	
15	Pembangunan pagar keliling dermaga C	525	M	Sudah	
16	Pembangunan SPDN 2 pompa	1	Unit	Sudah	
17	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan	435	M1	Sudah	
C	**Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara**				
1	Pembangunan revetment konstruksi rubble mound	1	Unit	Sudah	
2	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Realisasi	Keterangan
3	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi aspal	3.267	M1	Belum	
4	Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian utara (Dermaga D) dengan konstruksi beton	1.085	M1	Belum	
5	Pembangunan cold storage (20m X 12m)	1	Unit	Sudah	
6	Pembangunan klinik dan laboratorium (15m X 12m)	2	Unit	Belum	
7	Pembangunan Pos jaga	1	Unit	Belum	
8	Pembangunan break water	1	Unit	Belum	
9	Pembangunan dermaga D dengan konstruksi concrete sheet pile	1	Unit	Belum	
10	Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
11	Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	2	Unit	Belum	
12	Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3	2	Unit	Belum	
13	Pembangunan MCK	3	Unit	Belum	
14	Pembangunan IPAL (Instalasi pengolahan Air Limbah)	2	Unit	Belum	
15	Pembangunan jaringan air bersih	3.267	M1	Belum	
16	Pembangunan mushollah	1	Unit	Belum	
17	Pengerukan kolam pelabuhan utara dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5 dari MWL)	1	Unit	Belum	
18	Pembangunan kantor pelayanan terpadu	1	Unit	Belum	
19	Pembangunan shelter nelayan	1	Unit	Belum	
20	Pembangunan kios pesisir/waserda	5	Unit	Belum	
21	Pembangunan areal parkir pelabuhan dan jaringan drainase	8.476	M2	Belum	
22	Pembangunan pagar keliling pelabuhan bagian utara (Dermaga D)	1	Unit	Belum	
23	Pembangunan rumah dinas tipe 72	2	Unit	Belum	
24	Pembangunan SPBU 2 pompa	1	Unit	Belum	
25	Pembangunan sarana olah raga	1	Unit	Belum	

Keterangan:

- Rencana pengendalian dan pengembangan fasilitas sesuai master plan sebanyak 52 fasilitas
- Realisasi pengendalian dan pengembangan fasilitas sebanyak 22 fasilitas
- Nilai persentase fasilitas yang telah dilakukan pengendalian dan pengembangan sebagai berikut:

$$= \frac{Realisasi}{Jumlah\ Fasilitas\ Sesuai\ Master\ Plan} \times 100$$

$$= \frac{22}{52} \times 100 \qquad = 42{,}31\%$$

Cilacap, 14 Oktober 2026
Ketua Tim Kerja
Tata Kelola Sarana Prasarana

Kushartanto A. Santosa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA DUKUNG LAPORAN KINERJA
TIM KERJA TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TRIWULAN III TAHUN 2026

IKU: Pengendalian Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di PPS Cilacap

A. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Tengah

1. Perbaikan Revetment Kolam A







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pengerukan Kolam A (belum)
3. Pengerukan kolam B dan jalur pelayaran sampai kedalaman -3 dari LWS (-4,5 m dari MWL) (belum)
4. Perbaikan revetment kolam B (belum)
5. Pembangunan pasar ikan higienis (belum)
6. Peningkatan TPI Lama





7. Pembangunan Pos Jaga



8. Pembangunan Cold Storage





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Pembuatan menara reservoir kapasitas 20m3



10. Pembangunan Area Parkir Pelabuhan



B. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Selatan

1. Pematangan lahan areal pelabuhan bagian Selatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pengerukan kolam C dan alur pelayaran sampai -5 LWS (-6,5m dari MWL) (belum)
3. Pengadaan kapal keruk kapasitas 100m3



4. Pembangunan Revetment dengan Konstruksi Concrete Sheet Pile





5. Pembangunan dermaga C dengan konstruksi jetty



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Pembangunan transit shield



7. Pembangunan jaringan air bersih



8. Pembangunan MCK (belum)
9. Pembangunan IPAL (belum)
10. Pembangunan mushollah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Pembangunan kantor pelayanan terpadu



12. Pembangunan Shelter Nelayan

13. Pembangunan kios pesisir/waserda



14. Jaringan Drainase





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15. Pembangunan pagar keliling dermaga C





16. Pembangunan SPDN 2 pompa





17. Pembangunan jalan akses pelabuhan bagian selatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. Fasilitas Operasional Pelabuhan Bagian Utara

1. Pembangunan Revetment Konstruksi Rubble Mount



2. Pengurugan dan pematangan lahan areal pelabuhan utara (Dermaga D)
3. Pembangunan cold storage (20m X 12m)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR : B.2454/PPSC/KS.320/IX/2026
NOMOR : 600.1.17.3/745/23

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELENGGARAAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN

Pada hari ini Kamis tanggal 3 (tiga) Bulan September Tahun dua ribu dua puluh enam (03-09-2026) bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **MAHRUS**
   Jabatan : **Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap**
   Alamat : **Jalan Lingkar Selatan Nomor 2 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Nomor 2 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

2. **Nama** : **ACHMAD NURLAELI**
   Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**
   Alamat : **Jalan M.T. Haryono Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
(1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kerja sama teknik, penyusunan rekomendasi teknis, bimbingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

teknis, dukungan teknis, standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan, pengujian dan sertifikasi sarana penangkapan ikan serta pemanfaatan sumber daya ikan termasuk dukungan manajerial perikanan tangkap;

(2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, pembinaan UPTD, dan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku;

(3) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan, visi, dan komitmen untuk menjalin kerja sama yang saling mendukung sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta mendukung penyelenggaraan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui kerja sama antarlembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

a. pemilahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penerimaan dan pengolahan sampah non-Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) atau bentuk pengolahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
d. pelaksanaan penimbangan, pencatatan, pelaporan, dan pertukaran data mengenai volume serta jenis sampah yang dikelola;
e. pelaksanaan administrasi pelayanan dan retribusi pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. koordinasi, konsultasi, dan pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang mendukung tujuan Perjanjian Kerja Sama dan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
   a. koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
   b. pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penerimaan, penimbangan, pencatatan, dan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. penyampaian data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
   d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala; dan
   e. penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui koordinasi dan musyawarah.

(2) Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;

(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 4
Tanggung Jawab Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
   a. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya serta menempatkan sampah pada wadah yang terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyediakan tempat penampungan sementara atau wadah sampah pada lokasi yang mudah dijangkau oleh sarana pengangkut, dengan kapasitas yang memadai sesuai volume sampah yang dihasilkan;
   c. mengumpulkan sampah yang berasal dari kegiatan operasional, sepanjang tidak termasuk sampah spesifik dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pada tempat penampungan yang telah disediakan;
   d. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c ke fasilitas pengolahan sampah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang disepakati; dan
   e. memastikan bahwa sampah yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak tercampur dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun jenis sampah lain yang tidak dapat diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
   a. menerima, menimbang, mencatat, dan mengolah sampah yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

atau bentuk pengolahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menolak penerimaan sampah yang tercampur dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau jenis sampah lain yang tidak sesuai dengan ketentuan;
c. melakukan pencatatan dan pendokumentasian volume atau tonase sampah yang diterima dari **PIHAK KESATU** sebagai dasar pelaporan dan administrasi;
d. menerbitkan rekapitulasi tagihan retribusi pelayanan pengelolaan sampah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyampaikan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
Pembiayaan

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang berlaku;
(3) **PIHAK KEDUA** menerbitkan dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada **PIHAK KESATU** setelah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima; dan
(4) Dalam hal terjadi perubahan tarif retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan pelaksanaan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memerlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Kahar

(1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
(2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut, dan

(4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7
Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.

(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan, perubahan, atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pengadilan Negeri Cilacap.
(3) Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak berkaitan dengan hal yang menjadi objek perselisihan.

Pasal 10
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap,
Alamat : Jalan Lingkar Selatan No.2, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap
E-mail : ppsc.cilacap@kkp.go.id
Telepon : (0282) 532686
Faximili : (0282) 532688

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan M.T. Haryono No.79, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
E-mail : dlhcilacap@gmail.com
Telepon : (0282) 533703
Faximili : -

Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan/korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
Perubahan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini,

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ACHMAD NURLAELI	**MAHRUS**

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELENGGARAAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN

NOMOR: B.2454/PPSC/KS.320/IX/2026
NOMOR: 600.1.17.3/745/23

No.	Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target Output	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahap Pelaksanaan	Pemilahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan sampah	Sampah	Seminggu 2 kali	Pihak Kesatu	
		Penerimaan dan pengolahan sampah non-Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) atau bentuk pengolahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku	*Refuse Derived Fuel* (RDF) atau bentuk pengolahan lain	Seminggu 2 kali	Pihak Kedua	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target Output	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan sarana pengangkutan sampah	Kendaraan	Seminggu 2 kali	Pihak Kesatu	
		Penimbangan, pencatatan, pelaporan, dan pertukaran data mengenai volume serta jenis sampah yang dikelola	Data	Seminggu 2 kali	Para Pihak	
		Administrasi pelayanan dan retribusi pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tagihan/invoice retribusi pengelolaan sampah	Setiap Bulan	Pihak Kedua	
		Pembayaran retribusi pengelolaan sampah	Bukti pembayaran/setor ke Pemerintah Daerah	Setiap Bulan	Pihak Kesatu	
		Koordinasi, konsultasi, dan pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah	Informasi	Pada saat diperlukan	Para Pihak	
2	Monitoring dan Evaluasi	Peninjauan berkala terkait program dan kendala	Laporan Evaluasi Semesteran	Semesteran	Para Pihak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Target Output	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelaporan akhir	Penyusunan laporan keseluruhan hasil kerja sama	Dokumen Laporan Akhir	Tahunan	Para Pihak	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 3 September 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Achmad Nurlaeli

PIHAK KESATU
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Cilacap

Mahrus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1569/PPSC/TU.140/X/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama lingkup Tim Kerja Kesyahbandaran Triwulan III Tahun 2026
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 5 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada Tim Kerja Kesyahbandaran dengan periode pengukuran Triwulan III sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang Optimal dan Bertanggung Jawab

   1. IKU.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)

      Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah Persetujuan Berlayar (PB) yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

      Pengukuran kinerja Tingkat Pelayananan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan secara tahunan.

2. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

   2.1 IKU.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

      Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

      Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (surat ukur dan/atau sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini merupakan IKU dengan periode pengukuran triwulanan.

IKU	Target 2026	Realisasi Sd TW III 2026	Capaian (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.323	1.361	102.87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU	Target 2025	Realisasi S.d TW III 2025	Capaian (%)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	680	1.283	188,68

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TW III tahun 2025, penerbitan SKKP mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya migrasi kapal perijinan daerah ke perijinan pusat. Penerbitan SKKP Triwulan III seluruhnya dilakukan dengan mekanisme Online melalui aplikasi SICEFI serta PPKKP dapat melakukan pemeriksaan secara bergantian disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat adanya permohonan penerbitan SKKP dari pemilik kapal yang telah tersampaikan.

2.2 IKU.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini memiliki periode pengukuran semesteran.

IKU	Target 2026	Realisasi S.d SM I 2026	Capaian (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28 (kategori cukup)	0,50	178,57

IKU	Target 2025	Realisasi S.d SM I 2025	Capaian (%)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26 (kategori cukup)	0,36	119,23

Capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai) telah dilaksanakan secara optimal. Realisasi pada Semester I bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan.

Kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 Mill sebagian besar telah melakukan migrasi ke Izin kewenangan Pusat mengakibatkan meningkatnya pemenuhan sertifikasi awak kapal perikanan termasuk kepemilikan Buku Kapal Perikanan,

Matriks capaian dan dukung pengukuran IKU periode Triwulan III Tahun 2026 terlampir kami sampaikan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Ditandatangani Secara Elektronik

Dwiharto Kurniawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
JANUARI	70	37	41	0
FEBUARI	80	38	49	11
MARET	73	39	60	4
APRIL	73	46	36	6
MEI	92	41	39	5
JUNI	44	50	6	1
JULI	70	39	8	1
AGUSTUS	21	35	5	13
SEPTEMBER	28	37	5	13
OKTOBER	25	21	4	
NOVEMBER	8	13	2	
DESEMBER	16	38	18	
JUMLAH	600	434	273	54
TOTAL	1.361			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1309/PPSC/PI.210/VIII/2026

Yth.	:	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Dari	:	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lampiran	:	Satu Lembar
Hal	:	Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan SKKP Perizinan Daerah
Tanggal	:	4 Agustus 2026

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan Juli Tahun 2026 Sebanyak 1 (Satu) permohonan. Pemilik Kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 1 (Satu) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian kami isampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik
Mahrus

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1309/PPSC/PI.210/VIII/2026
Tanggal : 4 Agustus 2026

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Periode : Juli 2026

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	SATYA JAYA 02	PONIMAN	17	B.030/PPSC/PI.210/VII/2026	13/07/2026	Yusvi Widya Ardiana, S.E	Pancing Ulur	Pembaruan Serftifikat

Ditandatangani
Secara Elektronik
Mahrus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1447/PPSC/PI.210/IX/2026

Yth.	:	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Dari	:	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lampiran	:	Satu Lembar
Hal	:	Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan SKKP Perizinan Daerah
Tanggal	:	2 September 2026

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan Agustus tahun 2026 sebanyak 13 (tiga belas) permohonan. Pemilik kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 13 (tiga belas) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik
Mahrus

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1447/PPSC/PI.210/IX/2026
Tangga : 2 September 2026

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Periode : Agustus 2026

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	CHARLY WIJAYA	OEY GIOK HWA	26	B.032/PPSC/PI.210/VIII/2026	05/08/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Pembaruan Sertifikat
2	ZALFAASHA	ARDI SUYATNO	6	B.031/PPSC/PI.210/VIII/2026	05/08/2026	Dian Prihantara	Pancing ulur	Pembaruan Sertifikat
3	ISTIQOMAH	EXPRIYANTO	6	B.033/PPSC/PI.210/VIII/2026	06/08/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
4	CALISTA JAYA	AGUS SUDRAJAT	6	B.034/PPSC/PI.210/VIII/2026	26/08/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
5	DEWA RUCI	EXPRIYANTO	6	B.035/PPSC/PI.210/VIII/2026	26/08/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
6	Putra Hail	ARMAN FERMANZA	6	B.036/PPSC/PI.210/VIII/2026	26/08/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
7	DWI NOVI	TOFIK KRISTIYANTO	6	B.037/PPSC/PI.210/VIII/2026	26/08/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
8	SRI MULYA 02	TURINO AL HARTONO SETU	6	B.038/PPSC/PI.210/VIII/2026	27/08/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
9	ANDIKA JAYA	ARDI	6	B.040/PPSC/PI.210/VIII/2026	27/08/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
10	NURANI 02	BEI ARIFIN	6	B.041/PPSC/PI.210/VIII/2026	27/08/2026	Dian Prihantara	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
11	Aroma hasil	TUWON AL WARTO	6	B.042/PPSC/PI.210/VIII/2026	27/08/2026	Robiarsa Wahyu Winarno	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
12	Binangun 9	TURYADI	6	B.039/PPSC/PI.210/VIII/2026	27/08/2026	Robiarsa Wahyu Winarno	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
13	Waluyo Jati	TIGUR	6	B.043/PPSC/PI.210/VIII/2026	31/08/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat

Ditandatangani
Secara Elektronik
Mahrus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1568/PPSC/PI.210/X/2026

Yth.	:	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Dari	:	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Lampiran	:	Satu Lembar
Hal	:	Penyampaian Rekapitulasi Penerbitan SKKP Perizinan Daerah
Tanggal	:	5 Oktober 2026

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikan Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada bulan September 2026 sebanyak 13 (tiga belas) permohonan. Pemilik Kapal perikanan yang telah mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 13 (tiga belas) kapal serta telah diterbitkan sertifikatnya (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik
Mahrus

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1568/PPSC/PI.210/X/2026
Tangga : 5 Oktober 2026

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

Unit Kerja : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Periode : September 2026

No	Nama Kapal	Nama Pemilik	Ukuran Kapal (GT)	No. Sertifikat	Tanggal Terbit	PPKKP	Jenis API	Keterangan
1	BINTANG SUKSES 2	DWI ANDRI OKTAVIAN	21	B.044/PPSC/PI.210/IX/2026	07/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing ulur	Pembaruan_sertifikat
2	DEVINTA	TUSLAM	6	B.046/PPSC/PI.210/IX/2026	10/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang berlapis	Penerbitan Baru Sertifikat
3	DEVINTA II	TUSLAM	6	B.047/PPSC/PI.210/IX/2026	10/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang berlapis	Penerbitan Baru Sertifikat
4	KAILA PUTRI	SUROSO	6	B.050/PPSC/PI.210/IX/2026	15/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
5	KM.DELIMA JAYA 1	JAMPEN	6	B.049/PPSC/PI.210/IX/2026	15/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
6	PUTRA HARAPAN JAYA	PAIMIN	6	B.053/PPSC/PI.210/IX/2026	16/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
7	BINTANG TIMUR	ROMADIANTO	6	B.055/PPSC/PI.210/IX/2026	28/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
8	AZAM JAYA 3	SUPARTO	6	B.056/PPSC/PI.210/IX/2026	28/09/2026	Agung Ferieigha Nugroho	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
9	AZZAM JAYA I	SUPARTO	6	B.045/PPSC/PI.210/IX/2026	10/09/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
10	BERKAH MARSAH 01	ISAH	6	B.048/PPSC/PI.210/IX/2026	12/09/2026	Dian Prihantara	Jaring insang hanyut	Penerbitan Baru Sertifikat
11	WAHYU JAYA MANDIRI I	PRIYONO	6	B.052/PPSC/PI.210/IX/2026	16/09/2026	Dian Prihantara	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
12	ALVINO PUTRA JAYA	TIARA SIKSANTI	6	B.051/PPSC/PI.210/IX/2026	16/09/2026	Dian Prihantara	Pancing ulur	Penerbitan Baru Sertifikat
13	ANTON JAYA I	SUJASMAN	25	B.054/PPSC/PI.210/IX/2026	22/09/2026	Yusvi Widya Ardiana	Jaring insang hanyut	Pembaruan_sertifikat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NOTA DINAS
NOMOR 1593/PPSC/TU.140/X/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
Dari : Kepala Subbagian Umum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian Kinerja dan Data Dukung IKU Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 13 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2026, terlampir kami laporkan capaian kinerja Dukungan Manajerial sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)
   - Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	86	100	116,28

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 116,28%.

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah :

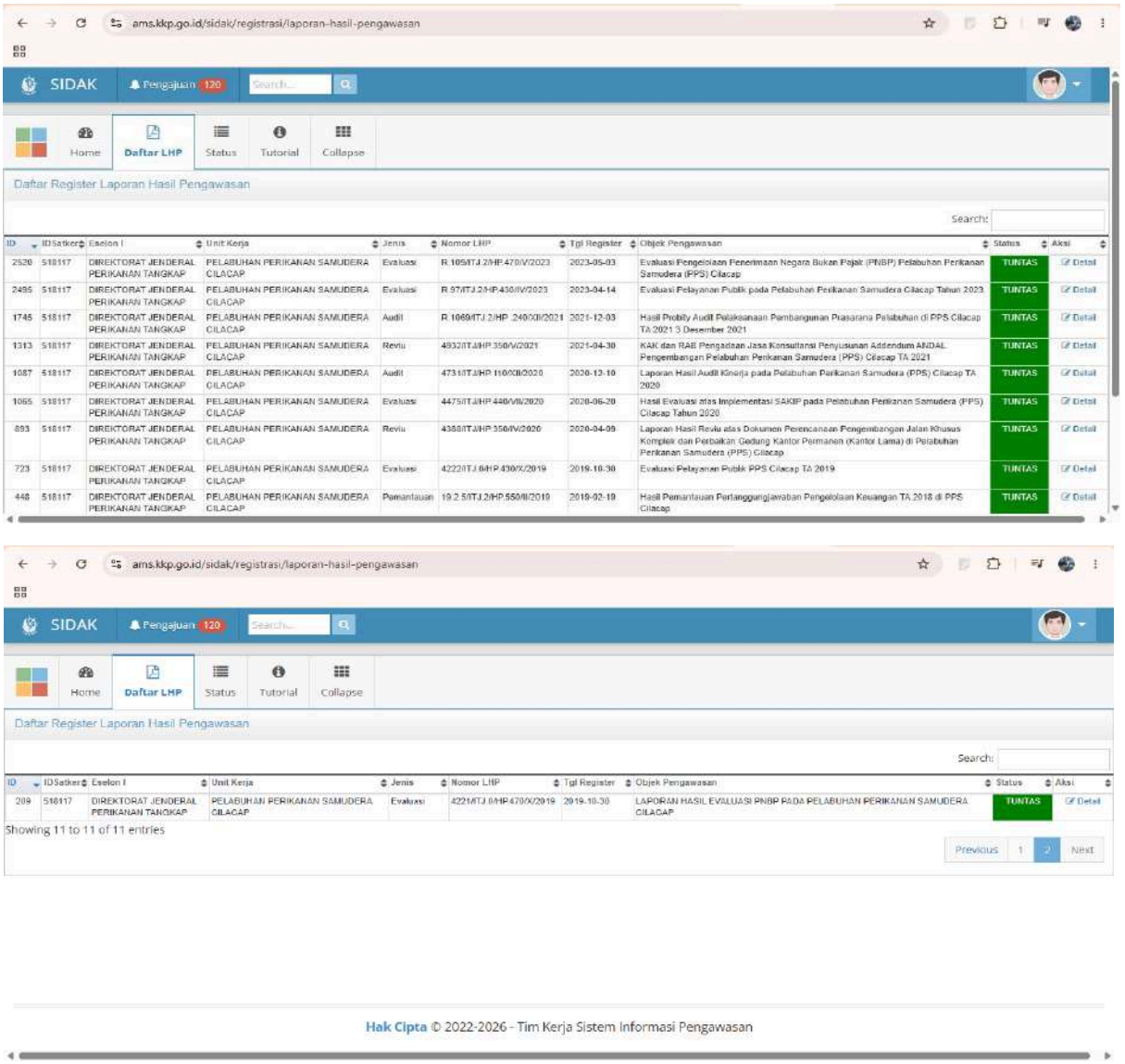
IKU	REALISASI TW III TA 2025	REALISASI TW III TA 2026	NAIK/TURUN (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen)	100	100	-

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% karena belum adanya pengawasan yyang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Terlampir disampaikan screenshoot dari Aplikasi Sidak KKP yang menunjukan seluruh rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal telah titindaklanjuti dengan status Tuntas.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)
   - Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)

     Beberapa kali PPS Cilacap melakukan revisi dan penyesuaian dalam perencanaan angggaran dan telah di tindaklanjuti dengan perubahan RUP dan semuanya sudah diinput dengan nilai 100%. Pagu Pengadaan PPS Cilacap sebesar Rp. 106.421.616.000,- dan telah terumumkan sebesar Rp. 106.421.616.000,- sehinggga tidak ada selisih dan prosentase RUP terumumkan sebesar 100%.

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)	77	100	129,87

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sama sam 100%:

IKU	REALISASI TW III TA 2025	REALISASI TW III TA 2026	NAIK/TURUN (%)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan	100	100	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perikanan Samudera Cilacap (persen)			

3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)
   - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
   - Pelaksanaan SKM di PPS Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik PPS Cilacap.
   - Survei dilakukan secara periodik yaitu setiap triwulan dengan pendekatan kualitatif yang diukur menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Dengan menggunakan skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pengumpulan data pada Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui pengisian kuesioner (melalui aplikasi SKM) serta wawancara tatap muka kepada pengguna layanan.
   - Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut:
     1. Persyaratan
     2. Prosedur
     3. Waktu Pelayanan
     4. Biaya / Tarif
     5. Produk Layanan
     6. Kompetensi Pelaksana
     7. Perilaku Pelaksana
     8. Sarana dan Prasarana
     9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil SKM pada Triwulan III adalah :

IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	88,8	95,06	107,05

Hasil SKM pada Triwulan III Tahun 2026 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 95,06 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK.
Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data untuk 12 jenis pelayanan.

Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah :

IKU	REALISASI TW III TA 2025	REALISASI TW III TA 2026	NAIK/TURUN
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai)	92,91	95,06	2,31

Dalam pelaksanaan SKM pada Triwulan III tahun 2026 ini dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan publik di PPS Cilacap secara umum menunjukkan kualitas kinerja pelayanan SANGAT BAIK;
b. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai SANGAT BAIK. Namun demikian, dua unsur dengan nilai terendah tetap dimasukkan dalam prioritas perbaikan;
c. Tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah kemudahan fitur/kemampuan petugas, persyaratan pelayanan, dan kemudahan prosedur.

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukungnya. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Sigit Purwoko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERHITUNGAN IKU TW II 2026

		JML REKOM	TL REKOM	%			-		86%	-18,84	
IKU TW II	OKTOBER 2025 - Juni 2026	406	368	**90,64%**							
		127	406	284.579.798	108	368	257.856.183	19	38	26.723.615	

No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket	
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OKTOBER 2025															
1	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.413/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	5	16	-	4	14	-	1	2	-	**PROSES**	T.413/ITJ.2/HP.470/X/2025
2	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.417/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2025	1	4	-	1	4	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.417/ITJ.2/HP.380/X/2025
3	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.418/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024-2025	5	25	-	3	22	-	2	3	-	**PROSES**	T.418/ITJ.2/HP.470/X/2025
4	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	T.450/ITJ.2/HP.550/X/2025	Hasil Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	2	4	-	2	4	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.450/ITJ.2/HP.550/X/2025
5	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.482/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2026	4	7	-	4	7	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.482/ITJ.2/HP.380/X/2025
NOVEMBER 2025															
6	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.505/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Rencana Perbaikan Ulang Kapal Hasil Rampasan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.	2	4	-	2	4	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.505/ITJ.2/HP.380/XI/2025
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.507/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain dan Penjualan atas 24 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengambengan.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.507/ITJ.2/HP.380/XI/2025
8	Reviu	DIT KAPI	T.508/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Kapal Penangkap Ikan dalam Rangka Mendukung Program Bantuan KNMP TA 2025 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2	2	-	2	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.508/ITJ.2/HP.380/XI/2025
9	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.510/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Aset yang Tidak Ditemukan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Provinsi Maluku	1	3	-	1	3	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.510/ITJ.2/HP.380/XI/2025
10	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.517/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 28 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengambengan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.517/ITJ.2/HP.380/XI/2025
11	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.519/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Usulan Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 2 (dua) Unit BMN Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Provinsi Bali.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.519/ITJ.2/HP.380/XI/2025
12	Reviu	PPP TELUK BATANG	T.545/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Draft Perjanjian Penggunaan Tanah di PPP Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.545/ITJ.2/HP.380/XI/2025
DESEMBER 2025															
13	Reviu	DIT KP	T.590/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Laporan Pengawasan Pasar Ikan Tiakur Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SKPT Moa	1	2	-	1	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.590/ITJ.2/HP.380/XII/2025
14	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.631/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu atas atas Usulan Tambahan Rincian Output/RO Kegiatan Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I Pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025	1	2	-	1	2	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.631/ITJ.2/HP.380/XII/2025
15	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.761/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran penambahan Rincian Output (RO) Khusus lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 di Prov. DKI Jakarta	1	4	-	1	4	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.761/ITJ.2/HP.380/XII/2025
16	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.793/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu terhadap Usulan Penghapusan BMN yang terdampak rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan di PPN Kejawanan melalui PHLN Lender Islamic Development Bank (IsDB)	1	4	-	1	4	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.793/ITJ.2/HP.380/XII/2025
JANUARI 2026															
17	Reviu	PPS NIZAM ZACHMAN	T.1/ITJ.2/HP.380/I/2026	Hasil Reviu terhadap aset yang berasal dari pelimpahan Eks Departemen Pertanian pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	1	1	-	-	-	-	1	1	-	**PROSES**	T.1/ITJ.2/HP.380/I/2026
18	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.19/ITJ.2/HP.380/I/2026	Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) TA 2025 pada Ditjen Perikanan Tangkap	1	16	-	1	16	-	-	-	-	**TUNTAS**	T.19/ITJ.2/HP.380/I/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.42/ITJ.2/HP.380/I/2026	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jendera	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS	T.42/ITJ.2/HP.380/I/2026
20	Reviu	DIT KAPI	T.48/ITJ.2/HP.380/I/2026	Hasil Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Bantuan KNMP Berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT TA 2025 Klaster B	1	1	13.358.750	1	1	13.358.750	-	-	-	TUNTAS	T.48/ITJ.2/HP.380/I/2026
FEBRUARI 2026															
21	Reviu	DIT KAPI	T.87/ITJ.2/HP.380/II/2026	Hasil Reviu atas Permohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Bantuan KNMP Berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT TA 2025 Klaster A2	1	1	3.807.394	1	1	3.807.394	-	-	-	TUNTAS	T.87/ITJ.2/HP.380/II/2026
22	Reviu	DIT KP	T.97/ITJ.2/HP.380/II/2026	Hasil Reviu atas Pembayaran Termin IV Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Struktur Seawall Pelabuhan Perikanan (PP) Tiakur SKPT Moa	1	1	45.600.808	1	1	45.600.808	-	-	-	TUNTAS	T.97/ITJ.2/HP.380/II/2026
23	Reviu	DIT KP	T.102/ITJ.2/HP.380/II/2026	Hasil Reviu atas Perbaikan Laporan Pengawasan Berkala Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan SKT Moa	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS	T.102/ITJ.2/HP.380/II/2026
MARET 2026															
24	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.119/ITJ.2/HP.380/III/2026	Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 pada Ditjen Perikanan Tangkap	8	8	-	8	8	-	-	-	-	TUNTAS	T.119/ITJ.2/HP.380/III/2026
APRIL 2026															
25	Reviu	DIT KP	T.184/ITJ.2/HP.380/IV/2026	Hasil Reviu Dokumen Penyediaan Jasa Konsultasi Sertifikasi ISO 14001:2015 pada 11 Pelabuhan Perikanan Melalui Pembiayaan Hibah Terencana Proyek Eco Fishing Port	6	6	-	6	6	-	-	-	-	TUNTAS	
26	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.188/ITJ.2/HP.380/IV/2026	Hasil Reviu atas Tunggakan Pembayaran Kontraktual Tahun Anggaran 2025 pada Ditjen Perikanan Tangkap di Prov. DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS	
27	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.215/ITJ.2/HP.380/IV/2026	Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran Penghematan Belanja dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2026	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS	
MEI 2026															
28	Audit	PPN SUNGAILIAT	T.282/ITJ.2/HP.380/V/2026	Hasil Audit Operasional Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2026	7	28	5.576.144	6	26	5.576.144	1	2	-	PROSES	
29	Audit	PPN TANJUNGPANDAN	T.284/ITJ.2/HP.130/V/2026	Hasil Audit Operasional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan Tahun Anggaran 2025-2026	6	30	23.619.195	4	21	23.619.195	2	9	-	PROSES	
JUNI 2026															
30	Reviu	DIT KAPI	T.336/ITJ.2/HP.380/VI/2026	Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT Paket I (Kota Padang, Sumatera Barat)	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS	
31	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.338/ITJ.2/HP.380/VI/2026	Hasil Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan Modernisasi Kapal Perikanan TA 2026 di Prov. DKI Jakarta	4	6	-	4	6	-	-	-	-	TUNTAS	
32	Reviu	DIT KP	T.352/ITJ.2/HP.380/VI/2026	Hasil Reviu atas Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Port Management Operation Consultant (PMOC) Proyek IFP-IFM Phase I (IDN-1055	4	14	-	4	14	-	-	-	-	TUNTAS	
33	Audit	PPS Bungus	T.232/ITJ.1/HP.130/V/2026	Hasil Audit Operasional TA 2025 dan TA 2026 pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Provinsi Sumatera Barat	5	24	108.180.634	1	14	94.593.678	4	10	13.586.956	PROSES	
34	Audit	PPN AMBON	T.375/ITJ.3/HP.110/V/2026	Audit Operasional TA 2025 - 2026 Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon	7	28	863.920	6	26	863.920	1	2	-	PROSES	
35	Audit	PPN TUAL	T.402/ITJ.3/HP.110/V/2026	Hasil Audit (LHA) Operasional TA 2025-2026 Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual	5	20	75.842.906	2	17	62.706.247	3	3	13.136.659	PROSES	
36	Audit	PPN PEMANGKAT	T.759/ITJ.5/HP.130/V/2026	Laporan Hasil Audit Operasional pada PPN Pemangkat Tahun 2026	4	9	-	3	8	-	1	1	-	PROSES	
37	Audit	PPS BELAWAN	T.889/ITJ.5/HP.130/VI/2026	Audit Operasional pada PPS Belawan Tahun Anggaran 2025-2026	11	34	5.398.226	10	33	5.398.226	1	1	-	PROSES	
38	Audit	PPP TELUK BATANG	T.845/ITJ.5/HP.130/VI/2026	Laporan Hasil Audit Operasional pada PPP Teluk Batang Tahun Anggaran 2025-2026	6	24	1.122.000	5	23	1.122.000	1	1	-	PROSES	
39	Audit	PPN SIBOLGA	T.984/ITJ.5/HP.130/VI/2026	Audit Operasional pada PPN Sibolga Tahun Anggaran 2025-2026	6	29	232.229	5	26	232.229	1	3	-	PROSES	
40	Audit	PPN KARANGANTU	B.416/ITJ.4/HP.130/VI/2026	Hasil Audit Operasional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu TA 2025 – 2026	8	32	977.592	8	32	977.592	-	-	-	TUNTAS	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1059/SJ.7/PL.410/X/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 12 Oktober 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi **SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)** merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** beserta perubahannya.
2. Hasil rekapitulasi capaian IKU persentase RUP terumumkan dari **160 (seratus enam puluh) satuan kerja pengelola DIPA aktif** sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan III sampai dengan waktu *cut off* tanggal **8 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB** adalah sebesar **99,85%** (daftar rekapitulasi terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berdasarkan data sesuai dengan hasil rekapitulasi capaian IKU RUP Triwulan III Tahun Anggaran 2026, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mencapai 100% pengisian RUP. Diminta agar segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran sehingga capaian IKU dapat optimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor	Kode Eselon I	Nama Unit Eselon I	∑ Satker	Belanja Pengadaan (Rp)	Total RUP (Rp)	Selisih Belanja (Rp)	% Pengisian RUP TW-III	Target IKU TW-III	Capaian IKU TW-III	Keterangan Capaian
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	96,882,124,000	96,882,124,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
2	01	Sekretariat Jenderal	3	13,716,776,000	13,716,776,000	-	100.00%	82.00	100.00	Target capaian maksimal
3	02	Inspektorat Jenderal	1	8,895,902,000	8,895,902,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
4	08	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,39,141,387,000	1,339,141,387,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
5	07	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	5	87,067,348,750	87,067,348,750	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
6	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,779,419,000	1,615,810,238,700	(666,180,300)	99.94%	77.00	99.94	Melebihi target capaian
7	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	9,647,942,360,800	9,641,512,557,800	(6,426,803,000)	99.93%	77.00	96.72	Melebihi target capaian
8	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	2,115,035,281,804	2,104,354,288,804	(10,680,663,000)	99.49%	77.00	99.49	Melebihi target capaian
9	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	668,769,038,301	664,895,096,301	(3,873,642,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
10	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	182,295,351,999	181,239,541,666	(1,055,810,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
TOTAL			***160***	***15,776,524,989,654***	***15,753,515,261,354***	***(23,009,728,300)***	***99.85%***	***Melebihi target capaian***		

Ditandatangani Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	86,599,250,000	89,599,250,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	7,282,874,000	7,282,874,000	**100.00%**
TOTAL		**96,882,124,000**	**96,882,124,000**	**100.00%**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,716,776,000	13,716,776,000	**100.00%**
2	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,494,073,000	8,464,073,000	**100.00%**
3	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	273,608,200,000	273,608,200,000	**100.00%**
TOTAL		**295,819,049,000**	**295,819,049,000**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	INSPEKTORAT JENDERAL	8,895,902,000	8,895,902,000	**100.00%**
TOTAL		**8,895,902,000**	**8,895,902,000**	**100.00%**

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	20,652,073,000	20,652,073,000	**100.00%**
2	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	26,313,105,000	26,313,105,000	**100.00%**
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	25,438,501,000	25,438,501,000	**100.00%**
4	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	26,056,233,000	26,056,233,000	**100.00%**
5	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,240,681,475,000	1,240,681,475,000	**100.00%**
TOTAL		**1,339,141,387,000**	**1,339,141,387,000**	**100.00%**

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG	3,529,457,000	3,529,457,000	**100.00%**
2	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG	5,118,003,000	5,118,003,000	**100.00%**
3	BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR	2,617,680,000	2,617,680,000	**100.00%**
4	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	73,384,537,750	73,384,537,750	**100.00%**
5	BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG	2,417,671,000	2,417,671,000	**100.00%**
TOTAL		**87,067,348,750**	**87,067,348,750**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000	21,094,321,000	**100.00%**
2	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA	15,234,749,000	15,234,749,000	**100.00%**
3	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	8,923,976,000	8,923,976,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	9,677,902,000	9,677,902,000	**100.00%**
5	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	**100.00%**
6	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000	18,599,397,000	**100.00%**
7	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	6,569,187,000	6,569,187,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN CILACAP	15,695,186,000	15,695,186,000	**100.00%**
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000	20,336,525,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	**100.00%**
11	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO	21,040,598,000	21,040,598,000	**100.00%**
12	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	9,766,944,000	9,766,944,000	**100.00%**
13	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK	6,915,925,000	6,915,925,000	**100.00%**
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,413,455,296,000	1,413,195,868,700	**99.98%**
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	13,807,259,000	13,097,506,000	**94.86%**
TOTAL		**1,616,779,419,000**	**1,615,810,238,700**	**99.94%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,904,204,000	1,904,204,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	4,275,043,000	4,275,043,000	**100.00%**
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,165,692,000	2,165,692,000	**100.00%**
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,799,006,000	1,799,006,000	**100.00%**
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	**100.00%**
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000	3,847,978,000	**100.00%**
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	**100.00%**
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000	4,975,769,000	**100.00%**
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,421,616,000	106,421,616,000	**100.00%**
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,037,402,000	2,037,402,000	**100.00%**
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	**100.00%**
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,509,317,000	76,509,317,000	**100.00%**
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000	29,534,148,000	**100.00%**
14	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,412,138,000	8,412,138,000	**100.00%**
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000	277,757,594,000	**100.00%**
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,181,747,000	3,181,747,000	**100.00%**
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,536,779,000	3,536,779,000	**100.00%**
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	**100.00%**
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000	367,160,664,000	**100.00%**
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,638,195,000	43,638,195,000	**100.00%**
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	**100.00%**
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,685,809,000	5,777,523,000	**101.61%**
23	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	8,685,660,211,800	8,679,142,645,800	**99.92%**
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000	2,884,264,000	**99.86%**
TOTAL		**9,647,942,360,800**	**9,641,512,557,800**	**99.93%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,587,185,000	1,587,185,000	**100.00%**
2	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,271,802,000	5,271,802,000	**100.00%**
3	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,196,990,000	1,196,990,000	**100.00%**
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,260,034,000	13,260,034,000	**100.00%**
5	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,861,393,000	5,861,393,000	**100.00%**
6	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	14,438,756,000	14,438,756,000	**100.00%**
7	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	420,979,853,701	420,979,853,701	**100.00%**
8	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	3,778,653,000	3,778,653,000	**100.00%**
9	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,230,584,600	2,230,584,600	**100.00%**
10	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	1,677,362,000	1,677,362,000	**100.00%**
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,853,387,000	2,853,387,000	**100.00%**
12	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,050,784,000	1,050,784,000	**100.00%**
13	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	32,647,914,000	32,647,914,000	**100.00%**
14	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,184,129,000	5,184,129,000	**100.00%**
15	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	752,397,000	752,397,000	**100.00%**
16	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	1,933,287,000	1,933,287,000	**100.00%**
17	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	2,764,180,000	2,764,180,000	**100.00%**
18	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,136,163,000	3,136,163,000	**100.00%**
19	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	3,905,239,000	3,905,239,000	**100.00%**
20	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,622,295,000	4,622,295,000	**100.00%**
21	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,374,487,000	2,374,487,000	**100.00%**
22	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,008,432,000	1,008,432,000	**100.00%**
23	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000	1,852,257,000	**100.00%**
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,439,233,000	2,439,233,000	**100.00%**
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	2,216,173,000	2,216,173,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,729,828,000	2,729,828,000	**100.00%**
27	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,343,214,000	1,343,214,000	**100.00%**
28	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	3,906,227,000	3,906,227,000	**100.00%**
29	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,739,060,000	1,739,060,000	**100.00%**
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	12,459,990,000	12,459,990,000	**100.00%**
31	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000	835,677,000	**100.00%**
32	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,007,079,000	6,007,079,000	**100.00%**
33	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	40,317,914,000	40,317,914,000	**100.00%**
34	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,073,283,000	12,073,283,000	**100.00%**
35	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,078,558,000	3,078,558,000	**100.00%**
36	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	2,618,683,000	2,618,683,000	**100.00%**
37	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,948,436,000	4,948,436,000	**100.00%**
38	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,523,434,000	27,523,434,000	**100.00%**
39	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	566,529,000	566,529,000	**100.00%**
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	2,308,281,000	2,308,281,000	**100.00%**
41	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,028,502,000	1,028,502,000	**100.00%**
42	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	6,261,373,000	2,387,431,000	**38.13%**
TOTAL		**668,769,038,301**	**664,895,096,301**	**99.42%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,051,369,000	16,051,369,000	**100.00%**
2	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,154,781,000	9,154,781,000	**100.00%**
3	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,122,214,000	6,122,214,000	**100.00%**
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	**100.00%**
5	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000	15,769,606,000	**100.00%**
6	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	140,988,207,000	140,988,207,000	**100.00%**
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	**100.00%**
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	25,928,799,000	25,928,799,000	**100.00%**
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	13,605,630,000	13,605,630,000	**100.00%**
10	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,537,862,000	3,537,862,000	**100.00%**
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,335,332,000	48,335,332,000	**100.00%**
12	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	33,005,352,000	33,005,352,000	**100.00%**
13	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	16,607,106,000	16,607,106,000	**100.00%**
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	18,975,478,000	18,975,478,000	**100.00%**
15	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1,730,218,755,804	1,720,802,244,804	**99.46%**
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	11,369,892,000	10,105,410,000	**88.88%**
TOTAL		**2,115,035,281,804**	**2,104,354,288,804**	**99.49%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	**100.00%**
2	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	264,756,000	264,756,000	**100.00%**
3	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	19,533,496,000	19,533,496,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	195,176,000	195,176,000	**100.00%**
5	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	922,433,000	922,433,000	**100.00%**
6	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	2,131,730,000	2,131,730,000	**100.00%**
7	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	1,263,624,000	1,263,624,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	**100.00%**
9	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	748,892,000	748,892,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	758,484,000	758,484,000	**100.00%**
11	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	872,480,000	872,480,000	**100.00%**
12	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	**100.00%**
13	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	**100.00%**
14	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	**100.00%**
15	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	23,377,763,000	23,377,763,000	**100.00%**
16	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	903,509,000	903,509,000	**100.00%**
17	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	996,270,000	996,270,000	**100.00%**
18	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	853,490,000	853,490,000	**100.00%**
19	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	705,319,000	705,319,000	**100.00%**
20	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	784,570,000	784,570,000	**100.00%**
21	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	444,470,000	444,470,000	**100.00%**
22	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	160,800,000	160,800,000	**100.00%**
23	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	**100.00%**
24	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	769,468,000	769,468,000	**100.00%**
25	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	726,519,000	726,519,000	**100.00%**
27	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	2,245,305,000	2,245,305,000	**100.00%**
28	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	954,088,000	954,088,000	**100.00%**
29	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	1,026,225,000	1,026,225,000	**100.00%**
30	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	1,439,853,000	1,439,853,000	**100.00%**
31	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	800,304,000	800,304,000	**100.00%**
32	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	**100.00%**
33	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	**100.00%**
34	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	**100.00%**
35	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	**100.00%**
36	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	493,789,000	493,789,000	**100.00%**
37	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	621,746,000	621,746,000	**100.00%**
38	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	753,105,000	753,105,000	**100.00%**
39	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	1,057,654,000	1,057,654,000	**100.00%**
40	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	388,074,000	388,074,000	**100.00%**
41	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	380,500,000	380,500,000	**100.00%**
42	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	397,648,000	397,648,000	**100.00%**
43	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	222,385,999	222,385,999	**100.00%**
44	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	132,060,000	132,060,000	**100.00%**
45	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	**100.00%**
46	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	2,027,441,000	2,027,441,000	**100.00%**
47	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,385,470,000	99,329,660,000	**98.95%**
TOTAL		**182,295,351,999**	**181,239,541,999**	**99.42%**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

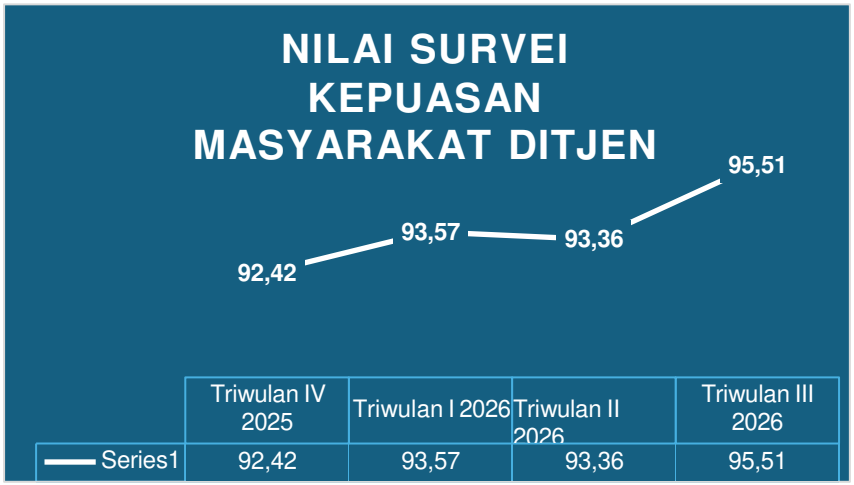
NOTA DINAS
NOMOR 2682/DJPT.1/OT.710/X/2026

Yth. : Ketua Tim Kerja Program
Dari : Ketua Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Analisis Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan III Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hasil berikut sebagai bahan penyusunan laporan kinerja:

1. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. SKM mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana;
2. Penguncian data dilakukan lebih cepat untuk mendukung kebutuhan penghimpunan data SKM untuk evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana hasil SKM periode Triwulan I s.d III Tahun 2026 akan dihitung sebagai pembentuk IKM Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 merujuk Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/155/PP.00.01/2026 tanggal 21 Agustus 2026. Survei yang masuk setelah tanggal 23 September 2026 tidak dihitung sebagai pembentuk Nilai IKM
3. Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
4. Capaian nilai hasil SKM Triwulan III tahun 2026 untuk DJPT yang terdiri atas 26 Unit Pelayanan Publik (UPP) dicantumkan pada tabel di bawah. Analisis capaian disampaikan sebagai berikut:
    a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
    b. Jumlah responden sebanyak **5.198** dengan nilai SKM sebesar **95,51** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik)**. Terdapat kenaikan nilai sebesar 2,15 apabila dibandingkan dengan nilai SKM Triwulan II tahun 2026 seperti yang tergambar pada grafik di bawah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 44 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025;

d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Kwandang dengan nilai sebesar 98,32. Sedangkan, nilai terendah diperoleh PPN Brondong dengan nilai 91,43.;

e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultansi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,82;

f. berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 4 unsur terendah, yaitu U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas yang memiliki nilai sebesar **3,806,** U8 Layanan Konsultansi yang memiliki nilai sebesar **3,802,** dan U9 Kualitas Isi/Sarana serta U4 Kesesuaian Biaya yang memiliki nilai **3,809**.

g. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan *in-house training*, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP serta biaya pelayanan, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Taufiq B. Atmamihardja

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 2682/DJPT.1/OT.710/X/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	50	3,740	3,780	3,740	3,680	3,740	3,660	3,760	3,820	3,660	93,28
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	42	3,857	3,810	3,810	3,857	3,881	3,810	3,786	3,833	3,833	95,77
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	3,846	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	97,86
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	92	3,870	3,859	3,848	3,870	3,848	3,859	3,848	3,848	3,859	96,41
PPN Ambon	123	3,854	3,927	3,862	3,846	3,894	3,886	3,927	3,919	3,870	97,18
PPN Brondong	94	3,840	3,798	3,734	3,606	3,766	3,426	3,734	3,511	3,500	91,43
PPN Karangantu	144	3,833	3,792	3,806	3,910	3,819	3,847	3,889	3,674	3,639	95,02
PPN Kejawanan	135	3,815	3,793	3,815	3,733	3,733	3,763	3,785	3,726	3,733	94,16
PPN Kwandang	970	3,961	3,937	3,924	3,912	3,916	3,946	3,943	3,927	3,928	98,32
PPN Palabuhanratu	138	3,891	3,826	3,862	3,775	3,812	3,761	3,819	3,783	3,826	95,43
PPN Pekalongan	144	3,840	3,799	3,778	3,771	3,743	3,764	3,778	3,701	3,688	94,06
PPN Pemangkat	154	3,955	3,903	3,922	3,929	3,896	3,870	3,948	3,948	3,935	98,07
PPN Pengambengan	32	3,844	3,813	3,844	3,750	3,906	3,875	3,906	3,844	3,813	96,09

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Prigi	135	3,807	3,770	3,741	3,763	3,778	3,748	3,807	3,800	3,770	94,40
PPN Sibolga	646	3,915	3,912	3,924	3,920	3,915	3,910	3,915	3,910	3,918	97,89
PPN Sungailiat	238	3,891	3,887	3,887	3,891	3,899	3,887	3,870	3,899	3,878	97,19
PPN Tanjung Pandan	76	3,842	3,803	3,724	3,711	3,776	3,750	3,829	3,645	3,632	93,64
PPN Ternate	106	3,755	3,783	3,736	3,764	3,783	3,783	3,783	3,802	3,821	94,47
PPN Tual	147	3,769	3,755	3,728	3,673	3,687	3,748	3,755	3,721	3,755	93,31
PPP Teluk Batang	69	3,884	3,855	3,797	3,841	3,768	3,754	3,826	3,841	3,841	95,57
PPS Belawan	118	3,720	3,763	3,712	3,703	3,695	3,746	3,729	3,712	3,686	92,96
PPS Bitung	385	3,764	3,738	3,717	3,709	3,738	3,738	3,764	3,727	3,722	93,38
PPS Bungus	179	3,855	3,520	3,860	3,480	3,821	3,531	3,844	3,525	3,832	92,41
PPS Cilacap	126	3,810	3,825	3,786	3,802	3,794	3,802	3,810	3,786	3,810	95,06
PPS Kendari	706	3,721	3,717	3,691	3,744	3,697	3,678	3,720	3,698	3,694	92,67
PPS Nizam Zachman	136	3,860	3,853	3,801	3,824	3,816	3,816	3,860	3,809	3,779	95,61
DJPT	**5198**	**3,850**	**3,825**	**3,822**	**3,809**	**3,820**	**3,806**	**3,841**	**3,802**	**3,809**	**95,51**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1059/SJ.7/PL.410/X/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 12 Oktober 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi **SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)** merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** beserta perubahannya.
2. Hasil rekapitulasi capaian IKU persentase RUP terumumkan dari **160 (seratus enam puluh) satuan kerja pengelola DIPA aktif** sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan III sampai dengan waktu *cut off* tanggal **8 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB** adalah sebesar **99,85%** (daftar rekapitulasi terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berdasarkan data sesuai dengan hasil rekapitulasi capaian IKU RUP Triwulan III Tahun Anggaran 2026, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mencapai 100% pengisian RUP. Diminta agar segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran sehingga capaian IKU dapat optimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor	Kode Eselon I	Nama Unit Eselon I	∑ Satker	Belanja Pengadaan (Rp)	Total RUP (Rp)	Selisih Belanja (Rp)	% Pengisian RUP TW-III	Target IKU TW-III	Capaian IKU TW-III	Keterangan Capaian
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	96,882,124,000	96,882,124,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
2	01	Sekretariat Jenderal	3	13,716,776,000	13,716,776,000	-	100.00%	82.00	100.00	Target capaian maksimal
3	02	Inspektorat Jenderal	1	8,895,902,000	8,895,902,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
4	08	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,39,141,387,000	1,339,141,387,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
5	07	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	5	87,067,348,750	87,067,348,750	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
6	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,779,419,000	1,615,810,238,700	(666,180,300)	99.94%	77.00	99.94	Melebihi target capaian
7	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	9,647,942,360,800	9,641,512,557,800	(6,426,803,000)	99.93%	77.00	96.72	Melebihi target capaian
8	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	2,115,035,281,804	2,104,354,288,804	(10,680,663,000)	99.49%	77.00	99.49	Melebihi target capaian
9	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	668,769,038,301	664,895,096,301	(3,873,642,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
10	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	182,295,351,999	181,239,541,666	(1,055,810,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
TOTAL			***160***	***15,776,524,989,654***	***15,753,515,261,354***	***(23,009,728,300)***	***99.85%***	***Melebihi target capaian***		

Ditandatangani Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	86,599,250,000	89,599,250,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	7,282,874,000	7,282,874,000	**100.00%**
TOTAL		**96,882,124,000**	**96,882,124,000**	**100.00%**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,716,776,000	13,716,776,000	**100.00%**
2	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,494,073,000	8,464,073,000	**100.00%**
3	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	273,608,200,000	273,608,200,000	**100.00%**
TOTAL		**295,819,049,000**	**295,819,049,000**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	INSPEKTORAT JENDERAL	8,895,902,000	8,895,902,000	**100.00%**
TOTAL		**8,895,902,000**	**8,895,902,000**	**100.00%**

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	20,652,073,000	20,652,073,000	**100.00%**
2	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	26,313,105,000	26,313,105,000	**100.00%**
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	25,438,501,000	25,438,501,000	**100.00%**
4	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	26,056,233,000	26,056,233,000	**100.00%**
5	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,240,681,475,000	1,240,681,475,000	**100.00%**
TOTAL		**1,339,141,387,000**	**1,339,141,387,000**	**100.00%**

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG	3,529,457,000	3,529,457,000	**100.00%**
2	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG	5,118,003,000	5,118,003,000	**100.00%**
3	BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR	2,617,680,000	2,617,680,000	**100.00%**
4	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	73,384,537,750	73,384,537,750	**100.00%**
5	BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG	2,417,671,000	2,417,671,000	**100.00%**
TOTAL		**87,067,348,750**	**87,067,348,750**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000	21,094,321,000	**100.00%**
2	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA	15,234,749,000	15,234,749,000	**100.00%**
3	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	8,923,976,000	8,923,976,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	9,677,902,000	9,677,902,000	**100.00%**
5	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	**100.00%**
6	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000	18,599,397,000	**100.00%**
7	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	6,569,187,000	6,569,187,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN CILACAP	15,695,186,000	15,695,186,000	**100.00%**
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000	20,336,525,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	**100.00%**
11	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO	21,040,598,000	21,040,598,000	**100.00%**
12	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	9,766,944,000	9,766,944,000	**100.00%**
13	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK	6,915,925,000	6,915,925,000	**100.00%**
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,413,455,296,000	1,413,195,868,700	**99.98%**
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	13,807,259,000	13,097,506,000	**94.86%**
TOTAL		**1,616,779,419,000**	**1,615,810,238,700**	**99.94%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,904,204,000	1,904,204,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	4,275,043,000	4,275,043,000	**100.00%**
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,165,692,000	2,165,692,000	**100.00%**
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,799,006,000	1,799,006,000	**100.00%**
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	**100.00%**
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000	3,847,978,000	**100.00%**
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	**100.00%**
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000	4,975,769,000	**100.00%**
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,421,616,000	106,421,616,000	**100.00%**
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,037,402,000	2,037,402,000	**100.00%**
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	**100.00%**
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,509,317,000	76,509,317,000	**100.00%**
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000	29,534,148,000	**100.00%**
14	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,412,138,000	8,412,138,000	**100.00%**
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000	277,757,594,000	**100.00%**
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,181,747,000	3,181,747,000	**100.00%**
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,536,779,000	3,536,779,000	**100.00%**
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	**100.00%**
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000	367,160,664,000	**100.00%**
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,638,195,000	43,638,195,000	**100.00%**
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	**100.00%**
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,685,809,000	5,777,523,000	**101.61%**
23	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	8,685,660,211,800	8,679,142,645,800	**99.92%**
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000	2,884,264,000	**99.86%**
TOTAL		**9,647,942,360,800**	**9,641,512,557,800**	**99.93%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,587,185,000	1,587,185,000	**100.00%**
2	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,271,802,000	5,271,802,000	**100.00%**
3	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,196,990,000	1,196,990,000	**100.00%**
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,260,034,000	13,260,034,000	**100.00%**
5	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,861,393,000	5,861,393,000	**100.00%**
6	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	14,438,756,000	14,438,756,000	**100.00%**
7	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	420,979,853,701	420,979,853,701	**100.00%**
8	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	3,778,653,000	3,778,653,000	**100.00%**
9	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,230,584,600	2,230,584,600	**100.00%**
10	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	1,677,362,000	1,677,362,000	**100.00%**
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,853,387,000	2,853,387,000	**100.00%**
12	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,050,784,000	1,050,784,000	**100.00%**
13	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	32,647,914,000	32,647,914,000	**100.00%**
14	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,184,129,000	5,184,129,000	**100.00%**
15	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	752,397,000	752,397,000	**100.00%**
16	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	1,933,287,000	1,933,287,000	**100.00%**
17	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	2,764,180,000	2,764,180,000	**100.00%**
18	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,136,163,000	3,136,163,000	**100.00%**
19	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	3,905,239,000	3,905,239,000	**100.00%**
20	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,622,295,000	4,622,295,000	**100.00%**
21	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,374,487,000	2,374,487,000	**100.00%**
22	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,008,432,000	1,008,432,000	**100.00%**
23	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000	1,852,257,000	**100.00%**
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,439,233,000	2,439,233,000	**100.00%**
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	2,216,173,000	2,216,173,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,729,828,000	2,729,828,000	**100.00%**
27	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,343,214,000	1,343,214,000	**100.00%**
28	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	3,906,227,000	3,906,227,000	**100.00%**
29	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,739,060,000	1,739,060,000	**100.00%**
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	12,459,990,000	12,459,990,000	**100.00%**
31	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000	835,677,000	**100.00%**
32	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,007,079,000	6,007,079,000	**100.00%**
33	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	40,317,914,000	40,317,914,000	**100.00%**
34	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,073,283,000	12,073,283,000	**100.00%**
35	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,078,558,000	3,078,558,000	**100.00%**
36	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	2,618,683,000	2,618,683,000	**100.00%**
37	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,948,436,000	4,948,436,000	**100.00%**
38	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,523,434,000	27,523,434,000	**100.00%**
39	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	566,529,000	566,529,000	**100.00%**
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	2,308,281,000	2,308,281,000	**100.00%**
41	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,028,502,000	1,028,502,000	**100.00%**
42	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	6,261,373,000	2,387,431,000	**38.13%**
TOTAL		**668,769,038,301**	**664,895,096,301**	**99.42%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,051,369,000	16,051,369,000	**100.00%**
2	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,154,781,000	9,154,781,000	**100.00%**
3	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,122,214,000	6,122,214,000	**100.00%**
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	**100.00%**
5	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000	15,769,606,000	**100.00%**
6	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	140,988,207,000	140,988,207,000	**100.00%**
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	**100.00%**
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	25,928,799,000	25,928,799,000	**100.00%**
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	13,605,630,000	13,605,630,000	**100.00%**
10	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,537,862,000	3,537,862,000	**100.00%**
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,335,332,000	48,335,332,000	**100.00%**
12	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	33,005,352,000	33,005,352,000	**100.00%**
13	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	16,607,106,000	16,607,106,000	**100.00%**
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	18,975,478,000	18,975,478,000	**100.00%**
15	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1,730,218,755,804	1,720,802,244,804	**99.46%**
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	11,369,892,000	10,105,410,000	**88.88%**
TOTAL		**2,115,035,281,804**	**2,104,354,288,804**	**99.49%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	**100.00%**
2	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	264,756,000	264,756,000	**100.00%**
3	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	19,533,496,000	19,533,496,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	195,176,000	195,176,000	**100.00%**
5	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	922,433,000	922,433,000	**100.00%**
6	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	2,131,730,000	2,131,730,000	**100.00%**
7	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	1,263,624,000	1,263,624,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	**100.00%**
9	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	748,892,000	748,892,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	758,484,000	758,484,000	**100.00%**
11	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	872,480,000	872,480,000	**100.00%**
12	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	**100.00%**
13	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	**100.00%**
14	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	**100.00%**
15	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	23,377,763,000	23,377,763,000	**100.00%**
16	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	903,509,000	903,509,000	**100.00%**
17	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	996,270,000	996,270,000	**100.00%**
18	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	853,490,000	853,490,000	**100.00%**
19	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	705,319,000	705,319,000	**100.00%**
20	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	784,570,000	784,570,000	**100.00%**
21	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	444,470,000	444,470,000	**100.00%**
22	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	160,800,000	160,800,000	**100.00%**
23	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	**100.00%**
24	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	769,468,000	769,468,000	**100.00%**
25	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	726,519,000	726,519,000	**100.00%**
27	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	2,245,305,000	2,245,305,000	**100.00%**
28	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	954,088,000	954,088,000	**100.00%**
29	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	1,026,225,000	1,026,225,000	**100.00%**
30	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	1,439,853,000	1,439,853,000	**100.00%**
31	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	800,304,000	800,304,000	**100.00%**
32	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	**100.00%**
33	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	**100.00%**
34	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	**100.00%**
35	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	**100.00%**
36	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	493,789,000	493,789,000	**100.00%**
37	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	621,746,000	621,746,000	**100.00%**
38	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	753,105,000	753,105,000	**100.00%**
39	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	1,057,654,000	1,057,654,000	**100.00%**
40	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	388,074,000	388,074,000	**100.00%**
41	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	380,500,000	380,500,000	**100.00%**
42	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	397,648,000	397,648,000	**100.00%**
43	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	222,385,999	222,385,999	**100.00%**
44	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	132,060,000	132,060,000	**100.00%**
45	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	**100.00%**
46	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	2,027,441,000	2,027,441,000	**100.00%**
47	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,385,470,000	99,329,660,000	**98.95%**
TOTAL		**182,295,351,999**	**181,239,541,999**	**99.42%**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 2680/DJPT.1/OT.710/X/2026

Yth.	:	1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Dari	:	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	1 Oktober 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan III tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Penguncian data dilakukan lebih cepat untuk mendukung kebutuhan penghimpunan data SKM untuk evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana hasil SKM periode Triwulan I s.d III Tahun 2026 akan dihitung sebagai pembentuk IKM Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 merujuk Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/155/PP.00.01/2026 tanggal 21 Agustus 2026. Survei yang masuk setelah tanggal 23 September 2026 tidak dihitung sebagai pembentuk Nilai IKM
2. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
3. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan III Tahun 2026 yang dilakukan tanggal 23 September 2026;
4. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan III Tahun 2026 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
5. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
   a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
   b. Jumlah responden sebanyak **5.198** dengan nilai SKM sebesar **95,51** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik)**
   c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 44 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
   d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Kwandang dengan nilai sebesar 98,32. Sedangkan, nilai terendah diperoleh PPN Brondong dengan nilai 91,43.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultansi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,82

6. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:

   a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;

   b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;

   c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

   d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 Oktober 2026.**

   e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.

7. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan III Tahun 2026 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

   Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 2680/DJPT.1/OT.710/X/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	50	3,740	3,780	3,740	3,680	3,740	3,660	3,760	3,820	3,660	93,28
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	42	3,857	3,810	3,810	3,857	3,881	3,810	3,786	3,833	3,833	95,77
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	3,846	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	97,86
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	92	3,870	3,859	3,848	3,870	3,848	3,859	3,848	3,848	3,859	96,41
PPN Ambon	123	3,854	3,927	3,862	3,846	3,894	3,886	3,927	3,919	3,870	97,18
PPN Brondong	94	3,840	3,798	3,734	3,606	3,766	3,426	3,734	3,511	3,500	91,43
PPN Karangantu	144	3,833	3,792	3,806	3,910	3,819	3,847	3,889	3,674	3,639	95,02
PPN Kejawanan	135	3,815	3,793	3,815	3,733	3,733	3,763	3,785	3,726	3,733	94,16
PPN Kwandang	970	3,961	3,937	3,924	3,912	3,916	3,946	3,943	3,927	3,928	98,32
PPN Palabuhanratu	138	3,891	3,826	3,862	3,775	3,812	3,761	3,819	3,783	3,826	95,43
PPN Pekalongan	144	3,840	3,799	3,778	3,771	3,743	3,764	3,778	3,701	3,688	94,06
PPN Pemangkat	154	3,955	3,903	3,922	3,929	3,896	3,870	3,948	3,948	3,935	98,07
PPN Pengambengan	32	3,844	3,813	3,844	3,750	3,906	3,875	3,906	3,844	3,813	96,09
PPN Prigi	135	3,807	3,770	3,741	3,763	3,778	3,748	3,807	3,800	3,770	94,40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sibolga	646	3,915	3,912	3,924	3,920	3,915	3,910	3,915	3,910	3,918	97,89
PPN Sungailiat	238	3,891	3,887	3,887	3,891	3,899	3,887	3,870	3,899	3,878	97,19
PPN Tanjung Pandan	76	3,842	3,803	3,724	3,711	3,776	3,750	3,829	3,645	3,632	93,64
PPN Ternate	106	3,755	3,783	3,736	3,764	3,783	3,783	3,783	3,802	3,821	94,47
PPN Tual	147	3,769	3,755	3,728	3,673	3,687	3,748	3,755	3,721	3,755	93,31
PPP Teluk Batang	69	3,884	3,855	3,797	3,841	3,768	3,754	3,826	3,841	3,841	95,57
PPS Belawan	118	3,720	3,763	3,712	3,703	3,695	3,746	3,729	3,712	3,686	92,96
PPS Bitung	385	3,764	3,738	3,717	3,709	3,738	3,738	3,764	3,727	3,722	93,38
PPS Bungus	179	3,855	3,520	3,860	3,480	3,821	3,531	3,844	3,525	3,832	92,41
PPS Cilacap	126	3,810	3,825	3,786	3,802	3,794	3,802	3,810	3,786	3,810	95,06
PPS Kendari	706	3,721	3,717	3,691	3,744	3,697	3,678	3,720	3,698	3,694	92,67
PPS Nizam Zachman	136	3,860	3,853	3,801	3,824	3,816	3,816	3,860	3,809	3,779	95,61
DJPT	**5198**	**3,850**	**3,825**	**3,822**	**3,809**	**3,820**	**3,806**	**3,841**	**3,802**	**3,809**	**95,51**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN SKM TW III

2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III PPS Cilacap Tahun 2026 sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penyelenggara Pelayanan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Untuk itu, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan dengan mengambil responden dari masyarakat penerima pelayanan publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat pada Triwulan III yang dituangkan dalam laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada masa yang akan datang.

Cilacap, 13 Oktober 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Ditandatangani Secara Elektronik

Mahrus, S.St.Pi, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Pelaksanaan SKM 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM 4
2.1. Pelaksana SKM 4
2.2. Metode Pengumpulan Data 4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data 7
2.4. Waktu Pelaksanaan SKM 7
2.5. Penentuan Jumlah Responden 7

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 8
3.1. Jumlah Responden SKM 8
3.2. IKM PPS Cilacap 9

BAB IV ANALISIS HASIL SKM 11
4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan kelebihan Usur Layanan . 11
4.2. Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Analisa IKM 13
4.3. Tren Nilai SKM 15

BAB V KESIMPULAN 17

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Pengelolaan Data SKM
3. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan SKM
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya (TW II 2026)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap. Dalam hal ini, terdapat 15 (lima belas) layanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan publik yang dilakukan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap berorientasi pada keutamaan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan khususnya *Stakeholder* Perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Namun demikian pelayanan yang dilakukan mungkin terdapat ketidaksesuaian dengan harapan pengguna layanan.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap perlu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, dalam hal ini dilakukan setiap triwulan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggambarkan tingkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan untuk mendeteksi adanya keluhan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM

Pelaksanaan SKM lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan oleh Petugas Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

2.2. Metode Pengumpulan Data

- Survei dilakukan secara periodik yaitu setiap triwulan dengan pendekatan kualitatif yang diukur menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Dengan menggunakan skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
- Pengumpulan data pada Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui pengisian kuesioner (melalui aplikasi SKM) serta wawancara tatap muka kepada pengguna layanan.
- Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur sebagai berikut:

  1. Persyaratan
  2. Prosedsur
  3. Waktu Pelayanan
  4. Biaya / Tarif
  5. Produk Layanan
  6. Kompetensi Pelaksana
  7. Perilaku Pelaksana
  8. Sarana dan Prasarana
  9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Tahapan pengukuran dilakukan sebagai berikut :

Persiapan

Pelaksanaan SKM SKM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni apikasi SUSAN yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal KKP. Untuk itu, telah dilakukan sosialisasi kepada petugas survey (surveyor) perihal tata cara penggunaan aplikasi dalam pengisian kuesioner.

Kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

- Data Masyarakat (Responden) meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama.
- Mutu pelayanan Publik yang merupakan pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai. Kriteria untuk responden SKM adalah para pengguna layanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan pada periode Triwulan III 2026. Data yang terkumpul langsung masuk dalam aplikasi SUSAN.

Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur (variable pengukuran) diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan (9 unsur) memiliki penimbang yang sama yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{(Total unsur yang terisi x 9)}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM (sebelum konversi) x 25}$$

Untuk memperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan sebagai penyelenggara pelayanan publik maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM per Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Layanan}}$$

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada waktu jam layanan.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan SKM dilakukan pada periode SKM Triwulan III Tahun 2026.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Responden diambil pada saat pelaksanaan permohonan pelayanan pada setiap layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pegumpulan data, jumlah responden penerima layanan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada survei kepuasan masyarakat Triwulan III Tahun 2026 adalah sebanyak 126 responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik dan komposisi responden

Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	39	30,95
	Perempuan	87	69,05
Pendidikan	SD	6	4,76
	SMP	13	10,32
	SMA	83	65,87
	D3	4	3,17
	S1	20	15,87
Pekerjaan	ASN	2	1,59
	Pelaku Usaha KKP	16	12,70
	Swasta	68	53,97
	Wirausaha	27	21,43
	Pelajar	13	10,32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Hasil pengolahan data SKM diperoleh hasil sebagai berikut:

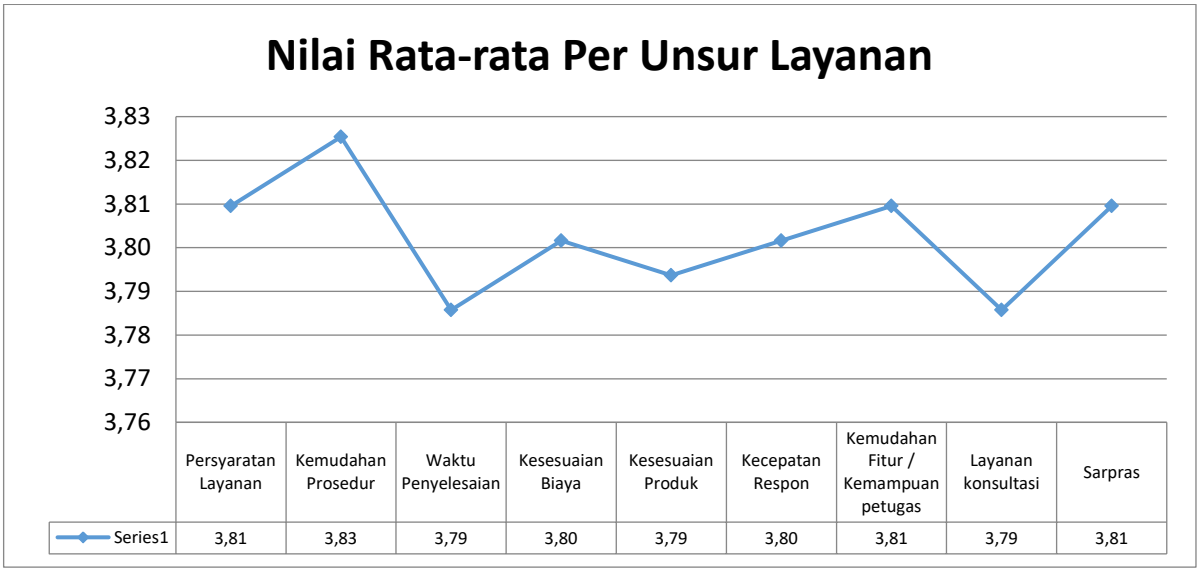
Tabel 3. Detai Nilai SKM Per Unsur Layanan

Uraian	Nilai unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	95.24	95.63	94.64	95.04	94.84	95.04	95.24	94.64	95.24
Mutu Pelayanan	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Pelayanan Publik	95.06								

Keterangan:

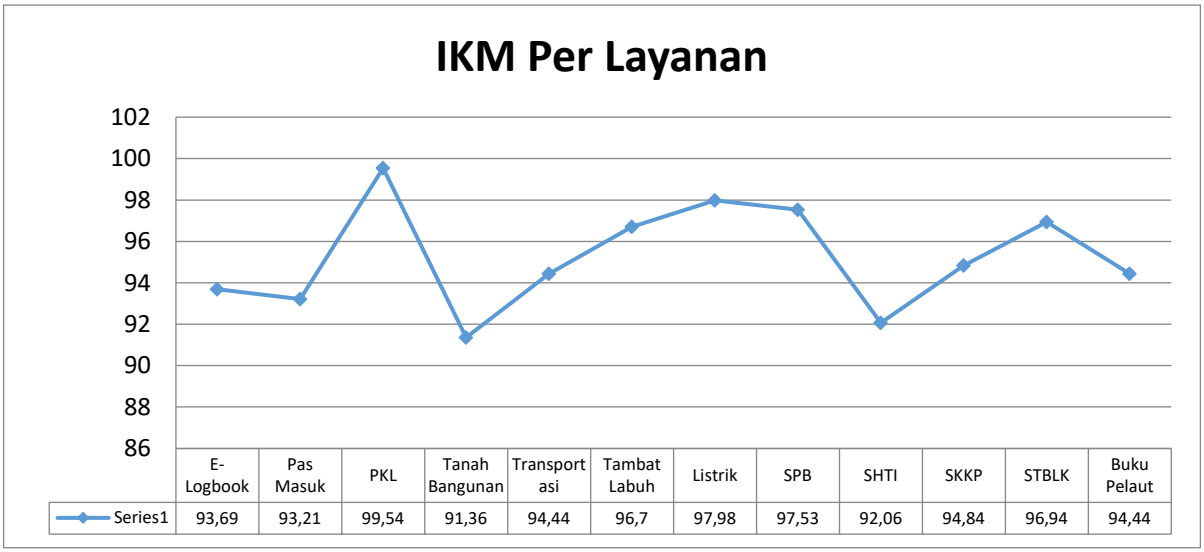
U1 Persyaratan Layanan
U2 Kemudahan Prosedur
U3 Waktu Penyelesaian
U4 Kesesuaian Biaya
U5 Kesesuaian Produk
U6 Kecepatan Respon
U7 Kemampuan petugas
U8 Layanan konsultasi
U9 Sarpras

Grafik 1. Grafik Nilai Rata-rata per Unsur Layanan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Grafik 2. Grafik IKM Per Layanan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Survei Kepuasan Msyarakat (SKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaksanakan setiap triwulan, berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil SKM pada Triwulan III Tahun 2026 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 95,06 (kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data sebanyak 126 responden dan 12 jenis layanan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan PPS Cilacap dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Analisis terhadap masing-masing unsur pelayanan menunjukkan bahwa seluruh indikator memperoleh penilaian dalam kategori sangat baik. Adapun interpretasi atas capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan

   Masyarakat menilai bahwa persyaratan yang ditetapkan sudah jelas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan hambatan dalam proses pengurusan layanan.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Proses pelayanan dinilai telah tersusun secara sistematis dan mudah diikuti. Kejelasan alur pelayanan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

3. Waktu Penyelesaian

   Ketepatan waktu penyelesaian layanan menunjukkan bahwa standar pelayanan telah diterapkan dengan baik dan konsisten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Biaya/Tarif

   Biaya pelayanan dinilai transparan, sesuai ketentuan, serta tidak memberatkan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara layanan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Hasil layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan pengguna layanan.
6. Kompetensi Pelaksana

   Petugas pelayanan dinilai memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan pelayanan secara profesional.
7. Perilaku Pelaksana

   Sikap petugas yang ramah, sopan, dan responsif menjadi salah satu faktor utama dalam tingginya tingkat kepuasan masyarakat.
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

   Mekanisme pengaduan telah berjalan efektif dan responsif, serta mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat.
9. Sarana dan Prasarana

   Ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai, nyaman, dan mendukung turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh unsur layanan mendapatkan nilai dengan mutu pelayanan kategori A (SANGAT BAIK);
2. Unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif paling tinggi adalah kemudahan prosedur, kemampuan petugas, dan sarana prasarana yang menggambarkan bahwa prosedur pelayanan telah sesuai dengan standar pelayanan, petugas memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Unsur yang memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu waktu penyelesaian, kesesuaian produk dan layanan konsultasi. Walaupun masih berada dalam kategori sangat baik, ketiga unsur tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan agar pelayanan menjadi lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Secara keseluruhan, hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelayanan publik di PPS Cilacap telah memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya penilaian pada hampir seluruh unsur pelayanan, yang mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan yang selama ini dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil SKM yang menunjukkan kategori sangat baik pada seluruh unsur pelayanan merupakan indikator bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah berada pada tingkat pelayanan prima (*excellent service*). Hal ini tidak terlepas dari komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil ini tetap perlu ditindaklanjuti dengan upaya pemeliharaan kualitas pelayanan secara konsisten. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan unsur-unsur yang memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, meskipun masih dalam kategori sangat baik, sebagai prioritas perbaikan.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian waktu pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan melalui kartu kendali sebagai control dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Dengan kartu kendali pelayanan, diharapkan dapat mengidentifikasi				√	**Subtim Tata Laksana Tim Kerja WBK PPSC**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
		hambatan dalam pelayanan yang dilakukan					
2	Kesesuaian Produk	Pemeriksaan ulang terhadap produk output pelayanan dilaukan melalui double checking pada pelayanan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya kesalahan dalam produk output pelayanan pada PPS Cilacap				√	**Subtim Pelayanan Publik Tim Kerja WBK PPSC**
3	Layanan Konsultasi	Mengoptimalkan layanan konsultasi melalui petugas layanan, media komunikasi (telepon, WhatsApp, email), serta penyediaan meja konsultasi dan informasi. Selain itu, memastikan aduan dan konsutasi dari pengguna direspon dan di tindaklanjuti dengan baik				√	**Subtim Pelayanan Publik Tim Kerja WBK PPSC**
4	Kesesuaian Biaya	Terus mensosialisasikan terkait dengan standar pelaynaan yang mana didalamnya terdapat ketentuan terkait dengan biaya layanan.				√	**Subtim Pelayanan Publik Tim Kerja WBK PPSC**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 5. Saran pada Aplikasi SUSAN

No	Nama Layanan	Uraian Saran	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penerbitan SKKP	mohon lebih cepat dalam penerbitan skkp, untuk keseluruhan sudah ike dan baik				√	**Tim Kerja Kesyahbandaran**
2	Pelayanan Aktivasi E-Logbook Penangkapan Ikan	kadang aplikasi epit nya eror atau lambat jadi sering menghambat, tp untuk keseluruhan sudah baik				√	**Tim Kerja Kesyahbandaran**

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut dari Saran pada Aplikasi SUSAN

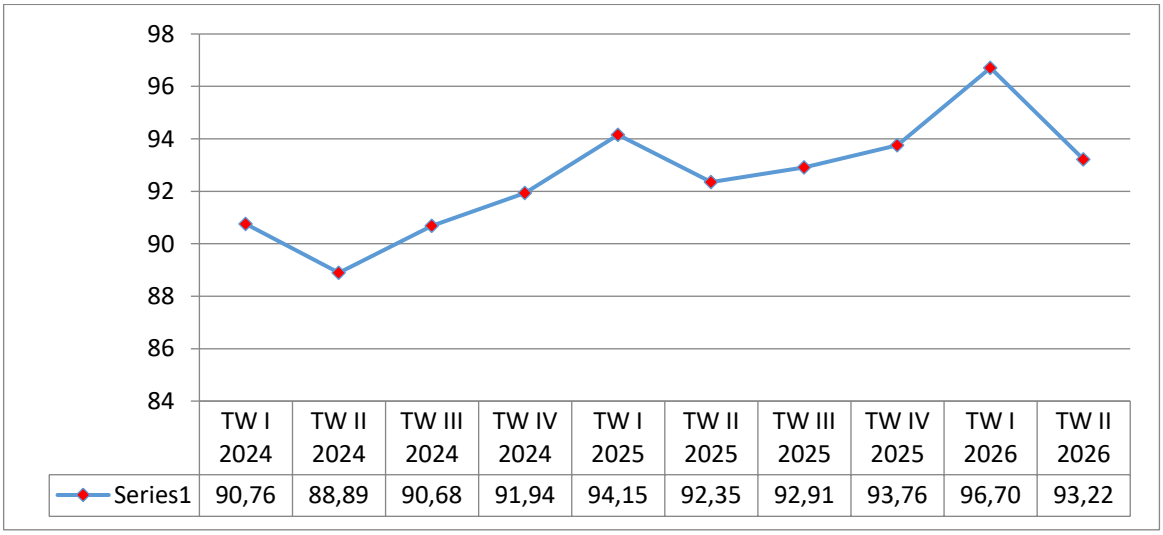
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penerbitan SKKP	Evaluasi proses penerbitan SKKP, termasuk kesesuaian waktu penyelesaian dengan standar pelayanan				√	**Tim Kerja Kesyahbandaran**
2	Pelayanan Aktivasi E-Logbook Penangkapan Ikan	Pencatatan dan pemantauan gangguan E-Logbook, koordinasi penyampaian kendala				√	**Tim Kerja Kesyahbandaran**

4.3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Berikut adalah tren tingkat kepuasan penerima layanan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sampai dengan triwulan III Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Grafik 3. Tren IKM PPS Cilacap 2024 – triwulan III 2026



Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya fluktuasi nilai SKM PPS Cilacap namun masih dalam kategori SANGAT BAIK.

Tabel 5. Tren IKM Per Pelayanan Tahun 2026

No	Layanan	Triwulan I 2026		Triwulan II 2026		Triwulan III 2026	
		IKM	KUP	IKM	KUP	IKM	KUP
1	E-Logbook Penangkapan Ikan	94,75	SB	95,83	SB	93,69	SB
2	Cold storage	100	SB	-	-	-	-
3	Pas Masuk	92,78	SB	94,84	SB	93,21	SB
4	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	100	SB	84,72	B	99,54	SB
5	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	97,84	SB	92,22	SB	91,36	SB
6	Penggunaan Transportasi	100	SB	97,22	SB	94,44	SB
7	Jasa Tambat Labuh	98,81	SB	91,05	SB	96,70	SB
8	Jasa Listrik	100	SB	98,15	SB	97,98	SB
9	Persetujuan Berlayar	98,33	SB	91,98	SB	97,53	SB
10	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	99,44	SB	95,06	SB	92,06	SB
11	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	93,75	SB	93,44	SB	94,84	SB
12	Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	99,60	SB	92,90	SB	96,94	SB
13	Buku Pelaut	96,53	SB	86,11	B	94,44	SB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
KESIMPULAN

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2026 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 126 responden, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 95,06 dengan Mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui harapan pengguna layanan. Seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai dalam kategori Sangat Baik, yang mencerminkan bahwa standar pelayanan telah diterapkan secara efektif dan konsisten.

Terdapat beberapa unsur yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan tindak lanjut perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Terkait dengan hal tersebut telah disusun rencana tindak lanjut yang meliputi peningkatan transparansi informasi tarif layanan, penyediaan media informasi prosedur pelayanan dalam bentuk infografis, serta optimalisasi layanan konsultasi melalui berbagai media komunikasi dan penguatan fungsi petugas pelayanan. Pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut diharapkan mampu mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat pada periode survei berikutnya.

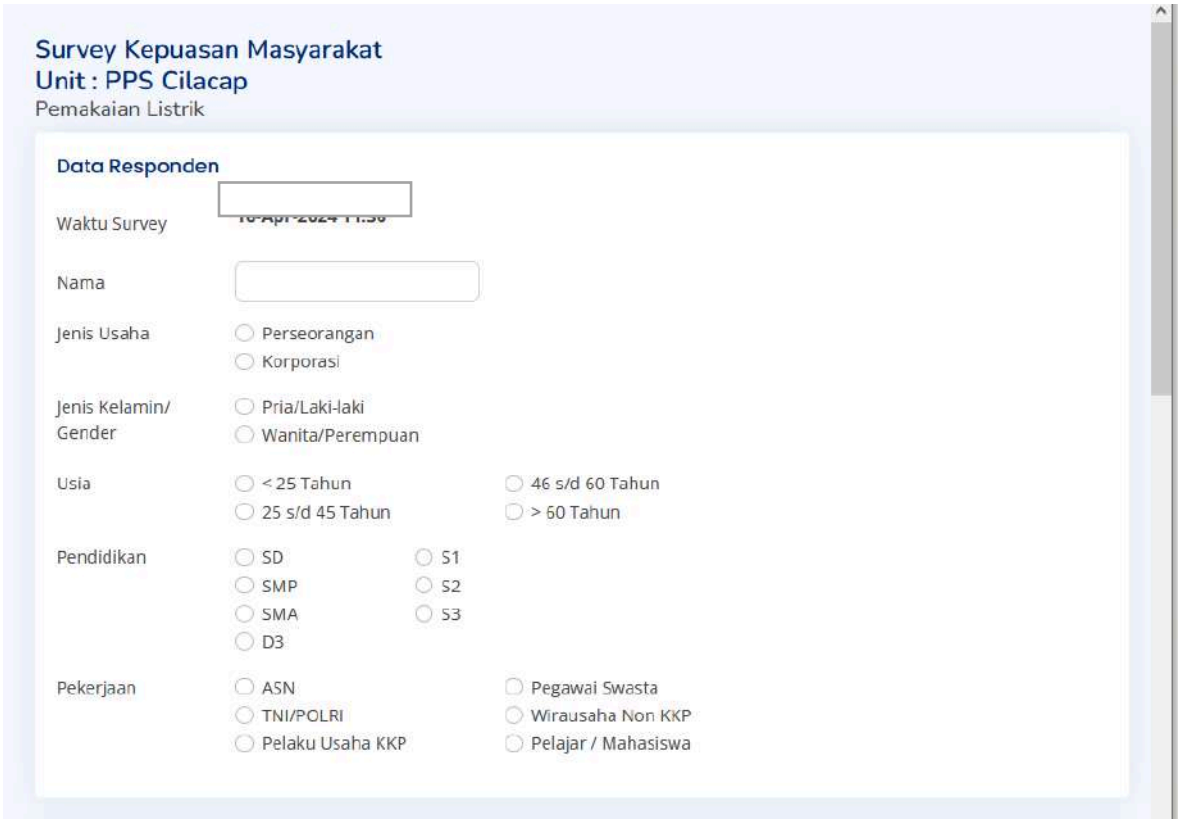
Hasil SKM Triwulan III Tahun 2026 menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah berjalan dengan sangat baik. Ke depan, evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan perlu terus dilakukan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : PPS Cilacap
Pemakaian Listrik

Data Responden

Waktu Survey

Nama

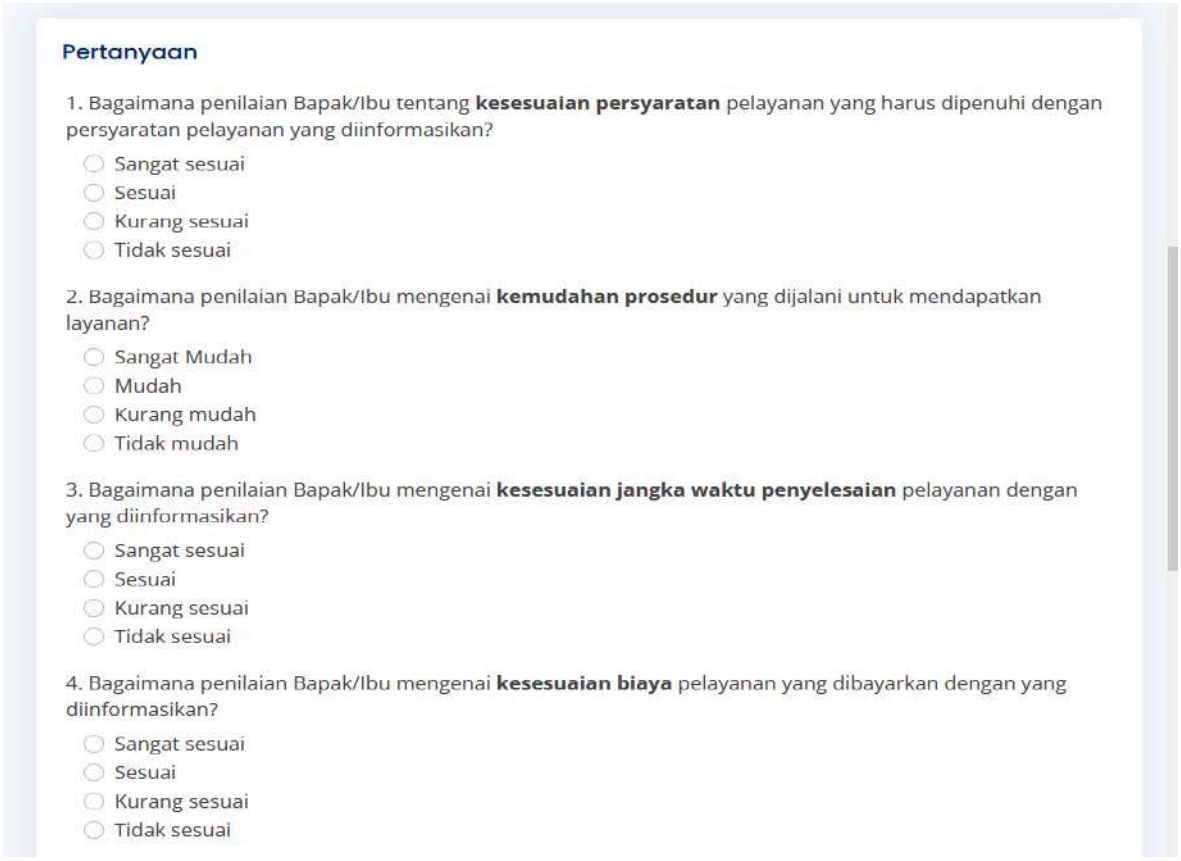
Jenis Usaha
- Perseorangan
- Korporasi

Jenis Kelamin/ Gender
- Pria/Laki-laki
- Wanita/Perempuan

Usia
- < 25 Tahun
- 25 s/d 45 Tahun
- 46 s/d 60 Tahun
- > 60 Tahun

Pendidikan
- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3

Pekerjaan
- ASN
- TNI/POLRI
- Pelaku Usaha KKP
- Pegawai Swasta
- Wirausaha Non KKP
- Pelajar / Mahasiswa



Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
- Sangat Mudah
- Mudah
- Kurang mudah
- Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
- Sangat sesuai
- Sesuai
- Kurang sesuai
- Tidak sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

- ○ Sangat sesuai
- ○ Sesuai
- ○ Kurang sesuai
- ○ Tidak sesuai

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesigapan petugas pelayanan**?

- ○ Sangat Cepat
- ○ Cepat
- ○ Kurang cepat
- ○ Lambat

7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **perilaku /kemampuan petugas pelayanan**?

- ○ Sangat baik
- ○ Baik
- ○ Kurang baik
- ○ Tidak baik

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

- ○ Sangat baik
- ○ Baik
- ○ Kurang baik
- ○ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap **kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana** pelayanan di unit?

- ○ Sangat baik
- ○ Baik
- ○ Kurang baik
- ○ Tidak baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 2
PENGELOLAAN DATA SKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data detail SKM untuk Triwulan 3 tahun 2026

id_survei	Triwulan	Tahun	Kd_Es_1	Nama_UPP	Nama_Layanan	Kelompok_layanan	Jenis_Usaha	Jenis_Kelamin	Usia_Responden	Pendidikan	Pekerjaan	Rating_Petugas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik_Saran
211438	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semakin ditingkatkan pelayanannya
211103	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	25-45	SMP	P.UKKP	5	3	4	3	3	4	3	4	3	4	semoga lebih baik
210989	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	P	25-45	SMP	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pengguna jasa bangunan di TPi ppc di tingkatkan kebersihan kotor sekali di TPi ppc sudah 2bulan tidak dibersihin dan tidak ada air
210868	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat baik
210867	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat baik oke
210740	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	25-45	SD	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangar baik,, ramah,dan menjelaskan dengan baik jika ada yg kurnag paham
210739	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ramah baik oke
210713	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	S1	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap semangat dan ditingkatkan terus kinerja nya Terimakasih
210673	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	46-60	SD	wirausaha	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Cepat dan cermat
210670	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan nya sangat bagus
210667	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan nya sangat bagus
210663	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	selalu pertahankan ya
210662	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	bagus, bagus, dan bagus
210661	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	Pertahankan terus pelayanannya
210657	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	Petugas ramah, dan baik
210654	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	pertahkan terus ya
210652	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	Petugas sangat baik dan ramah
210651	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	wirausaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	tidak ada kritik karna emang harus aktif
210648	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat sesuai dengan data
210646	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	L	25-45	SMP	wirausaha	5	3	4	4	4	3	4	3	4	3	PELAYANAN SUDAH SANGAT BAIK
210644	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat lengkap dan sesuai
210643	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisien kerja cepat
210635	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	melayanj dengan baik dan mudah, mohon tetap dipertahankan terimakasih
210631	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	sudah baik sudah oke, tetap dipertahankan terima kasih
210629	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	3	4	3	3	3	4	3	sudah oke dan baik, mohon tetap dipertahankan
210627	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	sangat memabntu dan data sesuai
210624	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	L	25-45	S1	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mantep, Murah Senyum, percepat lagi untuk proses dokumennya
210623	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	3	3	3	4	4	4	3	3	sudah baik dan sigap mohon tetap dipertahankan
210622	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Buku pelaut awak kapal perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	3	4	4	3	4	3	3	sudah baik mohon tetap dipertahankan
210621	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	3	4	4	3	3	3	4	mohon lebih cepat dalam penerbitan skkp, untuk keseluruhan sudah ike dan baik
210620	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga makin membantu dalam laporan keberangkatan
210619	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	semoga makin di permudah dalam kedatangan
210618	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik dan bermanfaat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

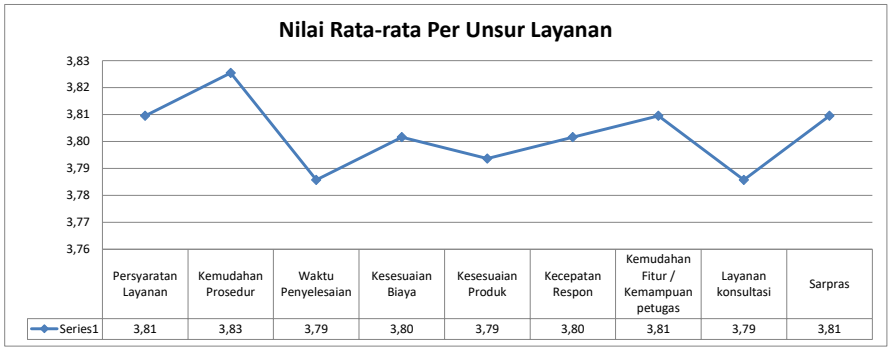
210617	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	4	4	4	3	3	4	4	kadang aplikasi epit nya eror atau lambat jadi sering menghambat, tp untuk keseluruhan sudah baik
210616	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik dan bermanfaat
210615	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	semoga semakin membantu dalam tambat labuh
210612	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	sudah baik dan bagus mohon tetap dipertahankan
210611	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat membantu dan mudah
210610	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan transportasi kendaraan/pengangkutan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	4	3	4	4	3	3	3	3	sudah oke dan baik mohon tetap dipertahankan
210609	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mudah dan bermanfaat
210608	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	Baik dan bermanfaat
210606	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	sudah baik mohon tetap dipertahankan teimakasih
210604	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	3	3	4	4	4	3	3	4	sudah baik mohon lebih cepat untuk validasinya terimakasih
210603	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	P.UKKP	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	Baik dan mudah
210602	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210601	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	3	4	4	3	3	4	4	sudah baik mohon tetap dipertahankan
210600	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210599	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210598	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210594	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210592	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	25-45	SMP	P.UKKP	5	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Selalu semangat pelayanannya
210589	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	46-60	SD	pelajar	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Yg kurang diperbaiki Yg sdh baik dipertahankan
210588	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan transportasi kendaraan/pengangkutan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210587	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210584	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210583	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210582	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan transportasi kendaraan/pengangkutan		P	L	46-60	SMP	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik
210581	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210580	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Buku pelaut awak kapal perikanan		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210579	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	46-60	SMA	P.UKKP	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga menjadi lebih baik lagi
210578	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Efisiensi kerja cepat
210577	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	L	25-45	S1	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semakin lebih baik lagi
210574	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		K	L	25-45	SMA	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan cepat dan mantap
210572	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	25-45	S1	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semakin lebih baik lagi
208237	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pengesahan perjanjian kerja laut		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak yaa
208236	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak yaa
208235	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak yaa
208231	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Buku pelaut awak kapal perikanan		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak yaa
208228	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih banyak ya
207787	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih banyak yaa
207400	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat hasil tangkapan ikan		P	P	<25	SMA	swasta	5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	semoga makin membantu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

205836	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	L	25-45	SMA	P.UKKP	5	3	3	2	3	3	3	3	3	3	Harus di pertahankan
203695	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	SMP	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat memuaskan bagi saya
203691	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	SMP	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ngga ada kritik.
202277	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	>60	SMA	P.UKKP	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Baik sekali pelayanannya
202227	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAIK TERIMAKASIH
200921	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Persetujuan berlayar		P	L	25-45	S1	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih dan tetap semangat
200919	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Sangat sesuai, semangat kedepannya
200895	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	<25	SMA	swasta	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	Sudah cukup bagus
200879	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	petugas sangat membantu
200812	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	L	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang sangat baik
200810	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi		P	P	<25	S1	swasta	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	sudah baik terimakasih
200604	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan		P	P	<25	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat memuaskan masyarakat
200335	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	oke baik terimakasih
200327	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	Sudah baik, pelayanan cepat dan bagus, pertahankan terus yaa
200326	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	D3	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat bagus
200325	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	<25	SMA	swasta	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	sudah baik mohon tetap dipertahankan, terima kasih
200324	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	SMA	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga selalu memberikan pelayanan yg terbaik
200323	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah baik, semoga tetap bisa dipertahankan
199987	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan cepat, petugas ramah dan responsif
199965	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	SMP	wirausaha	5	4	4	3	4	3	4	4	3	3	Petugas sudah sangat relavan
199778	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Saya suka dengan pelayanan petugas yg sangat sigap
199765	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Baik cepat ramah
198975	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Sertifikat kelaikan kapal perikanan		P	L	25-45	S1	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah bagus pelayanannya, terus dipertahankan
198501	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ramah,baik, best mantepp la pokoknyaa
198500	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ramah,baik, best mantepp la pokoknyaa
198499	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mantapp, baik, ramahh, best
197977	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	S1	pelajar	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	okeh mantap good
197976	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	S1	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mantap baik cekatan
197545	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	P	25-45	SMA	pns	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat baik
197539	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	25-45	S1	pns	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Terima kasih banyak
197538	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	25-45	SMP	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas sangat ramah
197537	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	25-45	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan.
196471	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	P	25-45	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	petugas sangat ramah.
196446	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	P	46-60	SMP	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan
196445	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	25-45	SD	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik pelayanannya ramah
195875	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		K	P	25-45	SMA	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan terbaik dan memuaskan
195820	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	25-45	S1	wirausaha	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	Petugas sangat baik dan sopan
195746	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	46-60	D3	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	terima kasih wasallam
195662	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	<25	SMA	swasta	3	3	2	3	3	2	2	2	1	1	Diperbaiki atau menambahkan sarana Dan prasana yang ada
195660	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	46-60	SD	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat ramah dan baik sekali
195631	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Baik dan cepat
195623	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mantap baik cepat cekatan
195622	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mantap baik cekatan
195620	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	S1	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan nya sangat baik sekali
195619	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	S1	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	SANGATT BAIKK DAN RAMAHH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

195369	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga tetap bisa mempertahankan pelayanan yang sudah bagus ini
195319	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan		P	L	25-45	SD	P.UKKP	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak ada saran semua bagus
195318	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	<25	SMP	P.UKKP	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	Cukup 1X penarikan untuk 1 hari
195312	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	25-45	SMA	swasta	4	2	3	4	2	3	2	3	3	2	Fasilitas kurang memadahi
195287	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	25-45	SMA	swasta	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kalo narik jangan di jam istirahat .sibuk
195283	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	46-60	SMP	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan Petugas sangat memuaskan
195282	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	L	25-45	SMP	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas sangat bagus
195281	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Listrik		P	L	46-60	SMA	wirausaha	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat ramah.
195265	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	<25	SMA	pelajar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas ramah dan satset
195263	3	2026	djpt	PPS Cilacap	Pas masuk harian dan berlangganan		P	P	25-45	S1	swasta	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	KEREN IS THE BEST
													480	482	477	479	478	479	480	477	480	
													0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
																					3,80	
																					95,06	



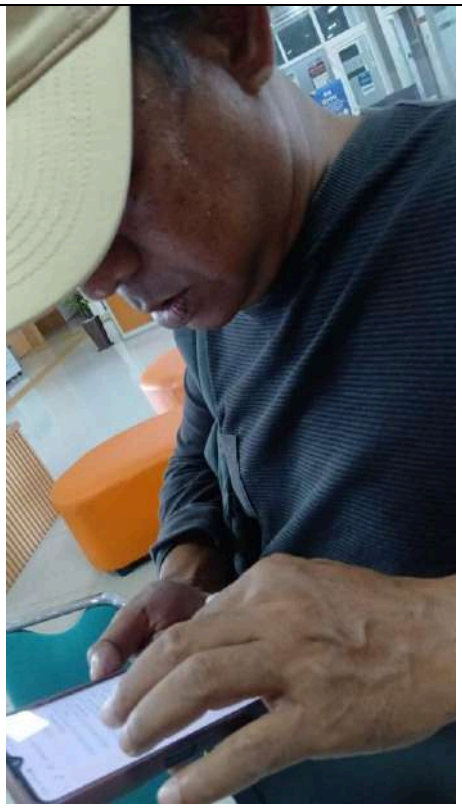
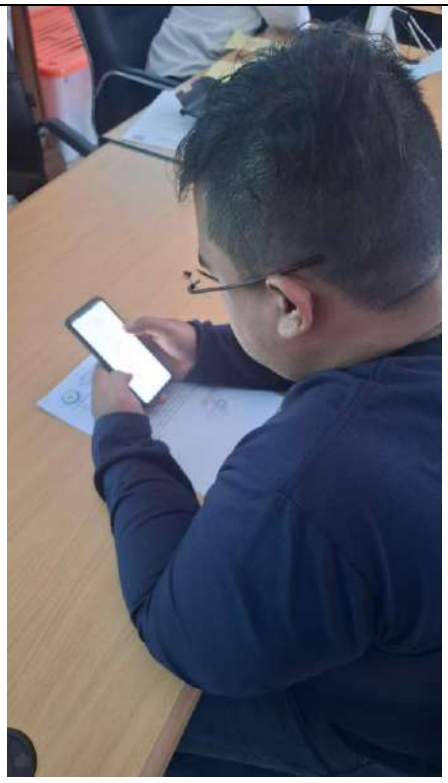
Persyaratan Layanan	Kemudahan Prosedur	Waktu Penyelesaian	Kesesuaian Biaya	Kesesuaian Produk	Kecepatan Respon	Kemudahan Fitur / Kemampuan petugas	Layanan konsultasi	Sarpras
3,81	3,83	3,79	3,80	3,79	3,80	3,81	3,79	3,81

Uraian	Nilai unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	95,24	95,63	94,64	95,04	94,84	95,04	95,24	94,64	95,24
Mutu Pelayanan	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Pelayanan Publik	95,06								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI PELAKSANAAN SKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 4

LAPORAN TINDAK LANJUT SKM TW II 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN TINDAK LANJUT SKM

TRIWULAN II 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

HASIL TINDAK LANJUT SKM TRIWULAN II TAHUN 2026

I. Tabel Ringkasan hasil SKM Triwulan IITahun 2026

No	Layanan	Triwulan I 2026		Triwulan II 2026	
		IKM	KUP	IKM	KUP
1	E-Logbook Penangkapan Ikan	94,75	SB	95,83	SB
2	Cold storage	100	SB	-	-
3	Pas Masuk	92,78	SB	94,84	SB
4	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	100	SB	84,72	B
5	Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	97,84	SB	92,22	SB
6	Penggunaan Transportasi	100	SB	97,22	SB
7	Jasa Tambat Labuh	98,81	SB	91,05	SB
8	Jasa Listrik	100	SB	98,15	SB
9	Persetujuan Berlayar	98,33	SB	91,98	SB
10	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	99,44	SB	95,06	SB
11	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	93,75	SB	93,44	SB
12	Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	99,60	SB	92,90	SB
13	Buku Pelaut	96,53	SB	86,11	B

II. Tabel Rencana Tindak Lanjut atas SKM Triwulan II Tahun 2026

Rencana tindak lanjut atas hasil analisa IKM PPS Cilacap TW II Tahun 2026:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kesesuaian Biaya	Melakukan sosialisasi dan publikasi tarif layanan sesuai ketentuan melalui media informasi			√		**Tim Kerja Pelayanan Publik**
2	Kemudahan Prosedur	Menyediakan media informasi alur layanan dalam bentuk infografis			√		**Tim Kerja Pelayanan Publik**
3	Layanan Konsultasi	Mengoptimalkan layanan konsultasi melalui petugas layanan, media komunikasi (telepon, WhatsApp, email), serta penyediaan meja konsultasi dan informasi.			√		**Tim Kerja Pelayanan Publik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana tindak lanjut atas saran pada aplikasi SUSAN KKP

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
4	Kemudahan Prosedur	Sosialisasi Prosedur dan persyaratan berdasarkan Standar Pelayanan			√		**Tim Kerja Pelayanan Publik**
5	Biaya/Tarif	Sosialisasi biaya/tarif berdasarkan Standar Pelayanan			√		**Tim Kerja Pelayanan Publik**

III. Tabel Realisasi atas rencana tindak lanjut SKM Triwulan II Tahun 2026

Realisasi tindak lanjut atas hasil analisa IKM PPS Cilacap TW II Tahun 2026

No	Rencana Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut	Dokumentasi
1	Melakukan sosialisasi dan publikasi tarif layanan sesuai ketentuan melalui media informasi	Biaya/tarif atas layanan yang ada di PPS Cilacap telah tercantum pada Standar Pelayanan yang direview secara berkala. Informasi terkait dengan standar layanan yang didalamnya terdapat komponen biaya/tarif juga telah diinformasikan secara berkala melalui media sosial.	Dokumentasi terlampir
2	Menyediakan media informasi alur layanan dalam bentuk infografis	Alur pelayanan yang ada pada Gedung PTSA PPS Cilacap merupakan alur pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi yakni aplikasi SIANTASENA.	Dokumentasi terlampir
3	Mengoptimalkan layanan konsultasi melalui petugas layanan, media komunikasi (telepon, WhatsApp, email), serta penyediaan meja konsultasi dan informasi.	Pelaksanaan penanganan pengaduan dan konsultasi telah dilakukan secara sistematis dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna.	Dokumentasi terlampir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Rencana Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut	Dokumentasi
4	Sosialisasi Prosedur dan persyaratan penerbitan SKKP berdasarkan Standar Pelayanan	Telah dilakukan publikasi terhadap persyaratan pelayanan SKKP, yang mana persyaratan tersebut tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan	Dokumentasi terlampir
5	Sosialisasi biaya/tarif pelayanan tambat labuh berdasarkan Standar Pelayanan	Telah dilakukan publikasi atas biaya/tarif atas pelayanan tambat labuh yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada KKP	Dokumentasi terlampir

Cilacap, 4 Agustus 2026

Kepala PPS Cilacap

Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahrus, S.St.Pi, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT HASIL SKM TW II 2026

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

1. **Sosialisasi tarif layanan melalui publikasi di sosial media**
2. **Media informasi alur layanan**
3. **Layanan Pengaduan dan Konsultasi**
4. **Publikasi persyaratan penerbitan SKKP**
5. **Publikasi biaya/tarif tambat labuh**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN YANG MELIPUTI SISTEM MEKANISME PROSEDUR SERTA TARIF





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN YANG MELIPUTI SISTEM MEKANISME PROSEDUR SERTA TARIF





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

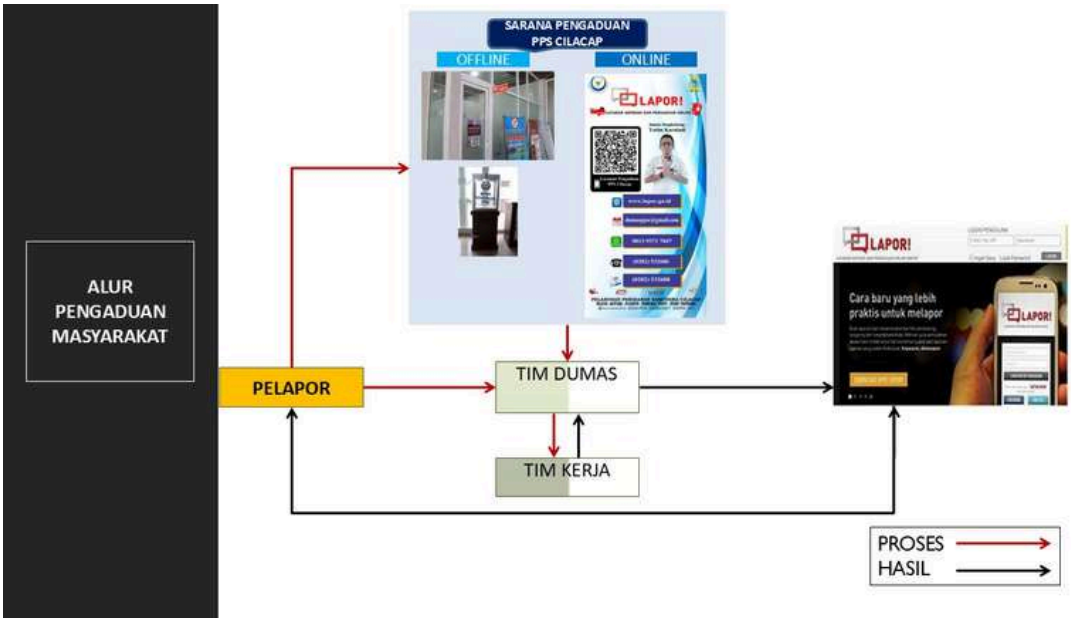
MEDIA INFORMASI ALUR LAYANAN

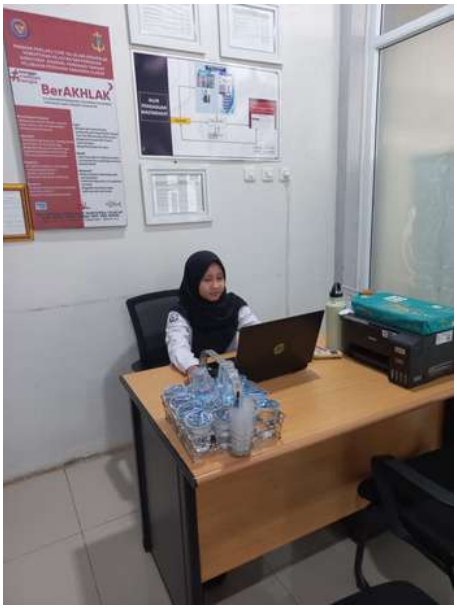


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

OPTIMALISASI LAYANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI

Layanan Pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan secara sistematis oleh Tim Pengaduan yang secara khusus menangani pengaduan maupun konsultasi. Sarana dan prasarana pengaduan telah disediakan baik online maupun offline untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna yang akan melakukan pengaduan dan/atau konsultasi. Pelayanan pengaduan dapat dilakukan 24 jam dengan alur sebagai berikut:









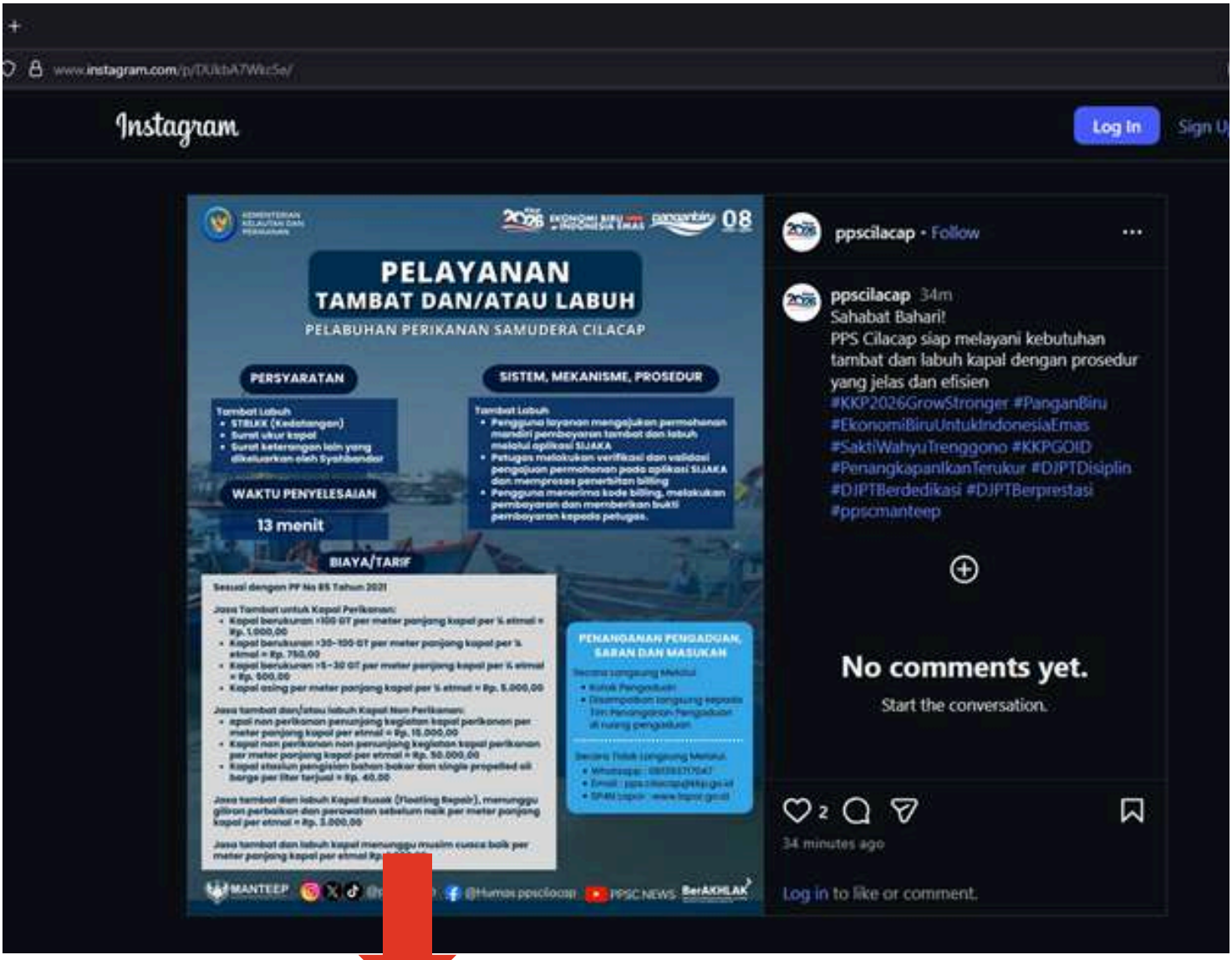
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

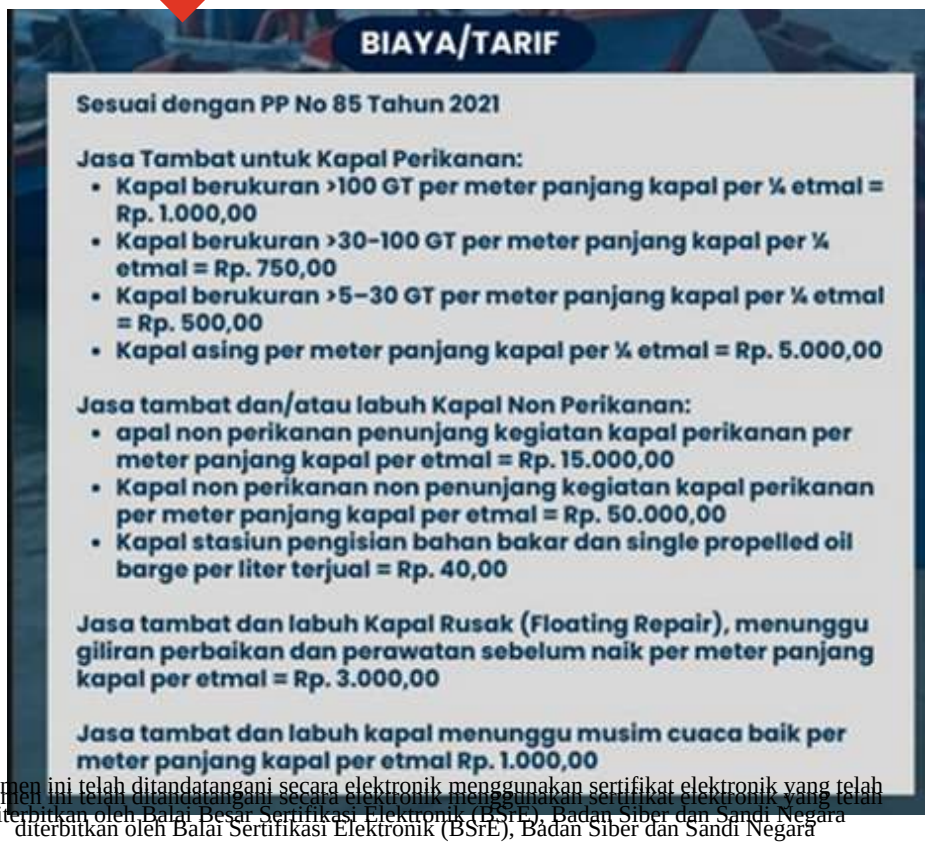
PUBLIKASI PROSEDUR DAN PERSYARATAN PELAYANAN SKKP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PUBLIKASI TARIF PELAYANAN TAMBAH LABUH





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara